

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN ANGKATAN DARAT
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
TAHUN 1959-1965**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

Alchadilla Marwhenny

021314047

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN ANGKATAN DARAT
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
TAHUN 1959-1965**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

Alchadilla Marwhenny

021314047

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**PERANAN ANGKATAN DARAT PADA MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN TAHUN 1959-1965**

Oleh :

Alchadilla Marwhenny

NIM: 021314047

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 13 Juni 2008

Pembimbing II



Drs. Sutardjo Adisusilo, J.R., S.Th.

Tanggal 13 Juni 2008

SKRIPSI

PERANAN ANGKATAN DARAT PADA MASA DEMOKRASI

TERPIMPIN TAHUN 1959-1965

Dipersiapkan dan ditulis oleh
Alchadilla Marwhenny
NIM: 021314047

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 24 Juli 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

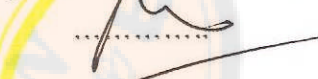
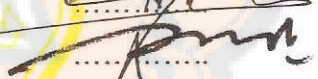
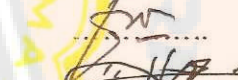
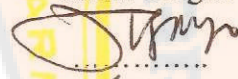
Ketua : Yehanes Harsoyo, S.Pd, M.Si.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota : Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.

Anggota : Drs. Sutardjo Adisusilo, J.R. S.Th.

Anggota : Drs. A.A. Padi



Yogyakarta, 24 Juli 2008
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




Drs. Tarsisius Sarkim, M.Pd, Ph.D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : ALCHADILLA MARWHENNY

Nomor Mahasiswa : 021314047

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul : **PERANAN ANGKATAN DARAT PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965.**

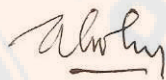
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Agustus 2008

Yang menyatakan



(Alchadilla Marwhenny)

MOTO

Bagi siapa saja diantara yang berkehendak akan maju/ mundur siap-siap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Q.S. AL. Muddatstsir : 37-38

Kamu tidak bisa mengajarkan apapun kepada manusia kamu hanya bisa membantu menemukannya di dalam diri mereka sendiri.

Galileo

Berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.

Persembahkan

Puji Syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Bapak, Ibu, Ayuk dan Adik tercinta.

*Terimakasih atas limpahan kasih sayang
yang telah diberikan padaku...*

PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

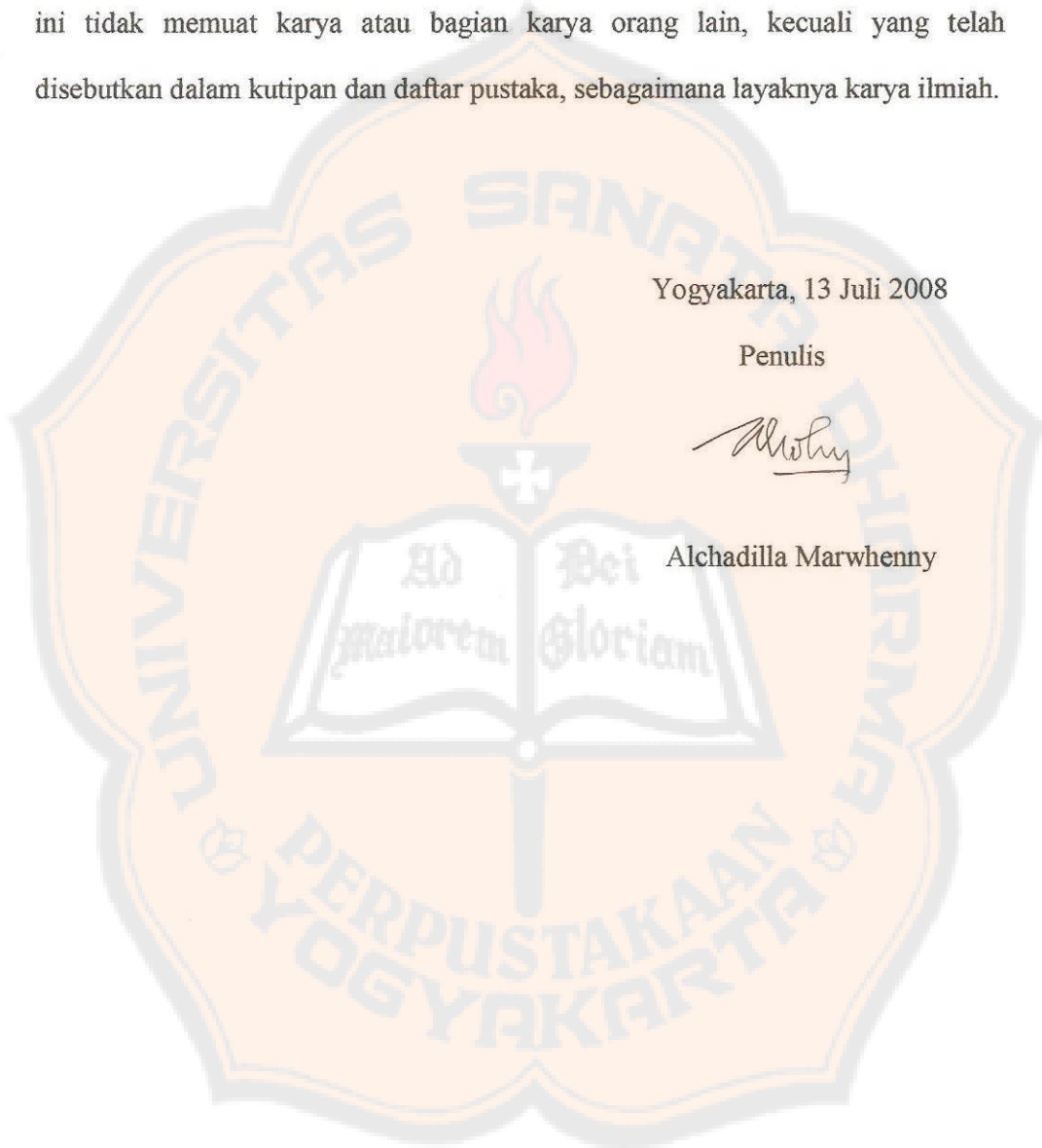
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 13 Juli 2008

Penulis



Alchadilla Marwhenny



ABSTRAK

**Judul: Peranan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin
Tahun 1959-1965**

Oleh: Alchadilla Marwhenny

NIM: 021314047

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya demokrasi terpimpin, (2) sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat, (3) sumbangan yang diberikan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi 4 tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan multidimensional yang terdiri dari pendekatan histories, politik, psikologi dan ekonomi. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penulisan sejarah yang menguraikan kejadian atau fakta dan peristiwa masa lalu berdasarkan hubungan sebab akibat.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin adalah kekecewaan terhadap Demokrasi Parleментар. Pada masa Demokrasi Parleментар terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat dan terjadi pergolakan-pergolakan daerah. Angkatan Darat mengusulkan gagasan Demokrasi Terpimpin, karena Demokrasi Terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang kuat dan berwibawa yang pada akhirnya akan sanggup mengakhiri krisis politik serta memulihkan ketertiban negara; (2) Sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat yaitu Soekarno membutuhkan PKI sebagai penyeimbang Angkatan Darat dalam pembentukan Demokrasi Terpimpin. Soekarno menganggap Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang mendominasi. Oleh sebab itu Presiden Soekarno mengatur keseimbangan kekuatan politik antara tentara dan PKI dan berusaha tetap mengontrol agar salah satunya tidak lebih dominan dan presiden tetap menjadi faktor penentu kebijakan; (3) Sumbangan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin meliputi 2 bidang yaitu bidang politik, dan ekonomi. Sumbangan Angkatan Darat dalam bidang politik yaitu Angkatan Darat telah menerapkan konsep Dwifungsi ABRI dan berhasil mengatasi stabilitas politik. Dimana pada konsep Dwifungsi ABRI Angkatan Darat memiliki peranan rangkap yaitu sebagai kekuatan politik dan kekuatan sosial. Sedangkan dalam bidang ekonomi Angkatan Darat berhasil menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

ABSTRAK

**THE ROLE OF ARMY IN THE PERIOD OF GUIDED DEMOCRACY
DURING 1959 1965**

By : Alchadilla Marwhenny

NIM : 021314047

The writing of paper aims to describe and analyze: (1) the background of Army to support the coming back of Guided Democracy, (2) Soekarno's attitude towards the Army, (3) the contribution given by the Army during the period of Guided Democracy.

The writing of paper applied a historical method covering four steps: *heuristic, verification, interpretation, and historiographs*. Approach used in this paper is *multidimensional*, approach which consists of historical, political, psychological and economic approaches the method of writing was an analytical descriptive method: it is historiographic method by elaborating occurrence or fact and past events based on causes and effects.

The result shows that: (1) the background of Army in supporting the coming back of Guided Democracy was the disappointment of the Parliamentary Democracy. In the period of Parliamentary Democracy, there was cabinet reshuffle in a short time and there were turbulences. The Army proposed the idea of the Guided Democracy because it was a strong and authoritative government system which can end the political crisis and make Stability of the State; (2) Soekarno needed the Army as the balance of the existence of Indonesian Communist Party in forming Guided Democracy. Soekarno assumed that the Army as the political strength was still needed in order to control that one of them was not dominant but the president was still the dominant figure in making the decision: (3) the contribution of the Army in the period of the Guided Democracy covered two areas; they were political and economic aspect. The contribution of the Army in political aspect was the concept of Dual Function of Armed Forces and the success to establish political stability. While in economic aspect, the Army had succeeded to nationalize the foreign companies.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Peranan Angkatan Darat pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Prof. Dr. P. J. Suwarno, SH. Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan memberi banyak masukan yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo J.R. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing, memberikan pengarahan, masukan serta sumbangan pemikiran hingga terselesainya skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak Drs. A.A. Padi selaku dosen penguji skripsi.
7. Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M, selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Pendidikan Sejarah dan petugas sekretariat yang telah membantu penulis sejak insadha sampai wisuda.
9. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis dalam mendapatkan referensi.
10. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sunendro, Ibu Marwah, dan kedua saudaraku ayuk Ekka dan adik Budi yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang dan mencukupi semua keperluan pendidikan yang dibutuhkan penulis.
11. Sahabatku dek Lely, Yuli, Wawan, Bayu, dan teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan 2002, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sekalian pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Penulis

Alchadilla Marwhenny

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kajian Teori	17
G. Hipotesis.....	38
H. Metode dan Pendekatan.....	39
I. Sistematika Penulisan	46

BAB II LATAR BELAKANG ANGKATAN DARAT MENDUKUNG DIBERLAKUKANNYAN DEMOKRASI TERPIMPIN.....	47
A. Kekecewaan pada masa Demokrasi Parlementer.....	47
1. Terjadinya pergolakan di daerah.....	47
2. Adanya pergantian kabinet dalam waktu yang singkat.....	53
B. Kepentingan Angkatan Darat	56
1. Angkatan Darat menjaga pertahanan dan keamanan	56
2. Angkatan Darat mempunyai peranan dalam pemerintahan	58
C. Munculnya Demokrasi Terpimpin	63
BAB III SIKAP SOEKARNO TERHADAP ANGKATAN DARAT.....	66
A. Pandangan Soekarno terhadap Angkatan Darat	66
➤ Angkatan Darat sebagai penyeimbang PKI.....	66
B. Hubungan Soekarno dengan Angkatan Darat	70
BAB IV SUMBANGAN YANG DIBERIKAN ANGKATAN DARAT PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.....	74
A. Bidang Politik.....	74
1. Dwifungsi ABRI	74
a). Konsep Jalan Tengah	74
b). Aplikasi Dwifungsi ABRI	75
2. Stabilitas Politik	81
a). Menjaga Pertahanan dan keamanan.....	81
b). Mengamankan pergolakan di daerah.....	86
c). Masalah Irian Barat.....	88

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Bidang Ekonomi.....	91
➤ Menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.....	91
BAB V KESIMPULAN	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dekrit Presiden 5 Juli 1959	110
Lampiran 2 : Gambar Suasana di muka Istana merdeka pada tanggal 5 Juli 1959. Masa rakyat mendengarkan Dekrit Presiden kembali ke Undang- Undang Dasar 1945.....	111
Lampiran 3 : Gambar Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dihadiri oleh ole pejabat sipil dan militer	112
Lampiran 4 : Foto Soekarno.....	113
Lampiran 5 : Foto Jenderal Abdul Haris Nasution	114
Lampiran 6 : Foto Jenderal Ahmad Yani.....	115
Lampiran 7 : Gambar Peran militer ABRI melawan pemberontakan PRRI....	116
Lampiran 8 : Isi Tri Komando Rakyat.....	117
Lampiran 9 : Naskah Pernyataan Resolusi yang telah diterima oleh PBB	118
Lampiran 10: Pasal-Pasal Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland mengenai Irian Barat	123
Lampiran 10: Silabus	128
Lampiran 11: Rencana Pembelajaran.....	133

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Motivasi nasionalisme bangsa Indonesia yang melahirkan tekad merdeka atau mati menjadi inti keberanian kekuatan untuk mencetuskan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan keberanian serta tekad di dalam perjuangan tanpa kenal menyerah mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan jalan yang paling mulia bagi setiap bangsa untuk membangun dirinya sendiri, dengan kekuatan sendiri, bebas dari campur tangan bangsa asing. Membangun pada hakekatnya adalah merubah nasib diri sendiri dalam hubungan kebersaman dengan bangsa lain, untuk meningkatkan taraf hidup material dan spiritual menjadi lebih baik.

Kemerdekaan hanyalah dapat dipakai oleh bangsa yang bersatu dan kesatuan hanyalah dapat dicapai oleh kehendak yang sama bagi semua golongan Persatuan dan Kesatuan bangsa adalah merupakan perasaan senasib sepenanggungan, akibat dari penderitaan yang sama dan cita-cita yang sama pula, yaitu kebebasan dari segala bentuk penindasan.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.¹ Maka dua hari setelah Proklamasi, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, melalui suatu tipu muslihat yang rapi, penguasa Jepang di Jawa membubarkan Peta dan Heiho. Peta

¹ Bernhard, Dahm. 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. LP3ES. Jakarta. hlm 389.

(Pembela Tanah Air) yang didirikan pada bulan Oktober 1943 merupakan salah satu badan militer yang terpenting yang dibuat oleh Jepang. Para pemimpin Peta diambil dari orang-orang yang berusia agak tua dan diperkirakan memiliki pengaruh di daerahnya. Mereka yang sering dipilih adalah guru, pegawai pemerintah atau tokoh-tokoh agama (Islam). Mereka tidak menerima latihan militer secara intensif karena fungsinya semata-mata hanya sebagai pimpinan moral dan melakukan pengawasan politik kepada bawahannya. Posisi komandan Utama dipegang oleh orang Jepang.² Para anggota Peta dan Heiho kemudian disuruh pulang ke kampung halamannya masing-masing dengan dibekali sejumlah perlengkapan dan beberapa bulan gaji. Tindakan Jepang ini dapat dianggap sebagai upaya mereka untuk menghalangi negara RI yang baru lahir ini menjadikan Peta dan Heiho sebagai tentara kebangsaannya yang resmi. Namun pembubaran Peta dan Heiho oleh Jepang ini memberikan hikmah bagi bangsa Indonesia, karena tentara kebangsaan Indonesia akan lahir kembali, yaitu tentara asli dari produk perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan buatan Jepang.³

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang memutuskan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). KNI membentuk BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat).⁴

² Budi Santoso, SJ, dkk. 1995. *ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995*. Kanisius. Yogyakarta. hlm 24.

³ Saleh, R.H.A. 1995. *Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong*. Pustaka Nusantara. Yogyakarta. hlm 5.

⁴ Hendri Supriyatmono. 1994. *Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi kearah Reformasi Politik*, Pustaka Nusantara. Yogyakarta. hlm 14

Pada tanggal 23 Agustus 1945 didirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Anggota BKR ini yaitu orang-orang yang berasal dari anggota Peta dan Heiho. Walaupun BKR secara resmi bukan merupakan tentara resmi dari negara RI, namun struktur maupun kegiatannya sudah menyerupai tentara resmi. Pimpinan-pimpinan BKR ini dipegang oleh mantan anggota Peta, Heiho atau KNIL. BKR yang ada di Jakarta didirikan tanggal 1 September 1945 dan daerah yang menjadi pertanggung jawabannya meliputi seluruh keresidenan Jakarta (termasuk daerah Cikampek) yang dipimpin oleh Moeffreini Mo'emin. Ia adalah seorang mantan perwira Peta (Shodancho dari Dai Ichi Daidan) di Jakarta. BKR keresidenan Jakarta menempati markasnya diseluruh gedung bekas sekolah yang terletak di jalan Cilacap no 5 Jakarta.⁵

Dengan berdirinya TKR pada tanggal 5 Oktober 1945 yaitu setelah satu bulan Indonesia merdeka. Maka BKR secara otomatis meleburkan dirinya ke dalam TKR. TKR ini dalam perlawanan bersenjata menghadapi musuhnya mulai berjalan lebih terkendali dan terarah. TIM TKR yang ada di pulau Jawa terdiri dari 3 Komandemen dan 10 Divisi serta sejumlah Resimen TKR yang ada di dalam kota Jakarta, di Tangerang dibangun lagi satu Resimen di bawah pimpinan Letkol Singgih. Ia adalah seorang mantan Shodancho PETA dari Dai Ichi Daidan Jakarta.⁶

Pada tanggal 20 Oktober 1945 Muhammad Sulyoadikusumo diangkat sebagai menteri Keamanan Rakyat ad interim, sedangkan Supriyadi diangkat sebagai Pimpinan Tertinggi TKR, sedangkan Kepala Staf umumnya adalah

⁵ Saleh, R.H.A. *op.cit.* hlm 6-7.

⁶ *Ibid.* hlm 11-13.

Urip Sumoharjo. Pembentukan TKR ternyata tetap belum memuaskan bagi mayoritas anggotanya, terutama bagi yang pernah memperoleh pendidikan militer. Dalam pandangan mereka pembentukan TKR masih memperlihatkan keraguan-keraguan pemerintah atas konsekuensi yang kemudian akan muncul dengan terbentuknya sebuah tentara negara. TKR dianggap hanya menekankan segi ketentraman rakyat, namun juga dinilai bukan merupakan tentara pertahanan atau militer profesional.

Pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR yang pertama di Yogyakarta. Konferensi ini berhasil memilih Kolonel Sudirman, Komandan dan Divisi V (Kedu-Banyumas) sebagai Panglima Besar TKR dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Keamanan.⁷

Pada tanggal 23 Februari 1946, TKR diganti dengan nama TRI (Tentara Republik Indonesia). Maksud perubahan nama ini adalah untuk memberikan makna, apa arti angkatan bersenjata yang beroperasi di negara ini. Tetapi tindakan ini merupakan kegagalan karena berbagai Laskar atau unit-unit para militer terus berafiliasi dengan partai-partai politik dan dengan begitu memperumit dan bahkan menentang otoritas militer TRI. Karena kontrol pemerintah atas TRI hanya nominal, kenyataan itu juga memperburuk masalah dalam tubuh TRI. Untuk mengatasi keadaan ini maka pada tanggal 21 Mei 1946, Sudirman ditunjuk menjadi Panglima Besar TRI dan dipromosikan ke tingkat Jenderal.

⁷ Hendri Supriyatmono. *op.cit.* hlm 16-17.

Kaitan organisasi-organisasi pejuang dengan berbagai partai politik itulah yang menciptakan masalah dan untuk memecahkannya menteri pertahanann, Amir Syarifuddin (seorang sosialis) mendirikan sebuah Biro Perjuangan dalam Kemnterian Pertahanan. Kelompok Organisasi pejuang yang paling baik adalah Pesindo. Dan oleh sebab itu secara perlahan Biro Perjuangan perlahan juga berada dibawah Kendali sosialis.

Melihat tantangan itu, pada tanggal 3 Juni 1947, TRI diubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah bulan Juni 1947, semua kekuatan bersenjata regular dan iregular ini dileburkan kedalam angkatan bersenjata yang benar-benar bersifat nasional. Sejauh ini tantangan paling serius masih berasal dari Biro Perjuangan. Amir Syariffuddin yang menjabat menteri pertahanan menganut kaum sosial yang menginginkan kelompok militer bentuknya terpisah.

Sementara pada saat itu Pemerintah dan Angkatan Bersenjata bertekad untuk bersatu, karena kaum sosialis dalam kementrian Pertahanan tidak bisa memperoleh kontrol atas Angkatan Bersenjata Nasional, dengan keinginan mereka itu, mereka mengkhianati keputusan mereka sendiri untuk mempersatukan semua unsur bersenjata dan bahkan mengubah nama Biro Perjuangan sebagai TNI masyarakat. Hal ini membuat hubungan sipil- militer semakin memburuk, karena adanya kecurigaan militer terhadap maksud-maksud militer.⁸

⁸ Budi Santoso, SJ, dkk. *op. cit.* hlm 25-26.

Keterpecahan militer-militer menjadi perdana menteri pada tanggal 3 Juli 1947. Walaupun Kementerian Pertahanan mendirikan Biro Perjuangan untuk menyusupkan orang-orang militernya namun fungsi dan keputusan yang diambil oleh biro ini kadangkala begitu tidak tegas sehingga kerap kali muncul pertanyaan apakah orang-orang tempurnya ke dalam Angkatan Bersenjata atau sekedar menciptakan Angkatan Bersenjata lain disamping yang sudah ada. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya kerjasama antara militer dan kaum politisi. Karena upaya para politisi untuk meletakkan angkatan-angkatan bersenjata dibawah kontrol mereka guna melayani kepentingan-kepentingan partai mereka, dan sebagai akibat meluasnya perpecahan ideologis di kalangan partai-partai politik, kepemimpinan militer mulai mengambang ideologinya sendiri.⁹

Ada dua istilah yang berhubungan dengan golongan militer di Indonesia yaitu ABRI dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Di Indonesia Angkatan bersenjata mempunyai peran ganda yaitu berperan sebagai pertahanan keamanan dan sebagai peran sosial. Peran sosial ini dapat diartikan bahwa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan wilayah pedesaan, mensukseskan program-program pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan transmigrasi.¹⁰

Peranan militer TNI amat menentukan bagi suatu negara. Dalam masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, tentara terlibat dalam perjuangan

⁹ Bilveer Singh. 1995. *Dwifungsi ABRI. Asal-Usul Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan* PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. hlm 34-37.

¹⁰ Hidayat Mukmin. 1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri. Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta. hlm 17-19.

kemerdekaan dimana tindakan politik dan militer saling menjalin dan tak terpisahkan. Setelah peralihan kekuasaan di akhir tahun 1945, secara resmi tentara menerima keunggulan kekuasaan sipil. Pada tahun 1957 para pimpinan tentara tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap kemacetan sistem parlementer.¹¹ Pada masa Demokrasi Parlementer Indonesia terpecah belah dan terjadi pengelompokan, sehingga sulit untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu Demokrasi Parlementer menutup kemungkinan pintu partisipasi politik bagi sejumlah kekuatan yang sudah membuktikan dirinya sebagai pusat-pusat kekuasaan, Angkatan Darat yang berjasa selama perang kemerdekaan dilarang masuk kedalam politik kepartaian dan orang yang memiliki kharisma dan ambisi yang besar di Indonesia hanya diberikan kedudukan Presiden simbolis.¹²

Tetapi para perwira mendapatkan peran yang lebih besar dalam fungsi-fungsi politik, administrasi dan ekonomi. Untuk memperoleh tentara dalam fungsi-fungsi tersebut maka Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdul Harris Nasution mengambil jalan tengah yaitu pihak tentara untuk mengambil alih pemerintahan, namun juga akan bersifat acuh tak acuh terhadap politik. Setelah itu tentara juga menuntut hak mereka untuk tetap duduk dalam pemerintahan, lembaga perwakilan serta administrasi. Pada seminar yang diselenggarakan pada bulan April 1965. Tentara mencetuskan suatu doktrin yang menyatukan bahwa angkatan bersenjata memiliki peran ganda yaitu sebagai kekuatan sosial politik, kegiatan-kegiatan tentara meliputi

¹¹ Harold Crouch. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan Jakarta. hlm 21.

¹² Ulf Sundhaussen. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. LP3ES. Jakarta. hlm 209-210.

bidang-bidang ideologi, politik, sosial dan ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.¹³

Sehingga pada masa Demokrasi Parlementer menyebabkan politik Indonesia tidak stabil. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Partai-partai yang berkoalisi tidak dapat berperan secara aktif dan saling menjatuhkan hal ini membawa dampak negatif pada masa Demokrasi Parlementer yang menyebabkan seringnya terjadinya pergantian kabinet.

Untuk mencari jalan keluar dalam pemecahan masalah tersebut maka adanya usul-usul yang berasal dari masing-masing tokoh. Usulan yang pertama berasal dari Presiden Soekarno yang mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin pada bulan Februari 1957. Presiden menghendaki pembentukan suatu kabinet yang semua partai akan mengambil bagian dalam pembentukan suatu Kabinet yang semua partai besar akan mengambil bagian dalam pembentukan suatu Dewan Nasional, yakni sebuah badan penasehat tingkat tinggi yang didalam badan itu terdiri dari berbagai kelompok fungsional, buruh, tani, pengusaha nasional, akan diwakili dan bekerja berdasarkan konsensus.

Kemudian usulan yang kedua berasal dari tokoh-tokoh daerah terutama yang berkuasa di Sumatera Tengah dan Selatan dan di Indonesia Timur. Usulan ini datang setelah bulan Maret 1957. Pemecahan yang mereka usulkan adalah

¹³ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 22.

“Pemulihan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta” yaitu pengembalian Hatta sebagai Perdana Menteri, mereka memihak kepada tuntutan otonomi daerah, kekuasaan yang lebih besar dan anti komunis.¹⁴

Dengan adanya penyelesaian secara damai tersebut, maka pada pertengahan tahun 1958 telah tercipta basis keseimbangan politik yang mantap. Dengan kemantapan politik ditandai dengan runtuhnya Demokrasi konstitusional. Runtuhnya Demokrasi ini diganti dengan Demokrasi Terpimpin yang harapannya supaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan yang diharapkan oleh rakyat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin banyak terjadi perselisihan, walaupun perselisihan ini tidak sampai ke permukaan. Adapun perselisihan ini mengenai pengertian Demokrasi Terpimpin. Bagi Soekarno Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem yang dipimpin oleh satu pimpinan yaitu dirinya sendiri. Sementara pimpinan Angkatan Darat selaku pendukung kembalinya ke UUD 1945 berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin bukanlah suatu yang dipimpin oleh satu orang, melainkan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.¹⁵ Perbedaan yang sangat mendasar inilah yang menjadi permasalahan selama Demokrasi Terpimpin.

Namun kenyataannya Demokrasi Terpimpin dapat berjalan walaupun banyak rintangan dan hambatan. Tokoh-tokoh yang tidak senang dengan keberadaan Demokrasi Terpimpin berusaha ingin menjatuhkan Demokrasi

¹⁴ Herbert Feith. 1995. *Soekarno Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm 20.

¹⁵ Nazaruddin Sjamsuddin (ed). 1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Rajawali Press. Jakarta. hlm 24.

Terpimpin tersebut. Untuk mempertahankan Demokrasi Terpimpin Soekarno berkoalisi dengan partai-partai besar seperti PNI, PKI dan NU, supaya partai-partai tersebut mendukung dan memihak kepadanya. Sampai saat ini Soekarno berhasil menciptakan keharmonisan ditingkat nasional.

Pelaksanaan Demokasi Terpimpin ini mengalami keberhasilan dan kegagalan. Salah satu keberhasilannya yaitu pembebasan Irian Barat sehingga pihak Belanda menyerahkan kekuasaanya atas Irian Barat kepada RI dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Sedangkan kegagalannya terjadi peristiwa berdarah Gerakan 30 September tahun 1965.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin?
2. Bagaimana sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat?
3. Apa sumbangan yang diberikan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat.
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sumbangan yang diberikan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi kepustakaan dan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain dalam melakukan penulisan skripsinya tentang sejarah militer dan politik di Indonesia.

2. Bagi Perkembangan Ilmu Sejarah

Penelitian ini dapat menambah informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan sejarah khususnya tentang Peranan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

3. Bagi Mahasiswa Sejarah yaitu Penulis Sendiri.

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan tentang Peranan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa sumber yang digunakan untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Sumber-sumber yang digunakan dapat dibagi dalam sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti telepon, dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa. Louis Gottschalk juga menekankan bahwa sumber primer tidak perlu “asli” (asli yang dimaksudkan disini adalah bahwa dari sumber yang ada dalam peristiwa tersebut) tetapi sumber primer itu hanya harus “asli” dalam artian kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan dari tangan pertama.¹⁶ Adapun Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa Dekrit Presiden dan Pidato Presiden.

“*Dekrit Presiden*” dalam buku *30 Tahun Indonesia Merdeka*, buku ini ditulis oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, diterbitkan oleh Penerbit PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta: 1985. Buku ini berisi tentang pengalaman Bangsa Indonesia dalam masa kemerdekaan selama 30 tahun. Dengan menyajikan berbagai rangkaian peristiwa penting dari tanggal 21 Januari 1950 sampai dengan tanggal 27 Agustus 1964 dengan dihiasi gambar-gambar. Penulis mengambil buku ini sebagai acuan menulis karena di dalam buku ini ada sumber primer berupa Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

“*Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus sejak tahun 1945-1961 yang bertemakan Penemuan Kembali Revolusi*” dalam buku *Dari Proklamasi sampai Resopin*, buku ini diterbitkan oleh Departemen Penerangan. Penulis mengambil buku ini sebagai acuan menulis karena di

¹⁶ Louis Gottschalk. 1969. *Mengerti Sejarah*. UI Press. Jakarta. hlm 36.

dalam buku ini ada sumber primer berupa pidato presiden yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959.

Dibawah Bendera Revolusi, buku ini ditulis oleh Ir Soekarno, diterbitkan oleh Panitia Penerbit, Jakarta: 1965. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jilid yang kedua sebagai sumber Primer. Karena jilid II berisi kumpulan karangan pidato Presiden Soekarno yang berisi tentang perjuangan kebangsaan Soekarno, pandangan Soekarno tentang Demokrasi dan pemikirannya tentang penyelenggaraan pemerintah yang lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Namun dalam skripsi ini penulis tidak menggunakan sumber primer, karena sumber primer merupakan sumber asli berupa dokumen, arsip-arsip, dan saksi mata atas peristiwa yang terjadi yang sudah tidak dapat dihadirkan kembali. Jadi dalam skripsi ini penulis hanya menggunakan beberapa sumber sekunder yang dirasa sudah cukup mendukung penulisan skripsi ini.

Selain sumber primer diatas, ada juga sumber lain atau sumber sekunder yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Buku yang digunakan oleh penulis adalah buku yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun buku pokok yang digunakan penulis adalah:

1. *Militer dan Politik di Indonesia*, karangan Harold Crouch, tahun 1999, buku ini membahas tentang peranan militer politik tentara Inonesia selama

tiga periode. Adanya keterlibatan tentara dalam politik dan kedudukan mereka di masa Demokrasi Terpimpin, termasuk kegiatan-kegiatan para perwira tentara dalam peristiwa-peristiwa di sekitar terjadinya kudeta yang gagal tanggal 1 Oktober 1965. Buku ini merupakan sumber yang paling penting sehingga merupakan acuan paling pokok digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

2. *Soekarno militer dalam Demokrasi Terpimpin*, karangan Herbert Feith, tahun 1995, buku ini membahas tentang *power politic* dalam masa awal Demokrasi Terpimpin. Kabinet kerja terbentuk dalam tempo satu minggu setelah Dekrit 5 Juli 1959. Kabinet ini secara eksplisit sifatnya non partai, dimana anggota-anggota partai yang duduk di dalamnya diharuskan keluar dari partai. Program Kabinet pertama untuk periode Demokrasi Terpimpin diumumkan Soekarno pada tanggal 17 Agustus yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang nantinya diterima sebagai Manifesto Politik (Manipol/Usdek) dari Demokrasi Terpimpin.
3. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, karangan Nazaruddin Sjamsuddin (ed), tahun 1988, buku ini berisi tentang lahirnya Demokrasi Terpimpin sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, karena sebelum Demokrasi Terpimpin yang berlaku Demokrasi Parlementer. Selain itu buku ini juga membahas tentang pemikiran Soekarno sebelum Kemerdekaan dimana yang dikembangkan olehnya adalah Nasionalisme yang mencerminkan anti terhadap kolonialisme dan imperialisme dan

pemikiran Soekarno setelah kemerdekaan dimana Soekarno berpegang pada prinsip-prinsip dasar nasionalisme.

4. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, karangan Bernhard Dahm, Tahun 1987, buku ini berisi tentang pembentukan kabinet baru yang tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen pada tahun 1959. Soekarno kemudian mengangkat dewan pusat sebuah front nasional untuk mencakup golongan-golongan Nasional, Agama, dan Komunis yang diberi nama NASAKOM. Dengan menggunakan pergerakan-pergerakan politik yang sama seperti ia memulai perjuangannya untuk kemerdekaan, setelah kembali berkuasa melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan suatu tatanan sosial yang adil.
5. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia tahun 1945-1966*, karangan Yahya Muhaimin, tahun 1982. Buku ini membahas tentang Kelahiran militer Indonesia yang memberikan *Psychologi impact* kepada para perwira militer dan arena itu amat menentukan perkembangan militer di kemudian hari. Sebenarnya kalau melihat kelahiran organisasi ketentaraan Indonesia yang benar-benar bersifat militer, yaitu dengan mengambil tanggal 3 Juni 1947. Namun Hal ini tidak bisa dipakai sebab embrio dan tunasnya sudah berdiri sejak tahun 1945, yaitu sewaktu dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945 yang sampai sekarang dijadikan hari ulang tahun kelahiran Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada 2 alasan pokok penulis menulis batasanya sampai 1966, karena Pertama, pada tahun 1966 tepatnya bulan Juli 1966, golongan militer benar-benar memegang

kekuasaan politik, dan mendominasi kehidupan politik nasional. Kedua, pada masa ini pula Presiden Soekarno yang semula begitu tinggi dihormati baik karena dipandang sebagai “bapak nasional” maupun karena kharismanya, dan tadinya begitu besar kekuasaan politiknya sebagai seorang politisi kawakan betul-betul mulai tergeser dari kekuasaan politik yang diambilnya sejak tahun 1959.

6. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwi Fungsi ABRI*, karangan Ulf Sundhaussen, tahun 1986. Buku ini membahas tentang hubungan sipil dan militer (Angkatan Darat) yang semakin buruk sejak tahun 1945, ketika pertama kali terjadi perselisihan antara pimpinan sipil dan militer. Pimpinan Sipil setidak-tidaknya bertanggung jawab atas tindakan Angkatan Darat dalam memperluas peran politiknya. Pihak Angkatan Darat untuk memperluas posisi pengaruh politiknya sedemikian rupa sehingga dapat menguasai negara sepenuhnya. Peran Angkatan Darat adalah keinginan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan golongan militer dalam arti yang lebih luas terhadap campur tangan para pemimpin sipil.

7. *Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi kearah Reformasi Politik*, karangan Hendri Supriyatmono, tahun 1994. Buku ini membahas tentang perubahan-perubahan politik pada tahun 1950-an. Dimana terjadi transformasi sistem politik dari sistem parlementer ke sistem Demokrasi Terpimpin dengan menggunakan perspektif Biografi Politik pada tokoh Nasution dan pendekatan sejarah militer.

F. Kajian Teori

Dalam membahas permasalahan yang ada perlu diketahui mengenai beberapa konsep sebagai dasar landasan teori untuk penulisan. Penjelasan beberapa konsep tersebut dimaksudkan agar pemahaman terhadap skripsi ini lebih mudah dilakukan. Skripsi ini berjudul Peranan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Adapun konsep-konsep yang perlu dijelaskan adalah Peranan, ABRI (AD), sikap, demokrasi, terpimpin, demokrasi terpimpin, dan konsep Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin menurut para ahli.

1. Peranan

Peranan adalah kata yang berasal dari kata dasar peran yang artinya pemain sandiwara, tukang lawak, yang berakhiran-an, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi bagian yang memegang peranan utama.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan peranan adalah lebih mengacu pada peranan atau tugas yang harus dilakukan oleh militer atau tentara yang mempunyai peranan penting dalam suatu negara.

Konsep peranan tertuju pada peranan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin. Peranan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin yang akan memberikan sumbangan pada masa Demokrasi Terpimpin. Adapun peranan Angkatan Darat tersebut adalah menjaga pertahanan dan keamanan Negara dan Angkatan Darat mempunyai peranan dalam pemerintahan.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm 506.

2. ABRI (AD)

ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau golongan militer Indonesia yang secara struktural terdiri dari empat komponen, yakni di darat (TNI-AD), di laut (TNI-AL), di udara (TNI- AU) dan Kepolisian atau Polri. ABRI sebagai salah satu potensi masyarakat yang oleh pemerintah diberi wewenang dan tanggung jawab utama dibidang pertahanan dan keamanan. Lain halnya dengan TNI, TNI dapat diartikan sebagai salah satu potensi masyarakat yang selain diberikan kewenangan dan tanggung jawab utama di bidang pertahannan dan keamanan, dengan berlandaskan kewenangan dan tanggung jawab itu kepada tata nilai yakni nilai kejuangan, patriotisme, pengabdian, dan pengorbanan terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian istilah ABRI mengacu pada segi fisik dan struktural, sedangkan istilah TNI mengacu pada segi nilai-nilai kejuangan.¹⁸

Munculnya TNI-AD sebagai kekuatan politik bermula dari diangkatnya Kolonel Nasution sebagai kepala Staf Angkatan Darat. Pada pertengahan tahun 1956 terjadi pemberontakan-pemberontakan daerah. Untuk mengatasi pergolakan-pergolakan daerah tersebut merupakan tugas dari Angkatan Darat, pada akhirnya pergolakan tersebut dapat teratasi. Keberhasilan Angkatan Darat yaitu Nasution dan Soekarno mempunyai kepentingan yang sama dalam masalah stabilitas nasional, peranan partai politik dan pemberlakuan keadaan darurat perang. Karena mempunyai persamaan kepentingan maka tercipta kerja sama untuk membangun stabilitas nasional. Kerjasama yang terjadi

¹⁸ Hidayat Mukmin. *op.cit*, hlm 19

antara Angkatan Darat dan Soekarno hanya terbatas pada kepentingan politik timbal balik.

Angkatan Darat dan Kabinet membantu Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 dengan mempersiapkan situasi dimana UUD 1945 dapat diberlakukan kembali melalui Dekrit. Dengan dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali dan konstituante dibubarkan. Dengan dikeluarkannya dekrit maka berakhirilah periode Demokrasi Parlementer dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

Nasution telah berhasil menempatkan wakil-wakil Angkatan Darat dalam pemerintahan, legislatif dan semua badan negara dalam tatanan politik yang baru, dengan demikian Angkatan Darat telah menempatkan posisi yang kuat dalam panggung politik. Keberadaan Soekarno tetap menjadi tokoh yang paling menentukan, hal ini disebabkan karena Soekarno telah berhasil memperjuangkan dukungan Angkatan Darat bagi tujuannya sendiri. Soekarno selalu memperhatikan kekuatan-kekuatan lawan politiknya dan menempatkan dirinya sebagai pengambil inisiatif. Kewibawaan Angkatan Darat semakin naik setelah berhasil menumpas pemberontak di Jawa Barat tahun 1961 dan Sulawesi tahun 1962, maka Angkatan Darat bertekad untuk bertindak tegas terhadap Soekarno. Melihat keadaan seperti ini Soekarno berusaha untuk memotong kekuatan Angkatan Darat dengan mengangkat Mayor Jenderal Achmad Yani sebagai Panglima Angkatan Bersenjata yang fungsinya lebih terbatas pada koordinasi administratif dan pertahanan sipil. Dengan demikian

Soekarno merasa kekuatannya lebih aman terhadap ancaman kepemimpinan Nasution.¹⁹

Angkatan Darat berusaha untuk menciptakan situasi politik yang aman sehingga politik Demokrasi Terpimpin dapat berjalan lancar. Peranan Angkatan Darat sangat berpengaruh terutama untuk menciptakan keamanan dalam situasi politik. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah dapat dikenali oleh Angkatan Darat. Selain itu Angkatan Darat membantu presiden dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan, sehingga antara Soekarno dan Angkatan Darat mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung.

3. Sikap

Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, sikap diartikan sebagai pendirian yang mendasari suatu tindakan baik perorangan maupun sekelompok orang. Kebijakan diartikan sebagai keputusan atau tindakan dari suatu organisasi atau institusi. Istilah sikap dan kebijakan pada dasarnya merupakan pengertian yang sangat erat kaitannya. Sikap adalah pendirian atau pernyataan, sedangkan kebijakan adalah wujud konkret atau merupakan realisasi dari sikap. Kebijakan lebih berbentuk sebagai keputusan atau tindakan baik dari organisasi maupun institusi.²⁰

Menurut Muhibin Syah sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (*respons tendency*) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang dan

¹⁹ Nazaruddin Sjamsuddin. *op.cit.* hlm 193-194.

²⁰ J. S Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm 1319.

sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap sendiri biasanya memberikan penilaian (menerima/menolak) terhadap objek yang dihadapinya.²¹

Sikap menurut Bimo Walgito adalah organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar bagi orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.²² Sehingga sikap bersifat dinamis dan terbuka terhadap kemungkinan terjadinya perubahan.

Sikap menurut Saifuddin Anwar sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan.²³ Hal ini biasanya diekspresikan dengan cara mendukung/memihak ataupun perasaan tidak mendukung/ tidak memihak terhadap suatu objek. Seseorang tentu saja akan memiliki penilaian terhadap suatu objek yang telah menjadi pilihannya. Sikap menempatkan dalam pola pemikiran untuk menyukai sesuatu mendekati, ataupun menjauhi suatu objek.

Sikap menurut Winkel adalah kecenderungan untuk menerima/ menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai sesuatu yang berguna (sikap negatif).²⁴ Sikap positif biasanya cenderung untuk pada semacam mengadakan pendekatan terhadap objek itu seperti menerima, setuju merasa bergairah, dll. Sebaliknya sikap negatif biasanya cenderung pada semacam penghiburan terhadap suatu objek, seperti: menolak, tidak setuju, merasa enggan, dll. Sikap memberikan kemungkinan yang besar akan

²¹ Muhibin Syah. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*. PT Remaja. Bandung. hlm135.

²² Bimo Walgito. 1978. *Psikologi Sosial suatu Pengantar*. Andi Offset. Yogyakarta.. hlm 109.

²³ Saifuddin Azwar. 2005. *Sikap manusia dan Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. hlm 5.

²⁴ Winkel, W.S. 1983. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Gramedia. Jakarta. hlm 30.

kesuksesan atau kegagalan usaha seseorang karena sikap sendiri dapat berfungsi sebagai motivator dalam bertingkah laku.

Menurut Bruno seperti yang dikutip oleh Muhibin Syah, sikap (*attitude*) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik/ buruk terhadap orang atau barang tertentu.²⁵ Sikap dapat dianggap sebagai suatu kecenderungan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak terhadap suatu objek karena melihat kegunaan objek tersebut bagi dirinya.

Konsep sikap ini ditujukan kepada Soekarno, sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat. Soekarno membutuhkan Angkatan Darat dalam pembentukan Demokrasi Terpimpin. Pandangan Soekarno terhadap Angkatan Darat dan hubungan antara Soekarno terhadap Angkatan Darat. Soekarno menyeimbangkan 2 kekuatan yaitu PKI dan Angkatan Darat. Di samping itu juga Presiden Soekarno mengatur keseimbangan kekuatan politik antara tentara dan PKI, dan berusaha mengontrolnya agar salah satunya tidak lebih dominan dan Presiden tetap menjadi faktor penentu kebijakan.

4. **Demokrasi**

Menurut Abraham Lincoln demokrasi berasal dari Yunani. Terdiri dari dua suku kata yaitu “Demos” yang berarti rakyat dan “Kratos” yang berarti Pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

²⁵ Muhibin Syah. *op.cit.* hlm 120.

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.²⁶ Jadi demokrasi adalah dasar hidup suatu bangsa dan negara yang menunjukkan bahwa kebijakan umum atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

5. Terpimpin

Terpimpin adalah sistem demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk-petunjuk yang tertentu.²⁷

6. Demokrasi Terpimpin

a. Terbentuknya Demokrasi Terpimpin.

Sejak jaman Kabinet Ali II Presiden Soekarno melihat dan menilai bahwa sistem parlementer yang dipraktekkan dan diterapkan di Indonesia sebagai sesuatu yang tidak baik, maka Soekarno mengemukakan gagasannya untuk memperkenalkan sistem pemerintahan atau sistem politik baru,²⁸ yang kemudian dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian maka secara de facto kekuasaan beralih ke tangan Soekarno setelah ia menyampaikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan sekaligus mengakhiri Demokrasi Parlementer.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta. hlm 195.

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.* hlm 755

²⁸ G. Moedjanto. 1988. *Demokrasi Terpimpin*. Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah. seri XV no 1. Sanata Dharma Yogyakarta. hlm 2.

Demokrasi Terpimpin bukan sekedar demokrasi dengan stem-stem (pemungutan suara), melainkan suatu dengan kepribadian bangsa Indonesia.²⁹ Selain itu demokrasi terpimpin bukan konsep yang siap pakai atau yang mempunyai definisi yang jelas karena pada awalnya konsep tersebut hanya merupakan ide Presiden Soekarno yang luas dan kabur yang dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah yang semakin bertumpu yang dihadapi negara yang pemerintahannya sedang dirumuskan oleh konstituante, tetapi dengan berjalannya waktu konsep tersebut berubah menjadi konsep politik yang sama sekali berbeda yaitu dimaksudkan untuk meruntuhkan konsep pemerintahan Parlementer.³⁰

Langkah pertama yang digunakan untuk melaksanakan gagasan Demokrasi Terpimpin adalah Konsepsi Presiden yang dicetuskan pada tanggal 21 Februari 1957 yang berisikan pokok pikiran sebagai berikut:³¹

1. Pembentukan suatu Kabinet Gotong Royong dengan semua partai besar (PNI, Masyumi-NU-PKI) diwakili di dalamnya. Karena didukung oleh 4 partai besar maka disebut juga kabinet berkaki empat.
2. Pembentukan suatu Dewan Nasional yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional sebagai Badan

²⁹ *Ibid.* hlm 3.

³⁰ Adnan Buyung Nasution. 1955. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia. Studi Sosio-Legal Konstituante 1956-1959*, terj. Sylvia Tiwan. Pustaka Utama Grafik, Jakarta. hlm 301.

³¹ G. Moedjanto Demokrasi Terpimpin. Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah seri XV no 1.. *op.cit.* hlm 3

Penasehat. Dengan demikian maka Kabinet akan mencerminkan partai-partai dalam parlemen sedangkan Dewan Nasional akan mencerminkan atau mewakili masyarakat.

Pada kenyataannya hanya dua partai yang mendukung konsepsi tersebut yaitu PNI dan PKI sedangkan partai lain menolak konsepsi itu karena PKI diikutsertakan dalam Kabinet Gotong Royong. Partai yang menolak konsepsi itu antara lain: Masyumi, NU dan Partai-Partai Kristen. Walaupun ada beberapa partai yang menolak konsepsi tersebut Presiden tidak mau mundur dan tetap mengambil langkah berani.

Perkembangan Demokrasi Terpimpin dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama bulan Februari 1957- Juli 1958 yang mencakup perkembangan sejak muncul sampai berakhirnya pemberontakan daerah. Pada tahap ini ide Demokrasi Terpimpin masih kurang berkembang dalam pengertian konseptual karena Dewan Nasional baru dibentuk. Satu-satunya kejelasan ialah keinginan untuk meninggalkan sistem politik yang berlaku yang disebut "*Demokrasi Liberal*", terutama sistem kepartaian dan pemerintahan parlementer yang Soekarno kecam sebagai penyebab semua permasalahan yang harus dihadapi negara dan untuk menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin yang dapat menjamin stabilitas politik.

Tahap kedua yaitu bulan Juli 1958- November 1958. Pada tahap ini diusahakan perumusan ide dasar Demokrasi Terpimpin sehingga menyebabkan terjadinya antara pendukung dan penentang

Demokrasi Terpimpin semakin jelas. Maka Masalah yang utama ialah konseptual bagi Demokrasi Terpimpin dan kedudukan konstitusional bagi golongan fungsional yang merupakan model perwakilan rakyat di bawah pengawasan-pemerintah yang baru dibentuk ditengah-tengah partai-partai politik.

Tahap ketiga yaitu bulan November 1958- Juli 1959. Pada tahun ini Demokrasi Terpimpin memasuki tahap pelaksanaan dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan seluruh sistem politik serta Angkatan Darat mulai memainkan peranannya yang menentukan.³²

Jatuhnya Kabinet Ali II membuat Presiden Soekarno belum mau dan belum bisa melaksanakan konsepnya dengan paksaan (kekerasan) atau mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan gagasan Demokrasi Terpimpinnya. Terbukti dengan pengangkatan Suwiryo sebagai ketua umum PNI yang merupakan formatur kabinet dengan masa kerja yang cukup lama. Suwiryo tidak berhasil membentuk kabinet sehingga Soekarno membentuk Kabinet Darurat Extra- Parlementer (*Emergency Extra-Parlementary Business Cabinet*), dan berhasil membentuk Kabinet Baru yang diberi nama Kabinet Karya dengan Djuanda sebagai Perdana Menteri. Soekarno mulai mengambil tindakan-tindakan yang inkonstitusional setelah pembentukan Kabinet Karya. Salah satu tindakan inkonstitusional yang diambil oleh Presiden

³² Adnan Buyung Nasution. *op.cit.* hlm 302.

Soekarno adalah penyusunan program Kabinet Karya yang disesuaikan dengan keinginannya antara lain berupa pembentukan Dewan Nasional yang ternyata menjadi lembaga tinggi negara di samping lembaga-lembaga tinggi lainnya yang sudah ada. Dewan Nasional tidak diatur atau disebut dalam Undang-Undang Sementara 1950 (UUDS).³³

Pembentukan Kabinet Karya telah merintis jalan kearah terselenggaranya Demokrasi Terpimpin. Konsep Demokrasi Terpimpin pada awalnya dibentuk atas dasar sikap anti partai mempercepat proses kemerosotan lembaga-lembaga kepartaian sehingga Soekarno bersama dengan Angkatan Darat bekerjasama untuk memperlemah peranan partai-partai politik dalam pemerintahan sampai dengan tahun 1960. Soekarno berharap agar pada awal tahun 1960 dapat menghasilkan terbentuknya sebuah partai negara atau dengan kata lain sebuah front yang kuat dengan meleburkan partai-partai politik menjadi satu. Soekarno memutuskan untuk membentuk Front Nasional yang lemah dengan membiarkan partai-partai itu secara organisatoris tetap utuh dan keyakinan itu tercermin dalam komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR).

Berlakunya Demokrasi Terpimpin menimbulkan terjadinya suatu perubahan dalam system politik Indonesia. Dalam kacamata dunia Barat, Indonesia telah jatuh ke sistem kekuasaan otoriter sebab semua kekuasaan berada dalam satu tangan yaitu Soekarno. Meskipun

³³ G. Moejanto. *Demokrasi Terpimpin. Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah seri XV no 1. op.cit.* hlm 3-4.

terdapat lembaga-lembaga seperti DPR, MPRS, tetapi dengan dibentuknya Dewan Nasional praktis kekuasaan berada di tangan Soekarno. Sejak saat itu semua lembaga politik seperti DPR, MPRS, Dewan Nasional dan Dewan Pertimbangan Agung bekerja di bawah komando Soekarno.

Dengan terbentuknya Demokrasi Terpimpin maka lengkaplah sudah keinginan Soekarno untuk menggenggam urusan politik sepenuhnya dengan tujuan menyelamatkan revolusi dan bangsa. Soekarno membawa bangsa Indonesia ke sistem pemerintahan tradisional yang diberi bentuk modern. Semua kekuatan berada di tangan Soekarno dan ia menjadi pusat kekuasaan. Sistem ini merupakan suatu sistem yang tidak terjadi menurut dunia Barat.³⁴

b. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Dalam rangka pelaksanaan Konsepsi Presiden, pada tanggal 6 Mei 1957 dibentuk Dewan Nasional yang berfungsi sebagai badan penasehat bagi Kabinet beranggotakan 45 orang yang mewakili berbagai golongan fungsional seperti tani, buruh, wanita, pemuda serta juga dari masing-masing Angkatan termasuk Kepolisian. Langkah selanjutnya setelah Dewan Nasional terbentuk, maka Presiden menetapkan sistem baru pengganti system demokrasi parlementer berdasarkan UUDS 1950 menjadi Demokrasi Terpimpin yang menurut penjelasan beliau adalah merupakan “*demokrasi gotong royong*” yang

³⁴ Nazaruddin Sjamsuddin (ed). *op.cit.* hlm 80-82

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dengan demikian maka pelaksanaan demokrasi terpimpin ini harus diikuti dengan kembali pada UUD 1945.

Dalam Dewan konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 tidak pula berhasil menyusun undang-undang dasar baru sebagai pengganti UUDS 1950, disebabkan adanya perbedaan pendapat secara prinsipil mengenai dasar negara terutama untuk pencantuman tujuh butir kata dari Piagam Jakarta yaitu “ dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya”. Karena itu Presiden pada tanggal 22 April 1959 menyampaikan amanat kepada Dewan Konstituante yang berisikan anjuran agar kembali ke UUD 1945. Namun dalam beberapa kali sidangnya, Dewan tidak berhasil mengambil keputusan dikarenakan partai-partai yang duduk didalamnya mengelompokkan dirinya dalam dua golongan yaitu masing-masing “ Kelompok Islam dan Kelompok Nasionalis/ Sosialis/ non Komunis”. Akibatnya adalah bahwa Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam suasana kembali ke UUD 1945 itu, Presiden Soekarno mempertegas lagi konsepnya ketika menyampaikan pidato 17 Agustus 1959 yang diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato itu kemudian oleh Presiden diserahkan kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung di bawah pimpinan D.N. Aidit untuk

merumuskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang kemudian setelah GBHN tersusun diberi judul “ Manifesto Politik Republik “ disingkat MANIPOL.

Presiden Soekarno menyampaikan Dekrit Presiden kepada seluruh rakyat pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden maka UUD 1945 berlaku kembali dan Demokrasi Terpimpin mulai diterapkan. Pada pidato peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” Soekarno menjelaskan kembali butir-butir pengertian Demokrasi Terpimpin sebagai berikut: a). Tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum masyarakat dan Negara. b). Tiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat bangsa dan Negara.³⁵ kemudian lebih dikenal dengan Manipol Usdek, berisikan tiga kerangka revolusi dan lima persoalan pokok revolusi Indonesia yang dijadikan sebagai acuan bagi garis besar politik. Melengkapi manipol usdek, selanjutnya presiden Soekarno mengajukan pula konsepsi RIL (Revolusi, Ideologi dan Leadership) yang diterjemahkan sebagai revolusi-sosialisme-pimpinan (Resopin).³⁶ Pengaruh sosialisasi politik melalui Soekarnoisme ini mempunyai pengaruh kuat terhadap pembuatan kebijaksanaan politik luar negeri. Hal ini menjadi wadah menyalur kepentingan ideologi yang diperjuangkan melalui revolusi dibawah satu pimpinan nasional yaitu Soekarno.

³⁵ Moh. Mahfud. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. Hlm 57.

³⁶ Nazaruddin Sjamsuddin (ed). *op.cit.* hlm 118.

Dalam Pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung pada bulan Februari 1960, Presiden menyatakan bahwa intisari Manipol ada lima yakni: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia disingkat USDEK.

Sesuai dengan program umum Manipol, Presiden melakukan berbagai langkah perombakan diantaranya yang penting adalah:

1. Membentuk Badan-Badan baru seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan Front Nasional.
2. Mengadakan retuling terhadap Aparatur di semua Lembaga pemerintahan termasuk alat kekuasaan negara Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian dengan maksud menampung semua kelompok secara gotong royong yakni kelompok-kelompok Nasionalis, agama dan Komunis (NASAKOM).
3. Melakukan penyederhanaan partai sampai jumlah sepuluh, namun karena dirasa masih terlalu banyak maka perannya cukup diwakili oleh tiga orang seja guna melambangkan konsepsi NASAKOM.³⁷

Yang dimaksud dengan NASAKOM adalah lembaga-lembaga pemersatu atas pencerminan golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia. Nasakom merupakan jiwa dari kepribadian masyarakat yang berisi tiga kekuatan yang meliputi: Nas adalah golongan nasionalis, A

³⁷ Tuk Setyohadi. 2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta. hlm 108.

adalah golongan agama dan Kom adalah golongan komunis.³⁸ Doktrin Nasakom tersebut yang mengandung nasionalis, agama dan komunis akan bersama-sama berperan dalam pemerintahan nasional Soekarno sehingga akan menghasilkan suatu system politik yang kuat dan menciptakan kepribadian nasional.

Tanggapan partai-partai terhadap konsepsi Demokrasi Terpimpin dapat digolongkan pada dua sikap, yang menerima dan yang menolak. Adapun yang menerima adalah PNI dan PKI, serta yang menolak adalah Masyumi, PSI, Katolik dan sebagian NU. Sedangkan di pihak TNI sikapnya adalah menerima dalam arti bahwa Demokrasi Terpimpin tetap berlandaskan pada UUD 1945 dimana arti Demokrasi Terpimpin adalah sesuai dengan sila ke-empat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan” seperti yang pernah diamanatkan oleh Presiden Soekarno sendiri.

Dengan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang ditopang dengan GBHN-Manipol serta dengan keberhasilan PKI masuk dalam kabinet pemerintahan, maka PKI merasa kedudukannya semakin kuat sehingga mengubah taktiknya dengan mengesampingkan peran DPR dan mendasarkan perjuangan politiknya pada perimbangan kekuatan di masyarakat. Dengan demikian maka terjadilah “*balance of power*” antara dua kekuatan politik utama yang ada pada saat itu yakni

³⁸ Adams, Cindy. 1966. *Bung Karno penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta. hlm 443.

TNI dan PKI. Unjuk rasa politik antara dua kekuatan ini dimanifestasikan dalam bentuk organisasi tandingan yang didukung oleh masing-masing pihak yaitu dalam perburuan yaitu: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau yang disingkat SOBSI (PKI) dan Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia atau yang disingkat SOKSI (TNI), dalam masyarakat kecil dan petani di pedesaan ada Barisan Tani Indonesia atau yang disingkat BTI (PKI) dan ada Masyarakat Keluarga Gotong Royong atau yang disingkat MKGR (TNI) dalam bidang media masa ada surat kabar Harian Rakyat dan Bintang Timur (PKI) serta ada juga surat kabar Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata (TNI), sedangkan dalam bidang budaya ada Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang disingkat LEKRA (PKI) dan Manifes Kebudayaan atau yang disingkat MANIKEBU (TNI).³⁹

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan parlementer di antara partai-partai, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan, peran utama tersebut dimainkan oleh Presiden Soekarno. Ia memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan

³⁹ Tuk Setyohadi. *op.cit.* hlm 111.

kuat pihak Angkatan Darat, yang juga memberikan dukungan organisasional utama bagi pemerintahan itu.⁴⁰

7. Konsep Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin menurut:

a. Harold Chouch.

Angkatan Darat Indonesia berbeda dengan kebanyakan Angkatan Darat pada umumnya yang telah merebut kekuasaan politik, karena tidak pernah sebelumnya menganggap dirinya sebagai suatu Organisasi yang tidak berpolitik. Dari awal sejarahnya dalam tahun 1945 sebagai tentara gerilya yang memerangi kembalinya kekuasaan penjajah Belanda sampai konsolidasi kekuasaan politiknya di bawah Orde baru, para perwira Angkatan Darat Indonesia senantiasa melibatkan dirinya ke dalam masalah-masalah politik dan hambatan sepanjang masa itu dengan giat memainkan peranan politik yang penting. Sesudah berlakunya Undang-Undang keadaan perang tahun 1957, hak peran serta mereka itu diberi pengakuan resmi melalui pengangkatan-pengangkatan dalam kabinet, parlemen dan Administrasi semasa zaman Demokrasi Terpimpin. Angkatan Darat menjadi salah satu dari dua kekuatan politik yang terorganisasi, dan bersama dengan Presiden Soekarno menguasai pembersihan Angkatan Darat sebagai kekuatan dominan satu-satunya dalam perpolitikan di Indonesia.

Pertumbuhan non militer Angkatan Darat tersebut disertai dengan pembenaran secara ideologis atas kegiatan-kegiatan baru yang

⁴⁰ Harold Chouch. *op.cit.* hlm 44.

diberlakukannya. Berlakunya Undang-Undang pada tahun 1957, Jenderal Nasution merumuskan konsep “Jalan Tengah”. Dalam konsep tersebut para perwira Angkatan Darat aktif berperan serta dalam urusan pemerintahan namun tidak berusaha merebut posisi dominan semasa periode Demokrasi Terpimpin Angkatan Darat mempunyai peranan dalam bidang politik sehari-hari dan bidang non militer lainnya menjadi berakar makin dalam.

Angkatan Darat di Indonesia merupakan suatu kekuatan militer dan kekuatan sosial sekaligus, kegiatan Angkatan Darat tersebut meliputi bidang ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Angkatan Darat tidak hanya mempunyai tugas kemiliteran saja, tetapi terjalin dengan segala bidang kehidupan masyarakat. Selama periode Orde Baru doktrin ini menjadi terkenal sebagai Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata dan kemudian dalam ungkapan sansekerta disebut sebagai Dwi Dharma dan yang menunjuk kepada peranan militer dan sosial politik yang dimainkan oleh Angkatan Bersenjata. Dominasi Angkatan Darat lebih lanjut atas negara tahun 1970-an diberi kesempatan pembenaran-pembenaran dengan alasan bahwa kaum sipil masih memerlukan kepemimpinan kuat yang hanya bisa dijamin oleh Angkatan Darat. Masuknya para perwira Angkatan Darat ke dalam kancah kegiatan sipil yang luas selama masa Demokrasi Terpimpin, bagaimanapun juga, membawa suatu bentuk politisasi baru. Banyak perwira yang mendapatkan loyalitas dan ikatan-ikatan ekstramiliter

sehingga menghalangi pimpinan Angkatan Darat itu untuk potensi politik mereka sepenuhnya.⁴¹

b. Ulf Sundhaussen

Para perwira Indonesia menganggap dirinya sebagai agen-agen modernisasi yang bisa bekerja lebih baik daripada orang sipil dalam menyelenggarakan urusan negara. Tahun 1957/1958 dapat dianggap sebagai titik dimana tentara mulai menaruh perhatian yang lebih besar dalam bidang ekonomi dan secara berangsur-angsur menonjolkan pandangan bahwa golongan militer dapat menawarkan kemahiran manajemen yang masih langka dalam masyarakat pada umumnya. Angkatan Darat mulai memasuki sektor ekonomi, kadang-kadang dengan jalan menyediakan tenaga manajemen bagi perusahaan milik negara atau perusahaan asing yang sudah dinasionalisasi. Para Perwira Angkatan Darat ini dalam dewan manajemen berlaku sebagai orang yang menangani keamanan dan hubungan dengan buruh.

Ketika keadaan ekonomi makin buruk dan Soekarno makin tak ambil pusing mengenai masalah ekonomi dan kesejahteraan, maka pihak AD makin cemas mengenai keadaan ekonomi yang sudah hampir ambruk. Perbedaan pendapat antara Nasution dan Soekarno mengenai urutan prioritas kebijaksanaan, dimana Nasution lebih mengutamakan soal ekonomi dan kesejahteraan daripada pembebasan Irian Barat. Nasution bersikeras terus dengan jalan mendukung kebijakan Djuanda

⁴¹ Harold Crouch. *op. cit.* hlm 389-392.

dalam 1963. Suatu kebijakan yang bertujuan merencanakan dan melaksanakan tindakan pemulihan ekonomi.

Keprihatinan Nasution dan Angkatan Darat pada umumnya mengenai keadaan ekonomi sama sekali tidak mengherankan. Bagi Nasution dan para perwira yang lebih idealis, pemulihan ekonomi itu juga merupakan suatu persoalan ideologis dan konstitusional menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu ketentuan dari Pancasila, karena Pancasila dianggap sebagai bagian dari UUD 1945. Maka sikap yang mengabaikan ekonomi dan yang saja tercela dari segi moral tetapi juga tidak konstitusional.⁴²

c. Herbert Feith

Pemerintah dan politik Indonesia dewasa ini adalah pemerintah dan politik Demokrasi Terpimpin. Ia adalah tatanan politik yang diantarkan di antara tahun-tahun awal kemerdekaan. Di Era Demokrasi Terpimpin telah diandalkan sebagai suatu sistem politik yang dipengaruhi secara kritis terutama seklali oleh suatu hubungan “konflik yang mantap” yang ditandai oleh upaya bersama dan berlangsungnya terus kompetisi dan ketergantungan antara dua mitra yang bertanding dengan lebih kurang setaraf. Karena itu Herbert Feith memulai pembahasan ini dengan mengikhtisarkan dasar kerja sama dan perselisihan Soekarno-Angkatan Darat dan meneliti beberapa segi penting kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia yang

⁴² Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm 450-473.

memperlihatkan sedemikian penting interaksinya pemerintahan sipil, Partai Komunis dan partai-partai pro-Barat, orang-orang Cina Indonesia, dan sebagai contoh yang lain lagi, urusan luar negeri. Dalam bagian berikutnya saya akan kembali meninjau struktur konstitusi dan ideologi Demokrasi Terpimpin dan sebuah pembahasan tentang bagaimana sistem itu mempengaruhi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Peranan Militer pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu sejak lahirnya tentara Indonesia telah menempati dirinya baik sebagai kekuatan militer maupun kekuatan politik dalam sebagian besar dari sejarahnya memang tentara telah memainkan peran politik yang penting.⁴³

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman bagi penelitian. Itu berarti sebelum penelitian dilakukan sudah dirumuskan hipotesis dari masalah yang akan diteliti. Hipotesis itulah yang akan dibuktikan dalam penelitian. Dengan adanya hipotesis, maka langkah pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan lebih terarah. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Kalau Angkatan Darat mengalami kekecewaan pada masa Demokrasi Parlementer yang menimbulkan terjadinya pergantian kabinet dalam waktu yang singkat dan terjadi pergolakan-pergolakan di daerah maka Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.

⁴³ Herbert Feith. *op.cit.* hlm 135-150

2. Kalau Soekarno membutuhkan PKI sebagai penyeimbang Angkatan Darat, maka sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat yaitu Soekarno menganggap Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang mendominasi dalam pembentukan Demokrasi Terpimpin.
3. Kalau Angkatan Darat berhasil menerapkan Dwi Fungsi ABRI dalam mengatasi stabilitas politik maka Angkatan Darat memberikan sumbangan pada masa Demokrasi Terpimpin.

H. Metode dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Dalam Skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah yang berpegang pada sumber-sumber yang ada untuk dapat menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu secara imajinatif, dari fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi.⁴⁴

Setiap bidang ilmu memiliki cara kerja (metode) tersendiri untuk menggali dan menentukan suatu kebenaran yang lebih obyektif. Metode yang digunakan dalam ilmu sejarah disebut sebagai metode sejarah. Metode sejarah adalah proses dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh disebut historiografi atau penulisan sejarah.

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan data historis yaitu melalui dokumen-dokumen yang berupa literatur yang ada di perpustakaan yang berbentuk buku. Metode penulisan

⁴⁴ Lois. Gottschlk. *op. cit.* hlm 32.

yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penulisan sejarah yang menguraikan kejadian atau fakta dari peristiwa masa lalu berdasarkan hubungan sebab akibat. Sesuai dengan metode yang penulis gunakan maka penulis banyak menggunakan buku-buku sumber untuk mengumpulkan data-data untuk diinterpretasikan yang nantinya menghasilkan suatu generalisasi dan jawaban-jawaban atas beberapa permasalahan yang dikemukakan. Adapun sumber-sumber tertulis tersebut di dapat pada perpustakaan Sanata Dharma, perpustakaan UNY dan lain-lain. Metode sejarah mengenal cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 4 tahap dalam penulisan skripsi yaitu heuristik (Pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (Analisis data), dan historiografi (penulisan sejarah). Kelima tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Setelah menentukan pokok permasalahan, langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik adalah proses pengumpulan sumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik itu berupa sumber primer maupun sumber sekunder.⁴⁵ Sumber data ini diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan Sanata Dharma, UNY, UGM, dll. Contoh dari sumber primer adalah Dekrit Presiden 1945 dan Pidato Presiden yang bertemakan Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dekrit Presiden penulis ambil dari

⁴⁵ Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya. Yogyakarta. hlm 99-100

buku 30 tahun Indonesia Merdeka, sedangkan pidato Presiden di ambil dari Buku Proklamasi sampai Resipon. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya adalah Militer dan Politik di Indonesia, Soekarno militer dalam Demokrasi Terpimpin, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia tahun 1945-1966, Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwi Fungsi ABRI, dan Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi kearah Reformasi Politik.

b. Verifikasi (Kritik Sumber)

Dalam tulisan ini, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah kritik sumber, kritik sumber adalah pengujian dari sumber-sumber sejarah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (bisa dipercaya) sumber tersebut.⁴⁶ Ada 2 kritik sumber yang digunakan dalam penelitian ini yakni kritik intern dan kritik ektern. Kritik intern digunakan untuk meneliti kebenaran dari isi dokumen yang ada, sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan. Kritik Intern ini tidak perlu dilakukan dalam penulisan skripsi ini, karena data dan fakta yang ditemukan sama antara sumber yang satu dengan sumber yang lain sehingga kebenarannya sudah teruji. Contoh dari kritik intern berupa Dekrit Presiden 1959 dan Pidato Presiden yang bertemakan Penemuan

⁴⁶ Kuntowijoyo. *op.cit.* hlm 100.

Kembali Revolusi Kita. Sedangkan kritik ekstern adalah kritik untuk mengetahui apakah sumber yang digunakan masih layak pakai atau tidak yang artinya bahwa apakah sumber tersebut benar-benar asli. Tetapi dalam penulisan skripsi ini sumber yang digunakan berasal dari buku-buku pokok sebagai sumber sekunder yang menurut penulis sudah cukup mendukung di dalam penulisan skripsi ini. Salah satu contoh buku pokok adalah *Militer dan Politik di Indonesia*, karangan Harold Crouch, tahun 1999, buku ini membahas tentang peranan militer politik tentara Inonesia selama tiga periode. Adanya keterlibatan tentara dalam politik dan kedudukan mereka di masa Demokrasi Terpimpin, termasuk kegiatan-kegiatan para perwira tentara dalam peristiwa-peristiwa di sekitar terjadinya kudeta yang gagal tanggal 1 Oktober 1965.

c. Interpretasi (Analisis data)

Interpretasi adalah langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan menganalisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam penulisan suatu sejarah, selalu ada yang dipengaruhi jiwa jaman, kebudayaan pendidikan, lingkungan sosial dan yang melingkupi penulisannya. Dengan kata lain interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa.

Contoh dari interpretasi (analisis data) ini adalah pada bab IV tentang sumbangan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin. Dalam mengkaji masalah ini penulis harus melakukan beberapa analisis

dari sumber-sumber yang digunakan penulis. Hal ini karena sumber-sumber tersebut sedikit sekali yang menjelaskan tentang sumbangan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin. Adapun sumber yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku tentang militer, diantaranya adalah buku *Militer dan Politik di Indonesia*, karangan Harold Crouch dan *Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwi Fungsi ABRI*, karangan Ulf Sundhaussen. Sehingga dari sana penulis melakukan analisis data yaitu dengan mencoba mencari keterkaitan antara masalah yang ada, teori-teori/pendekatan yang digunakan penulis dan tentu saja penjelasan dalam sumber-sumber tersebut.

d. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, sebab dalam tahap ini sudah menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lampau yang mengandung aspek kronologis, sehingga memberi kemudahan dan penjelasan kepada penulis dan pembaca mengenai urutan waktunya.⁴⁷

Penelitian mengenai Peranan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 telah melalui tahap-tahap metode penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis data) dan historiografi. Penulisan skripsi ini mencakup hal-hal penting yang diperhatikan oleh penulis seperti topik,

⁴⁷ Sartono Kartodirjo. 1989. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia suatu Alternatif*. Gramedia. Jakarta. Hlm 70.

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

2. Pendekatan

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan pendekatan Multidimensional untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan Multidimensional adalah suatu pendekatan yang dalam memaparkan dan menganalisa berbagai peristiwa menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial yang relevan dengan pokok-pokok kajiannya. Pendekatan multidimensional dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan historis, politik, psikologi dan ekonomi.⁴⁸

Pendekatan historis digunakan untuk memaparkan peranan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. Peranan Angkatan Darat pada masa menjelang orde baru.

Pendekatan politik digunakan untuk melihat latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, karena kekecewaan pada masa Demokrasi Parlementer dimana pada saat itu terjadi pergantian kabinet dalam waktu yang singkat dan terjadi juga pergolakan-pergolakan di daerah. Angkatan Darat bertujuan menjaga stabilitas dan dinamisator kehidupan politik Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Angkatan Darat mengusulkan gagasan Demokrasi Terpimpin, karena Demokrasi Terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang kuat

⁴⁸ Sartono Kartodirjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm 72.

dan berwibawa pada akhirnya akan sanggup mengakhiri krisis politik serta memulihkan ketertiban negara.⁴⁹

Pendekatan psikologi digunakan untuk mengetahui sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin. Pandangan Soekarno terhadap Angkatan Darat dan hubungan antara Soekarno terhadap Angkatan Darat. Soekarno menyeimbangkan 2 kekuatan yaitu PKI dan Angkatan Darat. Di samping itu juga Presiden Soekarno mengatur keseimbangan kekuatan politik antara tentara dan PKI, dan berusaha mengontrolnya agar salah satunya tidak lebih dominan dan Presiden tetap menjadi faktor penentu kebijakan.⁵⁰

Pendekatan Ekonomi digunakan untuk mengetahui keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Para pemimpin Angkatan Darat berpendapat bahwa pemerintah militer akan menjamin terpeliharanya kestabilan politik yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Mereka berharap stabilitas akan mendorong investasi baik dari luar maupun dari dalam negeri yang makin besar di sektor-sektor perekonomian yang modern, seperti dalam industri-industri ekstraktif, pabrik-pabrik besar dan perdagangan. Konsep Angkatan Darat mengenai pembangunan ekonomi terutama diarahkan kepada kepentingan-kepentingan kaum elit dan pegawai-pegawai kantor kelas menengah. Pemimpin- pemimpin Angkatan Darat mengetahui bahwa adalah penting meluaskan kesempatan mencari uang oleh tentara. Angkatan Darat

⁴⁹ G. Moedjanto. 1989. *Indonesia abad ke-20. jilid II. op.cit.* hlm 114.

⁵⁰ Abdoel Fattah. 2005. *Demiliterisasi Tentara. Pasang Surut Politik Militer. 1945-2004.* Yogyakarta. PT LKIS Aksara. hlm 111.

berusaha untuk mencari dana untuk menambah apa yang tersedia dari anggaran belanja Negara, sedangkan banyak banyak perwira diperbolehkan bekerja untuk tujuan ekonomi masing-masing guna menambah pendapatan dari gaji.⁵¹

I. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peranan Angkatan Darat Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965” mempunyai sistematika sebagai berikut:

Bab I. Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metode dan pendekatan, serta sistematika penulisan.

Bab II Bab ini menyajikan uraian tentang Latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, dengan sub permasalahan:

A. Kekecewaan pada masa Demokrasi Parlementer.

- 1) Terjadinya pergolakan di daerah.
- 2) Adanya pergantian kabinet dalam rentang waktu yang singkat

B. Kepentingan Angkatan Darat

- 1) Angkatan Darat menjaga pertahanan dan keamanan.
- 2) Angkatan Darat mempunyai peranan darala pemerintahan.

C. Munculnya Demokrasi Terpimpin

⁵¹ Panglakim, J. *Perusahaan Negara dan sawasta*. LKIS. Jakarta. 1983. hlm 309.

Bab III Bab ini menyajikan uraian tentang sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat, dengan sub permasalahan:

A. Pandangan Soekarno tentang Angkatan Darat.

➤ PKI sebagai penyeimbang Angkatan Darat

B. Hubungan antara Soekarno dengan Angkatan Darat: Dari Kerjasama ke Permusuhan

Bab IV Dalam bab ini diuraikan mengenai sumbangan yang diberikan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin, dengan sub permasalahan:

A. Bidang Politik.

1) Dwifungsi ABRI

a) Konsep Jalan Tengah.

b) Aplikasi Dwifungsi ABRI

2) Stabilitas Politik

a) Menjaga pertahanan dan keamanan.

b) Mengamankan pergolakan di daerah.

c) Masalah Irian Barat.

B. Bidang Ekonomi

➤ Adanya Nasionalisasi perusahaan- perusahaan asing.

Bab V Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, dan IV.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian diatas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat, yaitu bagaimana hubungan Soekarno dan Angkatan Darat, dan sumbangan yang diberikan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin.



BAB II

LATAR BELAKANG ANGKATAN DARAT MENDUKUNG

DIBERLAKUKANNYA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Kekecewaan pada masa Demokrasi Parlementer

1. Terjadi pergolakan di daerah

Kabinet Ali Sastroamidjojo II harus menghadapi kesukaran adanya perasaan tidak senang yang timbul di daerah-daerah. Persoalannya ialah bahwa beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterimanya dari Pusat. Gerakan-gerakan daerah mendapat dukungan dari beberapa panglima dan terbentuklah dewan-dewan daerah yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen Infanteri 4 pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolon Panglima Tentara dan Territorium I (TT I) di Medan pada tanggal 22 Desember 1956, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni dibentuk oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual di Menado pada tanggal 18 Februari 1957.⁵²

Pada awal tahun 1957, keadaan politik Indonesia semakin runyam, dimana muncul ketidakpuasan daerah terhadap pusat yang kemudian menjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah.⁵³ Periode antara 1956-1957, yang ditandai oleh percobaan-percobaan kudeta di Jawa Barat, pembangkangan

⁵² Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta. PN Balai Pustaka. Hlm 272.

⁵³ Nazaruddin Sjamsuddin (ed). *op. cit.* hlm 188.

terang-terangan terhadap pemerintah pusat di daerah-daerah luar Jawa, serta perselisihan di kalangan Angkatan Darat yaitu masalah kepemimpinan dalam tubuh TNI.⁵⁴

Untuk membantu mengatasi persoalan Angkatan Darat telah dibentuk panitia yang terdiri dari 7 orang yang disebut Panitia Tujuh. Panitia ini terdiri dari Panglima Tertinggi Presiden Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Perdana Menteri Djuanda, wakil Perdana Menteri dr. Leimena, Menteri Kesehatan Kolonel dr. Azis Saleh, Sultan Hamengkubuwono IX dan KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution. Tugas panitia ini ialah merumuskan putusan-putusan untuk menyelesaikan masalah Angkatan Darat. Setelah diselenggarakan sidangnya yang pertama, maka telah diambil beberapa keputusan:⁵⁵

1. Menetapkan pedoman kerja.
2. Membentuk suatu panitia pengumpulan bahan-bahan (fact finding committee), yang terdiri dari Kolonel A. J. Mokoginta, Kolonel Sudirman.
3. Mengintruksikan kepada semua anggota Angkatan Darat untuk menghadiri tindakan-tindakan yang dapat menyulitkan penyelesaian peristiwa-peristiwa Angkatan Darat.
4. Mengintruksikan kepada semua anggota Angkatan Darat dan masyarakat supaya berikhtiar kearah kelancaran pekerjaan Panitia.

Tetapi belum sampai Panitia Tujuh ini mengumumkan hasil pekerjaannya, telah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden

⁵⁴ Ulf Sundhaussen. *op. cit.* hlm 210.

⁵⁵ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *op.cit.* hlm 281.

Soekarno pada tanggal 30 November 1957 yang dikenal sebagai peristiwa Cikini. Karena peristiwa Cikini, keadaan Indonesia semakin memburuk. Daerah-daerah yang bergejolak tidak menjadi tenang, tetapi semakin nyata usahanya untuk melepaskan diri dari Pusat. Salah satunya adalah pemberontakan PRRI dan Permesta. Ketika itu situasi dalam negeri goncang, daerah-daerah bergelok yang dimulai pada tahun 1956 dengan berdirinya Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni, Dewan Lambung Mangkurat, kemudian meningkat menjadi “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dan Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) dan akhirnya menjadi Republik Persatuan Indonesia (RPI). Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Sukarno berpidato lagi di muka sidang Konstituante dan atas nama pemerintah menganjurkan agar dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia yang tetap.⁵⁶

Selain di Sumatera, maka di Indonesia bagian Timur terjadi pula pergolakan. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Makasar Panglima TT VII Letkol. Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan tersebut wilayahnya meliputi: Sulawesi, Kepulauan Nusatenggara dan Maluku. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia bagian Timur. Guna memperlancar pelaksanaan programnya, maka Letkol Sumual menyatakan daerah Indonesia bagian timur

⁵⁶ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *op.cit.* hlm 282.

dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh kaum militer.

Masalah daerah yang timbul di Sumatera dan Sulawesi menyebabkan hubungan Pusat dan Daerah terganggu. Masalah daerah juga membawa pengaruh di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk meredakan pergolakan daerah-daerah, dari tanggal 10 sampai 14 September 1957 telah dilangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional baik pusat maupun daerah.⁵⁷ Pada tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuannya adalah untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah-daerah. Musyawarah ini diikuti oleh para ahli ekonomi, wakil-wakil partai dan organisasi, tokoh-tokoh pusat dan para pejabat militer.

Timbulnya pemberontakan-pemberontakan di daerah menyebabkan tentara sebagai alat stabilitas politik di dalam negeri. Tugas-tugas menangani pemberontakan itu juga membawa tentara pada hal-hal di luar bidang pertahanan. Penetapan keadaan darurat perang juga membuat tentara masuk lebih dalam lagi pada perkara-perkara politik, ekonomi, dan administrasi umum pengelolaan Negara. Hal ini membawa persepsi tentara bahwa mereka sanggup dan mampu melaksanakan tugas di luar bidang pertahanan, di samping melaksanakan tugas pertahanan negara.⁵⁸

⁵⁷ Sekretariat Negara RI. 1978. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta. hlm 349.

⁵⁸ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 138-139.

2. Adanya pergantian kabinet dalam waktu yang singkat

Pada periode 1950-1952 telah terjadi pergantian Kabinet, diantaranya adalah Kabinet Natsir (September 1950- Maret 1951), dimana di dalam kabinet ini terjadi hubungan yang harmonis antara sipil dan militer. Akan tetapi hubungan yang harmonis tersebut hanya terjadi sebentar. Hal ini dipengaruhi sejak Kabinet Sukiman berkuasa (Maret 1951-Februari 1952). Terjadi konflik antara politisi (sipil) dengan militer, hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa 17 Oktober tahun 1952.⁵⁹

Setelah kabinet Ali Sastroamidjojo dilantik pada Juli 1953, Menteri Pertahanan dijabat oleh Iwa Kusumasumantri. Iwa segera mengangkat orang-orang yang setia kepadanya yang anti-Nasotion, seperti Abimanyu dan Sapari. Tetapi pengangkatan tersebut tidak dikoordinasikan dengan KSAD, termasuk pengangkatan Kolonel Zulkifli Lubis sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Hal ini dianggap sudah mencampuri urusan internal Angkatan Darat. Yang sangat ditentang oleh tentara adalah persetujuan Iwa untuk mempersenjatai kelompok non militer atas tuntutan organisasi veteran komunis, dengan alasan untuk menumpas pemberontakan Darurat Islam di Jawa Barat.

Selain itu, Kabinet Ali juga ditentang oleh beberapa tentara di daerah, karena lebih menampakkan kebijakannya yang menguntungkan Jawa, terutama dalam masalah ekonomi dan fiskal. Akibatnya penduduk luar Jawa merasa dianaktirikan. Contohnya, pada 20 September 1953, Aceh

⁵⁹ Yahya Muhaimin. 1982. *Perkembangan politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta. Gadjah Mada University. Press. hlm 68.

memberontak terhadap pemerintah pusat. Sementara di bidang pertahanan, kebijakan Iwa yang memecah belah tentara untuk permainan politiknya menimbulkan kejengkelan di kalangan perwira dan menyadarkan mereka bahwa permainan Iwa telah membahayakan persatuan Angkatan Darat. Karena itu, tentara menolak kebijakan Iwa, yang kemudian berakibat Iwa mundur dari Jabatannya.⁶⁰

Kekecewaan terhadap pemerintahan sistem demokrasi parlementer amat kuat di kalangan perwira Angkatan Darat dari dua kelompok utama yang terlibat dalam perselisihan di tahun 1952. Meskipun pertentangan-pertentangan di sekitar peristiwa 17 Oktober memperburuk hubungan-hubungan di antara kelompok-kelompok perwira yang saling bersaing, tetapi kekecewaan bersama lambat laun menjebatani jurang diantara mereka. Kekecewaan terus berlanjut dan para perwira Angkatan Darat menjadi lebih sadar akan kepentingan bersama sebagai anggota dari suatu kekuatan politik yang saat itu tampak tidak efektif namun sebenarnya memiliki potensi yang besar. Di awal tahun 1955 suatu rekonsiliasi formal dari kelompok-kelompok yang sangat bertentangan dilaksanakan seluruh perwira senior.⁶¹

Menyadari bahwa mereka dipecah belah, akibatnya terjadi rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa di Angkatan Darat, dimulai dari kesepakatan pemulihan persatuan antara Kelompok yang anti-17 Oktober yang diwakili oleh Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Bambang Supeno, dan Letnan Kolonel Sapari, dengan pihak penanda tangan petisi anti parlemen

⁶⁰ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 99.

⁶¹ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 29.

diwakili oleh Kolonel Suprpto, Letnan Kolonel Soetoko, dan Letnan Kolonel S. Parman.

Pada 17-25 Februari 1955, dilaksanakan Konferensi di Yogyakarta yang dihadiri oleh 270 perwira tinggi menengah. Konferensi tersebut membahas kertas kerja yang telah disiapkan oleh kedua kelompok, yaitu kelompok anti- 17 Oktober dan kelompok penandatanganan petisi. Pada 25 Februari 1955, suatu piagam persatuan yang telah disetujui ditandatangani oleh KSAD Bambang Sugeng dalam suatu upacara yang diahdiri oleh Soekarno dan Hatta serta tokoh-tokoh politik lainnya. Piagam tersebut disebut dengan “Piagam Yogyakarta”. Pertemuan Yogyakarta itu merupakan kejadian penting dalam membangun persatuan Angkatan Darat. Angkatan Darat menyatakan bahwa tentara memadukan diri untuk mengahdapi orang luar, sehingga pihak yang menentang 17 Oktober pun diterima kembali ke posisi dominan.⁶²

Pemilihan Umum I dan berakhir dengan diumumkanannya Dekrit Presiden tahun 1959 tentang kembali ke UUD 1945. Masa yang lamanya 4 tahun ini mengalami 3 buah kabinet yang silih berganti, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955- Maret 1957) dan Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959). Walaupun sudah diadakan pemilihan umum, namun pemerintahan yang stabil tetap tidak tercapai. Rata-rata kabinet memerintah

⁶² Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 100.

selama satu setengah tahun. Dengan demikian kiranya terbukti bahwa Demokrasi Parlemerter memang tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia.⁶³

Sistem Parlemerter tidak disukai di kalangan perwira Angkatan Darat, namun runtuhnya pemerintahan Parlemerter yang paling akhir serta pembangunan keadaan darurat perang di awal tahun 1957 bukanlah hasil suatu tindakan yang disengaja dari pimpinan tentara untuk menggulingkan sistem tersebut. Sistem ini runtuh karena ketidakmampuannya untuk mengatasi para panglima daerah militer yang menentang kewibawaan pemerintah maupun pusat tentara.⁶⁴

B. Kepentingan Angkatan Darat

1. Angkatan Darat menjaga pertahanan dan keamanan Negara

Tentara Indonesia adalah tentara yang menciptakan diri sendiri. Artinya mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik. Tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai dan mengorganisasikan diri bermodalkan, antara lain, tenaga-tenaga pemuda yang telah mendapatkan latihan dan senjata-senjata militer Jepang yang berhasil mereka rampas setelah proklamasi.⁶⁵ Tentara bertugas untuk menciptakan dan menjamin rasa aman, mengamankan dan melanjutkan pembangunan nasional serta bagaimana menjamin keutuhan kedaulatan, identitas dan integritas nasional.

Sejak lahirnya, tentara Indonesia telah menempatkan dirinya baik sebagai kekuatan militer maupun kekuatan politik, dalam sebagian besar dari

⁶³ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *op.cit.* hlm 220.

⁶⁴ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 30.

⁶⁵ Salim Said. *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini dan Kelak.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2006. hlm 2-3.

sejarahnya memang tentara telah memainkan peran politik yang penting. Selama beberapa tahun setelah kemerdekaan, tentara menganggap dirinya sebagai pelindung. Tentara Indonesia dalam arti tertentu adalah tentara rakyat.⁶⁶ Di Indonesia golongan militer, yakni ABRI sebagai salah satu potensi sosial berpolitik, mempunyai konsep-konsep politik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan politik. Peran serta di bidang politik dimasukkan ke dalam fungsinya yang kedua, yakni fungsi sosial. Sedangkan fungsinya yang pertama adalah fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan.⁶⁷

Pada awalnya, TNI hanya mempunyai peran yang terbatas dalam aktivitas-aktivitas non militer, tetapi kemudian, karena beberapa tekanan krisis nasional, TNI secara berangsur-angsur terpaksa memperluas perannya. Pada masa ini, adalah kenyataan bahwa Angkatan Bersenjata Indonesia pada umumnya dan TNI pada Khususnya membentuk suatu kekuatan sosial yang besar dan strategis dalam konstelasi politik nasional. TNI sepenuhnya sadar, bahwa tanggung jawabnya terhadap keselamatan, keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa Indonesia telah menjadi mutlak. Namun, dengan demikian tidak berarti bahwa Angkatan Bersenjata Indonesia mengendalikan atau menginginkan kekuasaan yang tak terbatas. Angkatan Bersenjata Indonesia, sebagai pejuang kemerdekaan, tetap merupakan pahlawan demokrasi dan hanya berjuang keras demi kekuasaan konstitusional.⁶⁸

⁶⁶ Harold Chouch. *op.ct.* hlm 24.

⁶⁷ Hidayat Mukmin. *op.cit.* hlm 30.

⁶⁸ Bilveer Singh. *op.cit.* hlm 106.

2. Angkatan Darat mempunyai peranan dalam pemerintahan

Peran di bidang politik tersebut, yang kemudian dinamakan peran sosial politik ABRI, mendapatkan pengesahan secara politis dengan diikutsertakannya anggota-anggota ABRI yang masih aktif dalam lembaga pemerintahan secara formal untuk pertama kalinya pada tahun 1957. Dewan Nasional yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada Februari 1957 berisikan beberapa perwira ABRI. Badan tersebut, yang merupakan penasehat presiden, memberikan kesempatan bagi perwira-perwira ABRI tersebut untuk menjalankan peran sosial politik seperti yang dimainkan para politisi sipil.

Keterlibatan ABRI secara langsung dalam bidang politik juga memberikan kesempatan kepada para anggota ABRI untuk berperan lebih besar dalam mengatasi konflik yang terjadi di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Angkatan Darat bertujuan sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan politik Indonesia. Keikutsertaan Angkatan Darat dalam bidang-bidang nonmiliter hanyalah menjalankan bagi mereka yang masih aktif di militer dan dikaryakan ke lembaga-lembaga sipil atau bahkan penyaluran dari militer ke lembaga-lembaga sipil bagi mereka yang akan pensiun.⁶⁹

Setelah Dewan Konstituante gagal mencapai konsensus tentang konstitusi baru yang akan ditetapkan setelah pemilihan tahun 1955, Nasution sebagai Kepala Penguasa Perang Tertinggi di bawah Undang-Undang darurat perang, melarang semua kegiatan politik dalam negara. Kemudian ia menyarankan Sukarno untuk mengabaikan Sidang Konstituante dan

⁶⁹ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 110.

memberlakukan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden. Soekarno (lihat lampiran 2) melaksanakannya pada tanggal 5 Juli 1959.

Setelah berlakunya dekrit ini, keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer. Nasution sendiri menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan yang memberinya wewenang melakukan koordinasi antara Departemen Pertahanan, Peradilan, Kepolisian dan urusan Veteran sekaligus tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ia juga berhak membatalkan pengangkatan kaum Komunis ke Kabinet Kerja. Ketika Soekarno mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1960, 35 dari 283 anggotanya adalah ABRI. Setelah inilah, Nasution untuk pertama kalinya menggunakan istilah “Dwifungsi” dalam sebuah pidato di Porong, Jawa Timur, dalam pertemuan para perwira kepolisian.⁷⁰

Pada waktu ini, peran ABRI, khususnya Angkatan Darat, dibuat semakin transparan. Oleh karena itu, dalam pamflet yang diterbitkan oleh Dinas Informasi Angkatan Darat pada bulan April 1961, termuat penilaian berikut mengenai sistem politik dan peran TNI di dalamnya:

Demokrasi Liberal yang dipraktekkan Pemerintah Republik Indonesia antara lain tahun 1950-1959, dan ternyata gagal, sama sekali tidak mencantumkan peran TNI dalam kaitan dengan soal-soal politik. Tetapi setelah kembali ke UUD 1945, undang-undang yang sesungguhnya di dasarkan pada Demokrasi Terpimpin, peran TNI telah merumuskan dan juga memiliki kekuatan-kekuatan konstitusional yang sah. Di samping fungsinya yang normal sebagai aparat pemelihara Keamanan Nasional, TNI sebagai aparat fungsional bertanggung jawab

⁷⁰ Bilveer Singh. *op. cit.* hlm 93.

mengamankan Revolusi untuk sampai ke tujuannya, dan dalam membimbing Negara. Fungsi yang khusus ini tak dikenal di negara-negara Barat.

Karena adanya dua fungsi ABRI yang disebutkan di atas, dapatlah dilihat bahwa ABRI aktif di semua bidang pemerintahan. Jelaslah, bahwa peran TNI dewasa ini bukan sebagai dictator militer, dan Republik Indonesia bukan sebuah Negara Militer menurut pandangan-pandangan umum ini. Tetapi, Bagaimanapun juga, satu hal adalah pasti, bahwa peran TNI di dalam Pemerintahan Republik Indonesia telah memberi sumbangan besar dalam mencapai tujuan Revolusi.⁷¹

Munculnya Angkatan Darat sebagai kekuatan politik sebenarnya berawal diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Program yang pertama dilakukannya adalah pemantapan dan konsolidasi intern terutama terhadap komandan-komandan militer regional. Tantangan yang muncul adalah timbulnya pembangkangan beberapa panglima militer daerah pada pertengahan tahun 1956 yang kemudian berkelanjutan menjadi pemberontakan-pemberontakan daerah. Menjelang akhir tahun 1956 muncul berbagai pergolakan di daerah. Gerakan ini dipicu oleh rasa tidak puas daerah atas kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi.⁷²

Pemerintah pusat terlalu mementingkan pengusaha-pengusaha Jawa serta menyedot dari daerah-daerah tanpa memberikan kembali sumbangan yang pantas bagi pembangunan daerah. Keadaan semakin memburuk ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Oktober 1956. Hatta dianggap sebagai tokoh yang dapat mengimbangkan pandangan dan tindakan Soekarno dan mewakili kepentingan luar Jawa terhadap pemerintah pusat.

⁷¹ *Ibid.* hlm 94.

⁷² Nazaruddin Sjamsuddin (ed). *op. cit.* hlm 188-189.

Pengaruh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam pemerintah pusat semakin menurun sehingga orang-orang di luar Jawa berkesimpulan bahwa pemerintah Jakarta hanya mengabdikan kepada kepentingan pulau Jawa. Memasuki tahun 1957, presiden Soekarno sudah bersikap kritis terhadap sistem demokrasi liberal. Ia meyalahkan sistem ini sebagai sumber kesulitan dalam bidang ekonomi, politik dan penyebab pemberontakan di berbagai daerah.⁷³

Presiden Soekarno dalam konsepsinya yang diumumkan tanggal 21 Februari 1957 ketika berbicara di hadapan tokoh-tokoh partai politik menyerukan pembentukan kabinet Gotong Royong yang melibatkan PKI. Presiden Soekarno juga menginginkan pembentukan Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari semua golongan fungsional dalam masyarakat.

Sejak jaman Kabinet Ali II Presiden Soekarno melihat dan menilai bahwa sistem parlementer yang dipraktekkan dan diterapkan di Indonesia sebagai sesuatu yang tidak baik, maka Soekarno mengemukakan gagasannya untuk memperkenalkan sistem pemerintahan atau sistem politik baru,⁷⁴ yang kemudian dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian maka secara *de facto* kekuasaan beralih ke tangan Soekarno setelah ia menyampaikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan sekaligus mengakhiri Demokrasi Parlementer. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dewan yang diketuai oleh Soekarno sendiri tidak diperlukan lagi dan kemudian dihapuskan. Alasan cukup jelas bahwa dengan kembalinya ke

⁷³ G. Moedjanto. *Indonesia abad ke 20, jilid II, op.cit.* hlm 2

⁷⁴ *Ibid.* hlm 3.

Undang-Undang Dasar 1945, telah memungkinkan Soekarno untuk menempatkan dirinya sebagai kepala pemerintahan, tidak hanya sebagai simbol atau kepala negara konstitusional.

Periode tahun 1957-1959 disebut sebagai masa transisi dalam kehidupan politik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Mayor Jenderal A. H. Nasution sebagai KSAD menitikberatkan tindakannya untuk mengurangi dan menghilangkan “*political weakness*” yang merupakan kelemahan paling fundamental yang ada pada TNI, sehingga Jenderal Nasution berusaha mendapatkan “*legitimacy*” atau “*dasar hukum*” bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan non militer dalam hal ini peranan politik yang selama ini belum dimiliki TNI.⁷⁵

Selama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, golongan fungsional terutama TNI ditempatkan dalam suatu posisi yang sulit. Pada satu pihak TNI berusaha berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan pada pihak lain TNI harus menghadapi berbagai rongrongan intimidasi dan usaha dominasi PKI. Presiden Soekarno membiarkan berlangsungnya proses *balance of power* antara dua kekuatan politik utama pada waktu itu yakni TNI dan PKI.⁷⁶

Kedudukan Angkatan Darat dalam birokrasi pemerintah negara tetap kuat sepanjang tahapan terakhir Demokrasi Terpimpin baik dalam kabinet maupun pemerintahan daerah. Dalam kabinet personil Angkatan Darat berjumlah seperempat dari seluruh anggota termasuk departemen-departemen

⁷⁵ Yahya Muhaimin. *op.cit.* hlm 86.

⁷⁶ Nugroho Notosusanto (ed). 1983. *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Sinar Harapan. Jakarta. hlm 103.

penting yaitu Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Departemen Dalam Negeri, walaupun telah diusahakan Soekarno agar Angkatan Darat tidak menempati posisi-posisi yang dominan.

C. Munculnya Demokrasi Terpimpin

Munculnya gagasan demokrasi terpimpin berawal dari keprihatinan terhadap seringnya terjadi pergantian Kabinet tanpa bisa menyelesaikan program kerjanya. Hal ini merupakan penghalang pembagian serta melemahnya pengaruh dan kewibawaan partai dan Parlemen. Dengan demikian muncul gagasan Demokrasi Terpimpin, karena demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang kuat dan berwibawa pada akhirnya akan sanggup mengakhiri krisis politik serta memulihkan ketertiban negara.⁷⁷

Berlakunya demokrasi terpimpin menimbulkan terjadinya suatu perubahan dalam sistem politik Indonesia. Dalam kaca mata dunia Barat, Indonesia telah jatuh ke sistem kekuasaan otoriter sebab semua kekuasaan berada dalam satu tangan yaitu Soekarno. Meskipun terdapat lembaga-lembaga seperti DPR, MPRS, tetapi dengan dibentuknya Dewan Nasional praktis kekuasaan berada di tangan Soekarno. Sejak saat itu semua lembaga politik seperti DPR, MPRS, Dewan Nasional dan Dewan Pertimbangan Agung bekerja di bawah komando Soekarno.

Dengan terbentuknya demokrasi terpimpin maka lengkaplah sudah keinginan Soekarno untuk menggenggam urusan politik sepenuhnya dengan tujuan menyelamatkan revolusi dan bangsa. Soekarno membawa bangsa

⁷⁷ G. Moedjanto. 1989. *Indonesia abad ke 20. jilid II. op.cit.* Hlm 114.

Indonesia ke sistem pemerintahan teradisional yang diberi bentuk modern. Semua kekuasaan berada di tangan Soekarno dan ia menjadi pusat kekuasaan.⁷⁸

Demokrasi pada dasarnya merupakan gagasan ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan jalannya pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi sebagai sistem politik memang masih dinilai yang terbaik sebab dengan demokrasi hak rakyat dalam negara dapat dijamin. Istilah Demokrasi pada umumnya memberi pengertian bahwa rakyat mempunyai posisi penting dalam kehidupan bernegara, sehingga Demokrasi Terpimpin mempunyai tujuan untuk menggali demokrasi asli Indonesia yang diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai upaya menyelamatkan negara. (Isi Dekrit Lihat pada lampiran 1)

Menurut UUD 1945 Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menuju masyarakat adil dan makmur. Prinsip ini telah dikenal masyarakat Indonesia, sehingga Demokrasi Terpimpin merupakan praktek demokrasi yang sejati.

Gagasan Soekarno tentang Demokrasi dan prakteknya, ternyata hanya menempatkan Soekarno sebagai titik sentral kekuasaan. Ketidaksenangan terhadap nilai Demokrasi liberal dan keinginannya untuk berkuasa menyebabkan Soekarno mengajukan konsep Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sebenarnya merupakan alat untuk mengatasi pertikaian

⁷⁸ Nazaruddin Sjamsuddin (ed). *op.cit.* hlm 80-82.

politik yang berkepanjangan dan tidak lagi dapat diatasi oleh sistem parlementer ketika itu. Soekarno malahan memandang sistem parlementer sebagai penyebab timbulnya pertentangan antar partai, sementara dirinya sendiri tidak berada pada posisi untuk bersaing. Oleh sebab itu ia menciptakan suatu sistem yang memberikannya kedudukan yang menentukan. Dekrit 5 Juli 1959, dan dukungan yang diberikan oleh Angkatan Darat memang telah mengakhiri pertikaian politik, namun ternyata hanya untuk sementara waktu saja. Akan tetapi lebih daripada itu, ia telah memungkinkannya Soekarno untuk memutuskan kekuasaan pada dirinya sendiri. Sejak itulah sistem politik didominasi oleh pengaruh Presiden.

Dalam Demokrasi Terpimpin kuatnya pengaruh Soekarno bisa dilihat dari tindakan-tindakan Soekarno antara lain pembubaran DPR diganti DPR GR, pimpinan DPR dijadikan menteri, presiden diberi wewenang legislative dan yudikatif, pembubaran partai politik yang dianggap menyimpang dari keinginan Soekarno, dibentuknya lembaga-lembaga ekstra konstitusional seperti front nasional.

Dengan berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, Dewan yang diketuai oleh Soekarno sendiri tidak diperlukan lagi dan kemudian dihapuskan. Alasan cukup jelas bahwa dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945, telah memungkinkannya Soekarno untuk menempatkan dirinya sebagai simbol atau kepala negara konstitusional.⁷⁹

⁷⁹ Nazaruddin Sjamsuddin (ed). *op.cit.* hlm 203-204.

BAB III

SIKAP SOEKARNO TERHADAP ANGKATAN DARAT

A. Pandangan Soekarno terhadap Angkatan Darat

➤ PKI sebagai penyeimbang Angkatan Darat

Di zaman Demokrasi Terpimpin, PKI berkembang pesat dan menjadi kekuatan politik yang menonjol karena prinsip gotong royong dan kekeluargaan dalam politik. TNI, PKI dan Presiden Soekarno yang menjaga keseimbangan antara TNI dengan PKI. Kewibawaan dan kedudukan Presiden sebagai penentu kebijakan menjadi perebut dua kekuatan politik TNI dan PKI, untuk saling mendekati dan mempengaruhi Presiden.⁸⁰

Usaha-usaha presiden untuk membentuk Kabinet Gotong Royong pada tahun 1960, mendapat tantangan dari golongan agama dan pimpinan TNI-AD. Namun Presiden Soekarno memberi kesempatan kepada PKI dengan memberikan kedudukan dalam DPR-GR dan DPA serta dalam pengurus besar Front Nasional dan Pengurus Front Nasional Daerah. Ada juga yang diangkat sebagai kepala daerah. Melihat kenyataan itu pimpinan TNI-AD berusaha untuk mengimbangi dengan mengajukan calon-calon yang lain, sehingga merupakan checking terhadap PKI dalam komposisinya. Tetapi daya pimpinan TNI-AD tersebut menemui kesulitan

⁸⁰ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 109.

karena Presiden Soekarno memberikan dukungannya yang besar kepada PKI dalam segala hal.⁸¹

Sejak awal tahun 1958, Soekarno mulai mengembangkan persekutuan dengan PKI. Sementara itu persekutuan dengan TNI-AD tetap terpelihara, karena keduanya saling membutuhkan. TNI membutuhkan hak kekuasaan Presiden yang dapat memberikan kepada TNI peranan politik, sebaliknya Presiden Soekarno juga membutuhkan dukungan TNI, terutama dalam upaya-upaya merealisasikan konsepsi dan gagasan demokrasi terpimpinnya. Namun, tidak dapat dipungkiri, pengembangan persekutuan dengan PKI juga dimaksudkan oleh Soekarno untuk mengimbangi TNI, yang telah tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan utama politik di Indonesia. Meskipun TNI tidak radikal, tetapi Soekarno sangat mengkhawatirkan TNI yang mungkin akan menghapuskan kebebasannya. Soekarno melihat, persekutuannya dengan TNI dalam banyak hal tidak mantap. Dalam beberapa persoalan kenegaraan yang sangat penting. Presiden Soekarno dan TNI kuat sependapat dan bersatu. Namun, dalam beberapa persoalan politik, antara Soekarno dan TNI terdapat pertentangan yang tajam. Sebaliknya TNI khususnya pimpinan AD sangat khawatir kecenderungan Soekarno kepada PKI.⁸²

Pada awal Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno bekerja sama dengan Angkatan Darat untuk mengendalikan partai-partai. Ini

⁸¹ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *op. cit.* hlm 318-319.

⁸² Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. 1995. *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia. Jilid IV. Pemberontakan G30 S/PKI dan Penumpasannya.* Jakarta. hlm 19.

menjadikan tentara mempunyai kekuasaan baru dari pemerintah pusat, otonomi dan pengawasan parlemen, peran politik yang diperluas, dan penguasaan perusahaan-perusahaan Negara. Disamping itu, Presiden Soekarno juga mengatur keseimbangan kekuatan politik antara tentara dan PKI, dan berusaha tetap mengontrolnya agar salah satunya tidak dominan dan Presiden tetap menjadi faktor penentu kebijakan. Sedangkan tentara sangat mewaspadai kedekatan Soekarno dengan PKI. Soekarno menggunakan PKI untuk mendukung ide dan proyek Nasakomisasi sistem demokrasi terpimpin. Sebaliknya PKI selalu memanfaatkan proyek Nasakomisasi untuk masuk ke dalam pemerintahan dan lembaga konstruktural yang penting.⁸³

Usaha PKI untuk menasakomisasi ABRI dengan sistem komisaris politik ala negara-negara totaliter, ditentang keras terutama oleh TNI-Angkatan Darat. Usaha PKI mempersenjatai buruh dan tani dengan nama “angkatan kelima”, ditolak. Usaha PKI menguasai perusahaan negara, dinetralisasi oleh TNI-Angkatan Darat. Untuk mengimbangi kegiatan PKI yang dilakukan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), pimpinan TNI menumbuhkan organisasi buruh baru ialah Sentral (SOBSI), pimpinan TNI menumbuhkan organisasi buruh baru ialah Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI).⁸⁴

Yang dimaksud dengan NASAKOM adalah lembaga-lembaga pemersatu atas pencerminan golongan-golongan dalam masyarakat

⁸³ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 110.

⁸⁴ Nugroho Notosusanto (ed). *op.cit.* hlm 105

Indonesia. Nasakom merupakan jiwa dari kepribadian masyarakat yang berisi tiga kekuatan yang meliputi: Nas adalah golongan nasionalis, A adalah golongan agama dan Kom adalah golongan komunis.⁸⁵ Doktrin Nasakom tersebut yang mengandung nasionalis, agama dan komunis akan bersama-sama berperan dalam pemerintahan nasional Soekarno sehingga akan menghasilkan suatu sistem politik yang kuat dan menciptakan kepribadian nasional.⁸⁶

Soekarno punya kepentingan dengan Nasakom, sedangkan Nasution tidak. Nasution anti-PKI, sedangkan Soekarno memerlukan PKI. PKI sebagai musuh TNI selalu dibela oleh Soekarno untuk memenangkan konsep Nasakomnya. Apalagi PKI berani mencemooh dan menghina TNI, bahkan membunuh anggota TNI. Ketika partai besar yang antikomunis sudah dilarang, partai nonkomunis yang ada kurang memiliki kekuatan. Karena itu, untuk mengimbangi PKI, TNI/ Angkatan Darat pada tahun 1964 mengkonsolidasikan organisasi fungsional yang digabung dalam Sekretariat bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Dengan organisasi itu, peran TNI dalam social politik yang sudah besar pada masa Demokrasi Terpimpin mendapat dukungan organisasi politik yang kuat pula. Selain itu juga Angkatan Darat juga membutuhkan Soekarno untuk mendapatkan kursi di pemerintahan. Hal ini membuat Soekarno tidak senang dengan TNI yang menentang Nasakom. Soekarno memanfaatkan PKI untuk

⁸⁵ Adams, Cindy. 1966. *Bung Karno penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta. hlm 443.

⁸⁶ Tuk Setyohadi. *op.cit.* hlm 111.

mengimbangi kekuatan tentara.⁸⁷ Soekarno menganggap Angkatan Darat sebagai kekuatan politik. Di samping itu, Presiden Soekarno juga mengatur keseimbangan kekuatan politik antara tentara dan PKI, dan berusaha tetap mengontrol agar salah satunya tidak lebih dominan dan presiden tetap menjadi faktor penentu kebijakan.

B. Hubungan antara Soekarno dengan Angkatan Darat: Dari Kerjasama ke Permusuhan

Presiden Soekarno (lihat lampiran 4) selalu mewaspadaikan Angkatan Darat, terutama Nasution. Sebab Soekarno tidak senang pada Nasution, yang menentang Nasakom dan berkembangnya PKI. Oleh sebab itu, posisi kepemimpinan Nasution dikurangi dengan berbagai cara. Misalnya, dengan mengubah jabatan Nasution dari Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf Angkatan Darat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata saja, dengan fungsi terbatas pada koordinasi administratif dan pertahanan sipil. Untuk membatasi kekuasaan tentara, Soekarno mencabut keadaan darurat perang pada 1 Mei 1963 dan membubarkan lembaga-lembaga, seperti Pelaksana Perang Tertinggi (Peperti), Pelaksanaan Perang Daerah (Peperda), dan reorganisasi Komando Operasi Tertinggi (Koti), Nasution tidak masuk lagi dalam formasi jabatan. Alasan Soekarno memang masuk akal, karena pemberontakan telah diselesaikan dan pembebasan Irian Barat telah selesai. Yang tidak masuk akal adalah ketika Panitia Retuling Aparatur Negara

⁸⁷ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 111.

(Paran) yang diketuai Nasution dihapuskan pada Mei 1964, tetapi pada saat yang sama, dibentuk Komando Operasi Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi (Kotrar) yang dipimpin Soekarno, dengan Soebadrio sebagai wakil dan Achmad Yani (lihat lampiran 6) sebagai Kepala Stafnya, sedangkan Nasution tidak masuk formasi.⁸⁸ Tindakan Soekarno ini menyebabkan hubungannya dengan Nasution telah berubah menjadi permusuhan. Soekarno punya kepentingan dengan Nasakom, sedangkan Nasution tidak. Nasution anti-PKI, sedangkan Soekarno memerlukan PKI.

Persaingan antara Yani dan Nasution yang dimulai ketika Nasution tidak lagi memegang kekuasaan atas Angkatan Darat dan digantikan oleh Yani pada tahun 1962, berakibat bahwa Angkatan Darat kehilangan sebagian dari keutuhan politiknya. Nasution merasa bahwa ia dipukul dari belakang pada tahun 1962, ketika Yani menyetujui rencana presiden untuk membatasi peranan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata menjadi penguasa administrative saja, tanpa kekuasaan atas kegiatan-kegiatan operasional. Setelah ia diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat, Yani lalu memperkuat posisinya dengan mengganti beberapa Panglima Daerah pendukung Nasution, bekerja sama dengan Soekarno dan Subandrio menurunkan kedudukan Nasution ke posisi penesehat saja dalam Koti pada tahun 1963. Hubungan antara Yani dan Nasution semakin memburuk pada bulan Mei 1964 ketika Panitia Rituling aparaturnegara (Paran), suatu komisi anti korupsi yang dipimpin oleh Nasution, dibubarkan dan diganti dengan Komando Tertinggi

⁸⁸ Harold Chouch. *op.ct.* hlm 85.

Rituling Aparatur Revolusi (Kotrar), yang dipimpin Subandrio, dengan Yani sebagai Kepala Staf. Paran memang merupakan sasaran kampanye PKI, tetapi persetujuan Yani untuk pembubaran Paran timbul dari kekhawatiran bahwa penyelidikan-penyelidikan Nasution terhadap kegiatan-kegiatan korup para perwira Angkatan Darat di perusahaan-perusahaan negara akan dapat menyinggung para pendukung Yani juga. Nasution dan Yani pun berbeda sikap terhadap kebijakan konfrontasi. Nasution pada prinsipnya mendukung sekalipun ada pamrihnya dalam hal cara melakukan kampanye, sedangkan pendekatan Yani lebih luwes dan pragmatis. Namun, perbedaan utama diantara mereka mengenai sikap terhadap Soekarno dan taktik yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan PKI.⁸⁹

Hubungan antara Presiden Soekarno dengan TNI untuk mendukung demokrasi terpimpin. Sedangkan TNI memerlukan Soekarno agar dapat kursi di pemerintah. Itu dikarenakan Soekarno menganggap TNI secara nyata merupakan kekuatan politik. Sedangkan TNI memandang Soekarno sebagai presiden yang memiliki kekuasaan dan kharisma yang besar. Namun, ketika PKI sebagai musuh TNI selalu dibela oleh Soekarno untuk memenangkan konsep Nasakomnya. Apalagi PKI berani mencemooh dan menghina TNI, bahkan membunuh anggota TNI. Ketika partai besar yang antikomunis sudah dilarang, partai nonkomunis yang ada kurang memiliki kekuatan. Karena itu, untuk mengimbangi PKI, TNI/ Angkatan Darat pada tahun 1964 mengkonsolidasikan organisasi fungsional yang digabung dalam Sekretariat

⁸⁹ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 85.

bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Soekarno memanfaatkan PKI untuk mengimbangi kekuatan tentara, tetapi Soekarno juga dimanfaatkan oleh PKI untuk melindungi dan membela diri dari tekanan tentara yang tidak suka kepada PKI.⁹⁰

Selama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, golongan fungsional, terutama TNI, sesungguhnya ditempatkan dalam suatu posisi sulit. Pada suatu pihak berusaha berpegang teguh pada Pancasila dan UUD-1945, sedangkan pada pihak lain harus menghadapi berbagai rongrongan, intimidasi dan usaha dominasi PKI. Presiden Soekarno membiarkan berlangsungnya *balance of power* antara dua kekuatan politik utama pada waktu itu, yakni TNI dan PKI. Bahkan di kalangan ABRI sendiri dilakukan usaha *divide et impera*, dimana angkatan dengan angkatan diadu domba. Konstelasi politik menuju kepada interaksi tiga kekuatan yang saling mengimbangi dan membatasi yakni kekuatan Soekarno-TNI-PKI.⁹¹

⁹⁰ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 117-122.

⁹¹ Nugroho Notosusanto (ed). *op.cit.* hlm 103.

BAB IV

**SUMBANGAN YANG DIBERIKAN ANGKATAN DARAT
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**

Angkatan Darat selain membantu mengatasi masalah-masalah yang ada pada masa Demokrasi Terpimpin. Angkatan Darat juga berhasil menempatkan posisinya dalam pemerintahan. Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak sumbangan yang diberikan oleh Angkatan Darat. Adapun sumbangan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah:

A. Bidang Politik

1. Dwi Fungsi ABRI

a) Konsep Jalan Tengah

Konsep “Jalan Tengah Tentara” mengandung makna: Pertama, militer Indonesia tidak akan melakukan kudeta dan mendominasi kekuasaan. Kedua, militer Indonesia tidak bersikap pasif atau hanya sebagai penonton di pinggir arena politik, tetapi akan ikut terlibat dalam menentukan kebijakan negara. Ketiga, militer Indonesia adalah sebagai kekuatan sosial, di samping sebagai kekuatan pertahanan. Keempat, militer Indonesia hanya merupakan salah satu kekuatan sosial di antara kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Kelima, keikutsertaan perwira TNI dalam politik adalah secara individual bukan institusi TNI.⁹²

⁹² Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 140.

Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution (lihat lampiran 5) merumuskan sebuah konsep yang bernama “Jalan Tengah” yang menerapkan bahwa tentara tidak akan mencari kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan, namun juga tidak akan memperdulikan politik. Selain itu tentara juga menuntut hak mereka untuk tetap duduk dalam pemerintahan, lembaga perwakilan serta administrasi.⁹³ Dengan model ini tentara tidak akan mengambil alih kekuasaan, tapi akan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menentukan nasib bangsa.⁹⁴

Dalam Seminar pertama yang diselenggarakan pada bulan April 1965, tentara mencetuskan suatu doktrin yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata memiliki peranan rangkap yaitu sebagai kekuatan militer dan kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, kegiatan-kegiatan tentara meliputi bidang-bidang ideologi, politik, social, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.⁹⁵

Gambaran yang jelas mengenai pemikiran dan gagasan Nasution baru muncul pada bulan November 1958, ketika Ia menyampaikan pidatonya yang bersejarah mengenai “Jalan Tengah” di Akademi Militer Nasional Magelang. Pada saat Pidato jalan tengah itu disampaikan, para pejabat militer telah menduduki posisi-posisi di bidang-bidang yang secara tradisional dianggap sebagai wewenang sipil.⁹⁶ Peran serta tentara dalam

⁹³ Harold Chouch. *op. cit.* hlm 21.

⁹⁴ Abdoel Fattah. *op.cit.* hlm 106.

⁹⁵ Harold Chouch. *op. cit.* hlm 22.

⁹⁶ Bilveer Singh. *op.cit.* hlm89.

ekonomi merupakan aspek lain dari pelaksanaan konsep Jalan Tengah yang dikemukakan Nasution, para perwira memainkan peran di seluruh sector sipil tetapi tidak dalam rangka mendapatkan kedudukan eksklusif untuk mendominasi.⁹⁷

Konsepsi Jalan tengah, tentara tidak akan mengambil keputusan akan tetapi berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan sebagai satu diantara kekuatan yang menentukan nasib bangsa. Selain itu, memasukkan badan-badan pemerintahan dengan perwira-perwira yang sudah terlatih dalam keterampilan pengelolaan dan teknis dipandang sebagai satu langkah yang pasti akan memperbaiki administrasi negara. Konsep-konsep politik Soekarno dan Nasution sama sekali tidak sama, tetapi mereka memiliki program bersama yaitu memiliki nasionalisme dan patriotisme yang kuat. Perbedaan pandangan mereka terletak pada, Soekarno menganut “revolusi”, mobilisasi masa, dan suatu kombinasi antara minitisme jawa, sekularisme dan tradisi, sedangkan Nasution yang dipentingkan adalah efisiensi, disiplin dan suatu bentuk-bentuk kepercayaan Islam yang modern.⁹⁸

Persamaan beberapa pandangan antara Nasution dengan Soekarno, dan kepentingan Soekarno untuk mendapatkan dukungan dari tentara, memudahkan Nasution untuk mewujudkan gagasannya, apalagi dengan adanya wakil-wakil tentara di Kabinet dan Dewan Nasional. Itu adalah pengakuan *de facto* dalam praktik pemerintahan di badan eksekutif.

⁹⁷ Harlold Chouch. *op. cit.* hlm 38.

⁹⁸ Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm 220-221.

Nasution kemudian menemukan landasan *de jure* agar tentara dapat ikut serta sebagai anggota badan legislative, yaitu mengikuti pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan perundingan. Dengan demikian Nasution berpendapat UUD 1945 memberikan peluang tentara masuk dalam golongan tersebut sebagai golongan fungsional agar dapat menjamin sistem kenegaraan yang stabil.⁹⁹

Langkah penting Nasution setelah memperkenalkan doktrin “Jalan Tengah” ialah kampanye meninggalkan system demokrasi liberal untuk digantikan dengan sistem presidensiil lewat pemberlakuan kembali UUD 1945. Alasan yang dikemukakan Nasution untuk langkah ini adalah:

... untuk memulihkan secara mendasar persatuan serta perjuangan nasional dan untuk membina kestabilan pemerintah baik idiil maupun struktural setelah system liberal membawa ketidakstabilan....¹⁰⁰

Nasution juga berpendapat, UUD 1945 dapat menghindarkan perselisihan ideologi, menjamin kemantapan kepemimpinan, di samping memberi landasan hokum tentara untuk ikut serta dalam mengurus Negara sebagai golongan fungsional. Nasution meminta Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden

⁹⁹ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 107.

¹⁰⁰ A. H. Nasution. 1971. *Kekaryaan ABRI*. Seruling Masa. Jakarta. hlm 18.

Soekarno menyampaikan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, di depan ribuan massa yang dikumpulkan atas inisiatif Nasution.¹⁰¹

b) Aplikasi Dwifungsi ABRI

Konsep Dwifungsi sangat berhubungan dengan kelahiran dan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama periode revolusioner dari bulan Agustus 1945 sampai Desember 1949. Konsep Dwifungsi ABRI juga berhubungan dengan kenyataan bahwa masyarakat Asia cenderung mengembangkan konsep dari pengalaman mereka, sementara Barat pertama-tama cenderung untuk mengembangkan suatu konsep sebelum mengalaminya. Jadi, pengalaman ABRI amat berpengaruh pada konseptualisasi dan aktualisasi dwifungsi di kemudian hari. Dalam hal ini persepsi diri mengenai diri mengenai peran ABRI dalam masyarakat tak berubah dan titik inilah yang harus diperhatikan agar bias memahami konsep dwifungsi. Walaupun konsep dwifungsi baru dikemudian hari diperkenalkan secara resmi, dalam prakteknya konsep ini jelas sudah ada pada waktu revolusi. Jadi, praktek dwifungsi sebenarnya mendahului formulasi dan formalisasinya.¹⁰²

ABRI dengan Dwifungsinya yaitu baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan mapapun sebagai kekuatan sosial dan politik bergerak secara bersamaan dalam dua lingkungan kehidupan politik yaitu: dalam dua lingkungan politik di pemerintahan dan dalam lingkungan politik di

¹⁰¹ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 108.

¹⁰² Bilveer Singh. *op.cit.* hlm 46-48.

lingkungan masyarakat. Hal demikian ini telah berlangsung sejak kelahirannya pada tahun 1945 dimana Dwifungsi ABRI telah terbukti kemanfaatannya bagi kehidupan negara dan menanggulangi krisis-krisis nasional.¹⁰³

Peran militer/ ABRI itu pada intinya merupakan "Notwendigkeit" yaitu hal yang amat perlu dalam keadaan kritis, yang menandai tidak adanya atau lemahnya institusi politik yang rapuh dan tidak efektif di masyarakat. Juga terdapat lembaga-lembaga eksekutif yang lemah dengan pemimpin-pemimpin yang tidak berwibawa. Maka peran militer/ ABRI tersebut pada saatnya memang dibutuhkan guna mengisi vakum yang disebabkan oleh ketidakmampuan orang-orang sipil menjalankan tugas formalnya. Bagi pihak militer, asistensi di bidang eksekutif, legislative dan politik ini mendorong ABRI memerankan "ke Dwifungsinya" di sektor pertahanan dan keamanan dan di bidang sosial, politik dan ekonomi. Hal ini didukung oleh faktor-faktor yang menguntungkan, antara lain oleh:¹⁰⁴

1. Pemilikan Kemahiran teknis dan manajerial tinggi, berkat pendidikan secara sistematis di dalam negeri dan pendidikan spesialisasi di luar negeri, ditambah dengan pengalaman tugas-tugas territorial dan pengamanan.

¹⁰³ Soebijono, Sh. dkk. *Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam kehidupan politik di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1992. hlm 56.

¹⁰⁴ Kartini Kartono. 1996. *ABRI dan Permasalahannya. Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan*. Mandar Maju. Bandung. hlm 3-4.

2. Memiliki *esprit de corps* dan kohesi internal yang sangat kuat, berkat latihan semasa pendidikan dan pengalaman di lapangan dalam menegakkan keamanan dan ketentraman umum.
3. Punya semangat 1945 yang murni berkat pengalaman semasa perjuangan fisik, disertai etos memberikan pelayanan kepada rakyat.

Konsep Dwifungsi ABRI juga harus dapat dikembangkan dengan memainkan peranan yang pas sebagai innovator dan fasilitator untuk proses demokratisasi, yaitu dengan menempatkan kepentingan nasional (kepentingan umum) di atas kepentingan pribadi, ambisi-ambisi pemimpin, dan kepentingan sekte atau golongan sendiri. Peranan Militer yang lebih menentukan adalah sebagai pelindung dan pembela rakyat, karena TNI/ ABRI memang betul-betul merupakan kekuatan rakyat, berasal dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat serta kesejahteraan bersama.¹⁰⁵

Perkembangan politik di Indonesia sangat ditentukan oleh Dwifungsi ABRI. Sepanjang sejarah ABRI selalu menunjukkan sumbangan dan perannya yang besar baik dalam persoalan militer maupun dalam persoalan non militer. Dalam masa revolusi, ABRI telah mengendalikan pemerintahan gerilya. Pimpinan ABRI, terutama Nasution, menyadari prestasi yang menanjak sehingga ia memandang waktunya tepat untuk mendesak pemerintah agar dalam kegiatan non-militer para perwira yang mempunyai bakat dan kemampuan di bidang non-militer

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm 21-22.

diberi kesempatan. Dengan kata lain, ABRI menghendaki ikut serta dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga non-pemerintah.¹⁰⁶

Ketika Dewan Nasional dibentuk tanggal 12 Mei 1957, maka ketiga Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Kepolisian dimasukkan sebagai anggota Dewan Nasional tersebut. Sejak itu, militer memperoleh legitimasi pengakuan *de facto* dalam fungsinya sebagai kekuatan social politik. Kemudian, ketika Dewan Perancang Nasional dibentuk pada bulan Oktober 1958, wakil-wakil dari militer juga dapat dalam Dewan tersebut. Sejak itulah militer memperoleh pengakuan resmi secara yuridis, yaitu berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun 1958 tanggal 23 Oktober 1958, yang mengatur militer masuk sebagai anggota Dewan itu dalam kapasitasnya sebagai Golongan Fungsional, dan undang-undang itu dirancang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh UUD. Dengan berlakunya UUD 1945 sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka fungsi sosial politik militer mempunyai landasan konstitusional yang lebih kuat.¹⁰⁷

2. Stabilitas Politik

a) Menjaga pertahanan dan keamanan

Keterlibatan militer Indonesia dalam politik mempunyai akar dan latar belakang yang panjang, namun pada awal pembentukannya, kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dirancang sebagai alat pertahanan dan keamanan negara saja. Hal ini dapat dilihat dalam amanat

¹⁰⁶ Kartini Kartono. *op.cit.* hlm 112.

¹⁰⁷ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 145.

pertama Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta pada tanggal 25

Mei 1946, antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup tentara teguh memegang kewajiban ini. lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan segala yang diwajibkan. Harus diingat pula, oleh karena negara Indonesia tidak cukup dipertahankan tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara, tidak bisa menjadi alat suatu golongan atau siapa pun juga.

Tugas TNI sebagai alat pertahanan negara sudah menjadi prinsip ketika mula-mula TNI berdiri. Fungsi pertahanan dan keamanan pada hakikatnya merupakan fungsi untuk menghadapi ancaman luar yang mengancam kedaulatan dan integritas negara serta melindungi bangsa dan negara dengan kekuatan bersenjata. Hal itu tercermin dalam amanat Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Letnan Jenderal Soedirman pada konferensi TKR di Yogyakarta, 12 November 1945. Ia menyatakan:

Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajibannya ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh.¹⁰⁸

Peranan ABRI yang melindungi dan membela rakyat kecil (yang menjadi cikal bakal dan bapak pelindung TNI di masa revolusi dan perang kemerdekaan. Yaitu peranan menolong yang lebih besar, dan tidak

¹⁰⁸ Abdoel Fattah. *op. cit.* hlm 206.

menakut-nakuti, menekan atau memaksa rakyat miskin dan mereka yang tidak mempunyai, serta belum pernah menikmati hasil dari kemerdekaan.¹⁰⁹

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbentuk dari Laskar-Laskar perjuangan dan kesatuan regular yang berasal dari bekas tentara PETA (Pembela Tanah Air) dan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger). Tanggal 22 Agustus 1945 pemerintah membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) dengan fungsi untuk memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang berkaitan.¹¹⁰

Tanggal 5 Oktober 1945 BKR statusnya ditingkatkan dan diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan fungsi utama tetap sebagai pemeliharaan keamanan dalam negeri dan bukan untuk menghadapi musuh dari luar. Tanggal 25 Januari 1946 nama ini diubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Dengan perubahan nama menjadi TRI, maka status tentara menjadi jelas karena dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi militer negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹¹ TRI dan kelompok-kelompok laskar rakyat pada tanggal 5 Mei 1947 digabungkan dalam TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Keadaanlah yang kemudian membuat TNI berubah dan terlibat dalam percaturan politik. Kaum militer campur tangan dalam politik karena beberapa faktor, yaitu: keadaan yang menuntutnya lantaran dalam situasi perang kemerdekaanya dicemooh dan dipojokkan oleh elit sipil

¹⁰⁹ Kartini Kartono. *op.cit.* hlm 15

¹¹⁰ Tahi Bonar Simatupang. 1954. *Pelopor Dalam Perang. Pelopor Dalam Damai.* Jajasan Pustaka Militer. Jakarta. hlm 55.

¹¹¹ Tatang Sumarsono dan Didi Kartasasmita. 1993. *Pengabdian bagi Kemerdekaan.* Dunia Pustaka. Jakarta. hlm 182.

secara tidak wajar kegagalan pemimpin dan elit sipil dalam melaksanakan tugasnya, dipengaruhi dan ditarik ke arena politik, dan dijadikan alat kekuasaan politik. Perang melawan Belanda mengakibatkan kekosongan pemerintahan di daerah, yang menyebabkan militer mengisinya untuk menjalankan pemerintahan. Sementara cemoohan anggota parlemen yang tidak wajar terhadap TNI telah menyebabkan campur tangan tentara dalam urusan politik dengan mengusulkan pembubaran parlemen, yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Sedangkan kegagalan dan ketidakmampuan pemimpin sipil bisa dilihat pada banyaknya protes kepada pemerintah Jakarta dan sering jatuhnya kabinet, serta saat Indonesia menghadapi gerakan pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi dan keadaan darurat perang tahun 1957. Dalam menghadapi keadaan ini, peran militer lebih menonjol, karena kekuatan pemimpin sipil relatif tidak kokoh dan tidak maupun memainkan peranannya. Inilah yang kemudian menyebabkan militer mengambil peran politik. Pemimpin sipil pada masa itu terlalu sibuk dengan perselisihan dan lebih mementingkan golongannya saja.¹¹²

Sejak lahirnya, tentara Indonesia telah menempatkan dirinya baik sebagai kekuatan militer maupun kekuatan politik dalam sebagian besar dari sejarahnya memang tentara telah memainkan peran politik yang penting. Selama beberapa tahun setelah kemerdekaan, tentara menganggap dirinya sebagai pelindung. Perluasan peranan politik Angkatan Darat

¹¹² Abdoel Fattah. *op.cit.* hlm 2

bukanlah suatu proses yang direncanakan dimana para pemimpin Angkatan ini secara sadar mengambil langkah-langkah untuk memenuhi ambisi-ambisi politik mereka.¹¹³ Angkatan Darat berperan sentral dalam kehidupan sosial politik. Selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (hankam), TNI pun merupakan kekuatan sosial politik.¹¹⁴

Peran pertama yang dilakukan Angkatan Darat adalah peran pertahanan dan keamanan (hankam) yakni peran tradisional yang dijalankan oleh setiap kekuatan militer dimana saja di dunia ini. Militer menggunakan keterampilannya dan perlengkapan senjata yang dimilikinya untuk membela negara dan bangsa dari ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Di samping itu, aparat militer menegakkan dan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dengan menggunakan keterampilan, wibawa, dan persenjataannya, sehingga ketenangan dan kerukunan sosial dapat diciptakan.

Fungsi militer sebagai Bayangkari Negara dengan semboyan “*back to basic*”, kembali pada tugas-tugas awal sebagai Tentara Rakyat (berasal dari rakyat, untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat). Jatidiri militer selaku Bayangkari Negara sebagai stimulator dalam proses pembangunan mempunyai tugas-tugas pokoknya ialah:¹¹⁵

1. Melindungi rakyat dan negara.,
2. Sebagai perwakilan dari rakyat yang menuntut hak-haknya sebagai warganegara yang bermartabat.

¹¹³ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 24-33.

¹¹⁴ Indria Samego. 2000. *TNI di Era Perubahan*. Penerbit Erlangga. Jakarta. hlm 3

¹¹⁵ Kartini Kartono. *op.cit.* hlm 16.

3. Memberantas anarkhi dan macam-macam disfungsi sosial.
4. Menangkal subversi, menegakkan dan meluruskan semua system sosial, politik, ekonomi yang ada.

b) Mengamankan pergolakan di daerah

Munculnya Angkatan Darat sebagai kekuatan politik sebenarnya berawal dari diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 27 Oktober 1955. Program pertama yang dilakukannya adalah pemantapan dan konsolidasi intern terutama terhadap komandan-komandan militer regional. Namun ada tantangan yang muncul yaitu timbulnya pembangkangan beberapa panglima daerah pada pertengahan tahun 1956 yang kemudian berlanjut menjadi pemberontakan-pemberontakan daerah. Pergolakan-pergolakan daerah ini pada akhirnya dapat diatasi. Usaha Angkatan Darat dalam mengatasi permasalahan daerah itu berhasil sehingga memperkuat posisi Angkatan Darat untuk mndekatkan hubungannya dengan Presiden Soekarno.

Pergolakan-pergolakan politik yang berlangsung membuat Soekarno harus bersandar pada kekuatan yang mampu mencegah terjadinya disintegrasi. Pada masa itu kekuatan yang mampu mencegah dan memadamkan pergolakan adalah tentara. Oleh karena itu Soekarno memerlukan Angkatan Darat. Setelah perlawanan daerah diatasi, maka

Angkatan Darat mengadakan konferensi Komando Daerah Militer pada bulan Agustus 1958. Konferensi itu mengeluarkan:¹¹⁶

1. Perlunya perbaikan-perbaikan di bidang militer.
2. Perbaikan-perbaikan di bidang politik, ekonomi dan ketertiban pada umumnya.

Angkatan Darat sebagai kekuatan politik selalu mengakui sebagai penyelamat negara, baik dalam menghadapi kekuasaan asing maupun pemberontakan yang terjadi di dalam negeri. Kesuksesan yang dicapai oleh Angkatan Darat dalam menjalankan tugasnya telah memberikan prestise yang tinggi dan kedudukannya yang kuat bagi Angkatan Darat. Angkatan Darat tidak menyukai system parlementer karena terbukti dengan system itu Indonesia tidak berhasil mengatasi *post revolutionary problems*, tidak efektif dan korup.

Sejak tahun 1957-1958 Angkatan Darat telah menunjukkan diri sebagai *component* yang sangat kuat setelah berhasil menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta (lihat lampiran 7) dalam waktu yang begitu singkat. Keberhasilan itu telah membuat prestise ABRI khususnya Angkatan darat naik dan menyebabkan orang lupa akan kericuhan yang terjadi. Pada perkembangan selanjutnya ternyata Angkatan Darat merupakan salah satu kekuatan sosial politik yang sangat menentukan nasib negara dan bangsa Indonesia.¹¹⁷

¹¹⁶ G. Moedjanto, *Demokrasi Terpimpin. Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah. Seri XV no 1. op.cit.* hlm 8

¹¹⁷ G. Moedjanto. 1989. *Indonesia abad ke 20. jilid II.* Kanisius. Yogyakarta. hlm 107.

Pada tanggal 14 Maret 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyampaikan permintaan berhenti dan sekaligus menandatangani pemberlakuan Undang-Undang Darurat di seluruh Indonesia. Penyebab utama keadaan ini adalah kemerosotan hubungan daerah-pusat, yang berujung pada pecahnya berbagai pemberontakan daerah oleh para komandan militer yang melahirkan pemberontakan PRRI/ Permesta di Sumatera dan Sulawesi.¹¹⁸

c) Masalah Irian Barat

Kegagalan untuk mencapai persetujuan mengenai masalah Irian Barat telah menggelorakan semangat anti-Belanda. Presiden Soekarno telah berulang kali dalam berbagai kesempatan menyatakan ingin memasukkan Irian Barat dalam negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno dalam pidato proklamasi tanggal 17 Agustus 1952 menyatakan selama Irian Barat masih dikuasai Belanda maka akan menghambat persatuan, iklim baik, pembangunan ekonomi serta melukai rasa kebangsaan dan nasionalisme.¹¹⁹

Pemerintah akhirnya secara sepihak memutuskan untuk membatalkan Perjanjian KMB tanggal 13 Desember 1956. Setelah terjadi pembatalan perjanjian tersebut para pemuda dari berbagai organisasi dan partai politik serta buruh melancarkan demonstrasi menentang keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan-perusahaan Belanda dipandang sebagai bagian dari kekuasaan politik kolonial Belanda.

¹¹⁸ Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm 190-198.

¹¹⁹ Soekarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi jilid II*. Panitia Dibawah Bendera Revolusi. Jakarta. hlm 260-261.

Pada awal tahun 1957, keadaan politik Indonesia semakin runyam dimana muncul ketidakpuasan daerah terhadap pusat yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan daerah. Sikap Soekarno pada masa itu menampakkan keinginannya untuk campur tangan dalam pemerintahan dengan caranya sendiri. Kemudian pada akhir tahun 1958, Angkatan Darat dan Soekarno telah menguasai panggung politik.

Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta yang kemudian disusul oleh aksi pemogokan total buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Tanggal 2 Desember 1957 pemerintah Indonesia melarang beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda, kemudian maskapai penerbangan Belanda dilarang mendarat dan terbang diatas wilayah Indonesia.¹²⁰

Pada tanggal 17 Agustus 1960 Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.¹²¹ Untuk lebih meningkatkan perjuangan, maka Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikorra) yang diucapkan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi dari Trikorra tersebut adalah:¹²²

- 1) Untuk menggagalkan pembentukan Negara boneka Papua.
- 2) Untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di Irian Barat.
- 3) Untuk bersiap-siap bagi Mobilisasi Umum.(lihat lampiran 8)

¹²⁰ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 50.

¹²¹ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *op. cit.* hlm 336.

¹²² Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm 276.

Kedudukan politik Angkatan Darat semakin diperkuat bersamaan dengan perkembangan kampanye pembebasan Irian Barat yang bergeser dari upaya-upaya diplomatik ke upaya-upaya militer. Pada bulan Desember 1961, Soekarno membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Koti) yang berada di bawah pimpinannya sendiri, dan Nasution sebagai wakil dan Mayor Jenderal Yani sebagai Kepala Staf: bagian operasi ditempatkan ke Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat. Adapun susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat adalah sebagai berikut:¹²³

- 1) Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat:
Presiden/ Panglima Tertinggi Soekarno.
- 2) Wakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution.
- 3) Kepala Staf : Mayor Jenderal Achmad Yani.

Sedangkan susunan Komando Mandala adalah:

- 1) Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.
- 2) Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono.
- 3) Wakil Panglima II : Letkol Udara Leo Wattimena.
- 4) Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir.

Soekarno mengintruksikan para kepala staf Angkatan untuk mempersiapkan diri bagi aksi militer di Irian Barat. Oleh karena tekanan militer Indonesia berupa pendaratan para penyusup ke hutan-hutan di Irian Barat dan tekanan diplomatik Amerika Serikat terhadap Belanda, akhirnya

¹²³ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *op. cit.* hlm 338.

persetujuan dapat dicapai antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962 yang dengan segera menyerahkan perurusan Irian Barat kepada PBB.¹²⁴ (lihat lampiran 9)

PBB pada tanggal 1 Oktober 1962 mengambil alih Irian Barat untuk jangka waktu tujuh bulan. Dari badan inilah kekuasaan atas Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. (lihat lampiran 10) Setelah Indonesia mengambil alih administrasi atas wilayah Irian Barat, maka suatu “Penentuan Pendapat Rakyat” yang akan diadakan tahun 1969 di kalangan penduduk Irian Barat pada akhirnya akan menentukan wilayah Irian Barat akan tetap dalam lingkungan Republik Indonesia.¹²⁵ Dengan itu, kampanye berakhir dan Indonesia keluar sebagai pemenang dan bersamaan dengan itu pula martabat tentara di tingkatkan.

B. Bidang Ekonomi

➤ **Adanya Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing**

Pada bidang Ekonomi, pihak Angkatan Darat mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal ini dimulai dengan adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, dimana nasionalisasi perusahaan asing ini ditetapkan dibawah penguasaan militer selaku pemegang Undang-Undang Darurat Perang. Sejak akhir tahun 1950-an kedudukan militer mulai menguat yaitu dengan mengambil alih jabatan sipil.¹²⁶

¹²⁴ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 48-53.

¹²⁵ Ulf Subdhaussen. *op.cit.* hlm 277.

¹²⁶ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 308.

Pada masa Kolonial Hindia Belanda, sektor ekonomi modern Indonesia sebagian besar dikuasai oleh modal asing, khususnya negeri Belanda. Kegiatan ekonomi itu mengalami kemunduran pada masa pendudukan Jepang. Hal itu dikarenakan penerapan ekonomi perang oleh pemerintah pendudukan Jepang yang melarang kegiatan ekspor dan impor kecuali untuk kepentingan perang. Dalam keadaan demikian tidak mengherankan jika selama masa pendudukan Jepang tidak ada investasi asing yang masuk.

Keadaan itu tidak banyak berubah sampai Indonesia mendapat penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja keluar dari kemelut revolusi kemerdekaan segera memikirkan masalah pembangunan ekonomi. Namun pelaksanaan pembangunan ekonomi memenuhi hambatan karena penguasaan perusahaan pribumi terhadap sektor ekonomi modern masih sangat terbatas. Situasi demikian menuntut pemerintah mengambil sikap tegas terhadap keberadaan modal asing yang masih tetap beroperasi.

Kondisi ekonomi dan politik yang belum stabil pasca kemerdekaan menyebabkan alokasi dana yang diberikan angkatan perang sangat terbatas. Sementara kalangan militer sangat membutuhkan dana yaitu untuk pembelian senjata dan kesejahteraan prajurit. Berbagai usaha pencarian dana dilakukan, salah satunya yang populer adalah penyelundupan dan perdagangan candu yang hasilnya ditukarkan dengan

senjata dan kebutuhan lainnya. Penyulundupan ini dilakukan tentara Indonesia karena kuatnya blockade Belanda.¹²⁷

Sikap pemerintah Indonesia terhadap modal asing sepanjang tahun 1950-an sangat kuat dipengaruhi pengalaman zaman Kolonial Hindia Belanda. Pandangan yang berlaku terhadap modal asing, khususnya modal Belanda, secara umum melihat kehadiran mereka menjadi penghambat bagi terwujudnya kedaulatan di bidang ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari peranan modal asing yang sampai saat itu dijalankan hanya untuk menarik keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dari Indonesia, tanpa turut berpartisipasi dalam perbaikan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara umum.

Sikap tidak peduli para pemilik modal asing pada akhirnya memunculkan sikap tidak suka dari kalangan orang-orang republik. Tidak mengherankan pula jika sikap pemerintah Indonesia terhadap modal asing menjadi tidak terlalu bersahabat. Apalagi hampir sepanjang kurun 1950-an sektor-sektor modern ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam situasi demikian, mengemukakan pendapat yang mendesak pemerintah Indonesia untuk secara bertahap mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dan sekaligus mendorong munculnya pengusaha-pengusaha pribumi Indonesia.

Selaras dengan konsolidasi politik pasca penyerahan kedaulatan yang menitik-beratkan unsur-unsur nasional, di bidang ekonomi

¹²⁷ Indria Samego. 1998. *Bila ABRI Berbisnis*. Mizan. Bandung. hlm 45.

dusahakan untuk merombak struktur perekonomian yang sampai saat itu masih bercorak kolonial. Struktur ekonomi kolonial dengan sendirinya tidak mendukung sifat berdaulat dari negara Indonesia yang telah merdeka. Sedangkan tujuan dari kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai masyarakat yang demikian, maka perombakan ekonomi nasional menjadi keharusan.¹²⁸

Dalam rangka membangun ekonomi nasional, prakarsa pemerintah Indonesia dilakukan dengan mendirikan beberapa badan usaha untuk mengatasi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam bidang perbankan pada tahun 1946 pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI 1946) yang diharapkan mampu bersaing dengan bank-bank komersial Belanda. Keputusan untuk mendirikan BNI dilakukan dalam sidang pertama Dewan Menteri Republik Indonesia pada tanggal 19 September 1945 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Proses pengembalian perusahaan-perusahaan Belanda tersebut juga dipandang sebagai perwujudan dari kedaulatan politik yang dicapai. Sebelum diberlakukannya undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, pengambilalihan milik asing yang ada di Indonesia secara hukum diatur dalam *Onteigeningsordonantie* (peraturan penyitaan hak milik) tahun 1920.

¹²⁸ Bondan Kanumoyoso. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2001. hlm 42.

Menurut *Onteigeningsdonantie* prosedur penyitaan hak milik dijalankan melalui tahap-tahap yang tersebut di bawah ini:¹²⁹

1. Yang berkepentingan diberi kesempatan memajukan keberadaan terhadap *onteigening* yang akan dijalankan.
2. Dengan undang-undang diadakan pernyataan bahwa kepentingan umum menuntut diadakannya *onteigening* dari benda-benda yang ditentukan.
3. Dijalankan usaha untuk mendapatkan benda-benda tersebut dengan jalan sukarela.
4. Jika usaha tersebut angka 3 gagal, dimajukan tuntutan kepada hakim, agar hakim menempatkan di-*onteigeningnya* benda tersebut dan menetapkannya besarnya pengganti kerugian.
5. Pemindehan milik benda tersebut ke tangan yang minta *onteigening*, setelah pengganti kerugian dibayar.

Pemberlakuan Undang-Undang darurat Perang menyebabkan peran militer semakin besar dalam bidang politik dan ekonomi.¹³⁰ Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ini membuat militer terlibat aktif dalam pergolakan ekonomi. Perwira-perwira militer banyak yang ditugaskan untuk memimpin perusahaan tersebut. Penugasan ini dalam rangka pengamanan terhadap usaha penguasaan buruh yang tergolong dalam SOBSI. Pemimpin Angkatan Darat yakni Jenderal Ahmad Yani berusaha menangkal pengaruh SOBSI dengan mendirikan SOKSI (Serikat

¹²⁹ *Ibid.* hlm 45.

¹³⁰ M. Najib. Azca. 1998. *Hegemoni Tentara*. LKIS. Jakarta. hlm 71.

Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) yang diketuai Mayor Suhardiman.

Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang berhaluan komunis mempelopori dalam aksi pengambilan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Gerakan pertama dilancarkan oleh kaum buruh dari *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), sebuah perusahaan perkapalan Belanda yang melayani hubungan inter insuler secara ekonomi. Perusahaan ini didirikan tahun 1888 untuk mengatasi masalah pengangkutan barang dan modal dari Belanda seiring dilaksanakannya politik pintu terbuka di Indonesia. Setelah dibubarkannya tanam paksa tahun 1870, Belanda berkeyakinan bahwa kapal tradisional Indonesia tidak siap membawa banyak barang, maka mereka membentuk perusahaan perkapalan KPM.¹³¹

Selain KPM, perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan adalah perusahaan-perusahaan tembakau yang besar antara lain: *N.V. Verenigde Deli Mij*, *N.V. Senembah Mij*, *N.V. Landouw Oud Djember Mij*. Bank-bank milik Belanda juga dinasionalisasikan, antara lain *National Handelsbank* (Bank Bumi Daya), *Escomptobank* (Bank Dagang Negara) dan *Nederlandsche Handelmaatschappij* yang kemudian berganti nama menjadi Bank Koperasi tani dan Nelayan (BKTN).

BKTN ini akhirnya dipecah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Ekspor Indonesia (Bank Exim). Perusahaan-perusahaan

¹³¹ Bondan Winarno. *Dari Gelombang ke Gelombang. Majalah Swa*. Edisi 12 Maret 1988. hlm 28.

asuransi Belanda yang dinasionalisasikan yaitu Nederlanden 1845 dan Nederlandse Lloyd.¹³² Perusahaan angkutan Darat yang dinasionalisasikan yaitu di antaranya *Nederlansch Indische Spoorwegmaatscappij*, perusahaan kereta api terpenting dan terpanjang yang beroperasi di seluruh Jawa.

Pemerintah akhirnya membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) dengan tujuan mengatur pelaksanaan nasionalisasi yang diketuai oleh Perdana Menteri Djuanda. Setelah dikenakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang sebagian menjadi hak milik orang asing bukan warga negara Belanda dan dianggap vital akan menjadi perusahaan negara, sedang modal dimiliki oleh perusahaan asing bukan warganegara Belanda tersebut akan diberi ganti rugi.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda sebenarnya pelanggaran terhadap Perjanjian KMB. Pemerintahan Hatta sesuai dengan Perjanjian KMB memberikan perlindungan sepenuhnya kepada modal Belanda di Indonesia serta perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, perbankan, perkapalan dan penerbangan.¹³³

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ini membuat militer terlibat aktif dalam pengelolaan ekonomi. Perwira-perwira militer banyak yang ditugaskan untuk memimpin perusahaan tersebut. Penugasan

¹³² J. Panglakim. *op. cit.* hlm 16.

¹³³ Herbert Feith. *op.cit.* hlm 11

ini dalam rangka pengamanan terhadap usaha penguasaan perusahaan buruh yang tergabung dalam SOBSI. Pemimpin Angkatan Darat yakni Jenderal Ahmad Yani berusaha menangkal pengaruh SOBSI dengan mendirikan SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Swadaya Indonesia) yang diketuai oleh Mayor Suhardiman.

Semua perusahaan yang telah dinasionalisasikan ditetapkan di bawah penguasaan militer selaku pemegang Undang-Undang Darurat Perang. Sejak akhir tahun 1950-an kedudukan militer mulai menguat yaitu dengan mengambil alih jabatan sipil. Pemerintah Indonesia setelah bulan September 1958 juga mengambil alih beberapa perusahaan Cina yang dinyatakan sebagai simpatisan pemerintah Taiwan yang telah membantu pemberontakan PRRI/ Permesta.

Para pemimpin Angkatan Darat berpendapat bahwa pemerintah militer akan menjamin terpeliharanya kestabilan politik yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Mereka berharap stabilitas akan mendorong investasi baik dari luar maupun dari dalam negeri yang makin besar di sektor-sektor perekonomian yang modern, seperti dalam industri-industri ekstraktif, pabrik-pabrik besar dan perdagangan. Peranan pemerintah sebagian besar dilihat dalam arti menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi penggunaan kesempatan-kesempatan berdagang yang baru bagi para penanam modal asing dan kepentingan para pengusaha Indonesia. Dalam jangka panjang pembangunan ekonomi diharapkan akan dapat menaikkan taraf hidup umum sebagian besar rakyat.

Dengan demikian konsep Angkatan Darat mengenai pembangunan ekonomi terutama diarahkan kepada kepentingan-kepentingan kaum elit dan pegawai-pegawai kantor kelas menengah. Dalam situasi yang baru para perwira militer yang telah berpengalaman dalam kegiatan perdagangan dan birokrasi selama masa Demokrasi Terpimpin, dengan mudah menyesuaikan diri untuk mengambil keuntungan dari kebijakan baru yang di perkenalkan setelah tahun 1966.

Perluasan kesempatan berdagang penting sekali bagi peranan Angkatan Darat sebagai stabilisator. Pemimpin-pemimpin Angkatan Darat mengetahui bahwa adalah penting meluaskan kesempatan mencari uang oleh tentara. Angkatan Darat berusaha untuk mencari dana untuk menambah apa yang tersedia dari anggaran belanja negara, sedangkan banyak perwira diperbolehkan bekerja untuk tujuan ekonomi masing-masing guna menambah pendapatan dari gaji.¹³⁴

Pada awal Orde Baru, keterlibatan ABRI dalam hal ini Angkatan Darat dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menjamin pengaliran dana yang tetap ke kas Angkatan Darat tanpa menimbulkan kekacauan ekonomi. Untuk itu para perwira Angkatan Darat banyak ditugaskan di berbagai sektor usaha negara yang dianggap akan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Perusahaan minyak negara, yang pada tahun 1957 bernama Permina. Permina yang didominasi oleh Angkatan Darat, pada tahun 1968 berubah menjadi Pertamina. Pertamina merupakan salah satu

¹³⁴ *Ibid.* hlm 309.

BUMN yang dipakai Angkatan Darat untuk mengisi kas mereka. Dalam tahun 1960-an, penghasilan dari sektor minyak merupakan segitiga dari penghasilan ekspor negara.¹³⁵

Militer mendapat keuntungan secara ekonomi setelah adanya program nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada bulan Desember 1957. Hal ini menyebabkan dengan adanya Undang-Undang darurat Perang penguasa militer berhak menetapkan peraturan yang dipandang perlu untuk kepentingan ketertiban umum dalam negeri dan mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu.¹³⁶ Selain itu juga pada tahun 1956-1958, yang ditandai percobaan kudeta di Jawa barat, pembakangan terang-terangan terhadap pemerintah pusat di daerah-daerah luar Jawa, serta perselisihan di kalangan luas dalam Angkatan Darat merupakan krisis kepemimpinan yang paling besar yang pernah dialami TNI.

Dari berbagai macam sumbangan Angkatan Darat tersebut, diantaranya yaitu mampu menerapkan dwifungsi ABRI dan berhasil mengatasi stabilitas politik Sumbangan tersebut digunakan untuk perkembangan Angkatan Darat maupun untuk kemajuan pemerintah.

¹³⁵ Indria Samego. 1998. *Bila ABRI menghendaki. Desakan kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Penerbit Mizan. Bandung. hlm 120.

¹³⁶ Basarudin Nasution. 1957. *S.O.B. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Keadaan Perang Dan Keadaan darurat Perang*. Fasco. Jakarta. hlm 68.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan jawaban permasalahan-permasalahan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

Salah satu faktor yang mendorong latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin adalah kekecewaan terhadap Demokrasi Parlementer. Pada masa Demokrasi Parlementer terjadi pergantian kabinet dalam waktu yang singkat, terjadi juga pergolakan-pergolakan di daerah. Angkatan Darat bertujuan menjaga stabilitas dan dinamisator kehidupan politik Indonesia. Untuk mengatasi hal ini Angkatan Darat mengusulkan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, karena Demokrasi Terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang kuat dan berwibawa yang pada akhirnya akan sanggup mengakhiri krisis poltik serta memulihkan ketertiban negara.

Selain itu juga Angkatan Darat mempunyai kepentingan untuk menjaga pertahanan dan keamanan daerah. Tentara bertugas menciptakan rasa aman, mengamankan dan melanjutkan pembangunan nasional serta menjamin keutuhan, kedaulatan, identitas dan integritas nasional. Pada pemerintahan Angkatan Darat duduk dalam kursi pemerintahan.

Setelah berlakunya dekrit ini, keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer. Nasution sendiri menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan yang

memberikannya wewenang melakukan koordinasi antara Departemen Pertahanan, Peradilan, Kepolisian dan Urusan Veteran sekaligus tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ia juga berhak membatalkan pengangkatan kaum Komunis ke Kabinet Kerja. Ketika Soekarno mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royang pada tahun 1960, 35 dari 283 anggotanya adalah ABRI.

Soekarno membutuhkan PKI sebagai penyeimbang Angkatan Darat untuk pembentukan Demokrasi Terpimpin. Soekarno punya kepentingan dengan Nasakom, sedangkan Nasution tidak. Nasution anti komunis, sedangkan Soekarno memerlukan PKI. Untuk mengimbangi PKI, Angkatan Darat mengkonsolidasi organisasi fungsional yang digabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Dengan organisasi itu, peran TNI dalam sosial politik yang sudah besar pada masa Demokrasi Terpimpin mendapat dukungan organisasi politik yang kuat pula.

Selain itu juga Angkatan Darat juga membutuhkan Soekarno untuk mendapatkan kursi di pemerintahan. Hal ini membuat Soekarno tidak senang kepada TNI, yang menentang Nasakom. Soekarno memanfaatkan PKI untuk mengimbangi kekuatan tentara. Soekarno menganggap Angkatan Darat sebagai kekuatan politik. Disamping itu, Presiden Soekarno juga mengatur keseimbangan kekuatan politik antara tentara dan PKI, dan berusaha tetap mengontrol agar salah satunya tidak lebih dominan dan Presiden tetap menjadi faktor penentu kebijakan.

Sumbangan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin, baik itu pada bidang politik, dan ekonomi. Pada bidang politik yaitu pertama dalam

Dwifungsi ABRI dan konsep jalan tengah yang dirumuskan Nasution, Angkatan Darat memiliki peranan rangkap yaitu sebagai kekuatan militer dan kekuatan social politik yang meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan.

Aplikasi Dwifungsi ABRI sendiri terlihat dari perannya yaitu sebagai innovator dan fasilitator untuk proses demokratisasi yaitu dengan menerapkan kepentingan nasional (kepentingan umum) diatas kepentingan pribadi. Peranan ABRI sebagai pelindung dan pembela rakyat, karena TNI/ ABRI memang betul-betul merupakan kekuatan rakyat, berasal dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat serta kesejahteraan bersama. Selain itu juga Angkatan Darat menciptakan stabilitas politik yaitu menjaga pertahanan dan keamanan, berhasil mengamankan pergolakan di daerah dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya PPR (Penentuan Pendapatan Rakyat).

Pada bidang ekonomi Angkatan Darat berhasil menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Pemberlakuan Undang-Undang Darurat Perang menyebabkan peran militer semakin besar dalam bidang politik dan ekonomi. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ini membuat militer terlibat aktif dalam pergolakan ekonomi. Perwira-perwira militer banyak yang ditugaskan untuk memimpin perusahaan tersebut. Penugasan ini dalam rangka pengamanan terhadap usaha penguasaan buruh yang tergolong dalam SOBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia). Pemimpin Angkatan Darat yakin Jenderal Ahmad Yani berusaha menangkal pengaruh SOBSI dengan mendirikan SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Swasta Indonesia) yang diketuai Mayor Suhardiman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel Fattah.

2005. *Demiliterisasi Tentara. Pasang Surut Politik Militer 1945-2004.*

LKIS. Yogyakarta

Adnan Buyung Nasution.

1955. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia. Studi Sosial-Legal Konstituante 1956-1959.* terj. Sylvia Tiwan. Pustaka Utama Grafik.

Jakarta.

Abdul Haris Nasution.

1971. *Kekaryaan ABRI.* Seruling Masa. Jakarta

Arif Budiman.

1991. *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan.* Yayasan Padi dan Kapas. Jakarta.

Barbara Sillars Harvey.

1989. *Permesta Pemberontakan Setengah Hati.* Pustaka Utama Grafity.

Jakarta.

Basarudin Nasution.

1957. *S.O.B Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Keadaan Perang dan Keadaan Darurat Perang.* Fasco. Jakarta.

Bilveer Singh.

1995. *Dwifungsi ABRI. Asal-usul Akutualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Bimo Walgito.

1978. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Andi Offset. Yogyakarta

Bondan Kanumoyoso.

2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Bondan Winarno.

1988. *Dari Gelombang ke Gelombang*. Majalah Siwa. Edisi 12 Maret.

Budi Santoso, SJ, dkk.

1995. *ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995*. Kanisius. Yogyakarta.

Crouch, Harold.

1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.

Dahm, Bernhard.

1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. LP3ES. Jakarta.

Djadji Darmowijoyo.

1964. *Uraian Manipol*. Majelis Umum Taman Siswa. Yogyakarta.

Feith, Herbert.

1995. *Soekarno dan Demokrasi Terpimpin*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Gottschalk, Louis.

1985. *Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notokusanto*. UI Press. Jakarta.

Hidayat Mukmin.

1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri. Studi Kasus Penelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Hendri Supriyatmono.

1994. *Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi kearah Reformasi Politik*. Pustaka Nusantara. Yogyakarta.

Indria Samego.

1998. *Bila ABRI Menghendaki. Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Penerbit Mizan. Bandung.

2000. *TNI Di Era Perubahan*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

1998. *Bila ABRI Berbisnis*. Mizan. Bandung.

Panglakim, J.

1983. *Perusahaan Negara dan Swasta*. LKIS. Jakarta.

Kartini Kartono.

1996. *ABRI dan Permasalahannya. Pemikiran Reflektif Perananan ABRI di Era Pembangunan*. Mandar Maju. Bandung.

Kuntowijoyo.

1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya. Yogyakarta.

Legge. J. D.

1985. *Soekarno Sebuah Biografi Politik*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Saleh, R.H.A.

1995. *Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong*. Pustaka Nusantara. Yogyakarta.

Najib, M Azca.

1998. *Hegemoni Tentara*. LKIS. Jakarta.

Moedjanto, G.

1988. *Demokrasi Terpimpin*. Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah. Seri XV no 1. Sanata Dharma. Yogyakarta.

1989. *Indonesia abad ke 20 jilid II*. Kanisius. Yogyakarta.

Mohamad Mahfud.

1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Nazaruddin Syamsuddin.

1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Rajawali Press. Jakarta.

Nugroho Notosusanto (ed).

1983. *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Sinar Harapan. Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S.

1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Saifuddin Azwar

2005. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Salichin Salim.

1966. *Bung Karno Putera Fajar*. Gunung Agung. Jakarta.

Sartono Kartodirjo.

1989. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Gramedia.

1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*.

Jakarta. Penerbit: PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Salim Said.

2001. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Soebijono, dkk.

1992. *Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam kehidupan Politik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Soekarno.

1964. *Dibawah Bendera Revolusi. Jilid II*. Panitia Di bawah Bendera Revolusi. Jakarta.

Soelistyati Ismail Gani.

1984. *Pengantar Ilmu Politik*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sundhaussen, Ulf.

1982. *Politik militer Indonesia 1947-1967. Menuju Dwi Fungsi ABRI.*

Penerbit LP3ES. Jakarta.

Syah Muhibin.

Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru. PT Remaja. Bandung.

Tahi Bonang Simatupang.

1954. *Pelopor Dalam Perang. Pelopor Dalam Damai.* Jajasan Pustaka

Militer. Jakarta.

Tatang Sumarsono dan Didi Kartasasmita.

1993. *Pengabdian bagi Kemerdekaan.* Dunia Pustaka. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa.

1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Balai Pustaka. Jakarta.

Tut Setyohadi.

2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa.* Jakarta.

Winkel, W.S.

1983. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar.* Gramedia. Jakarta.

Yahya. A. Muhaimin.

1982. *Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966.* Gadjah

Mada University. Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

Lampiran 1

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA
TERINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghindari siding, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayai oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA
TERINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran konstituante.

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas nama Rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/ Panglima
Tertinggi Angkatan Perang

Sumber : Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*.

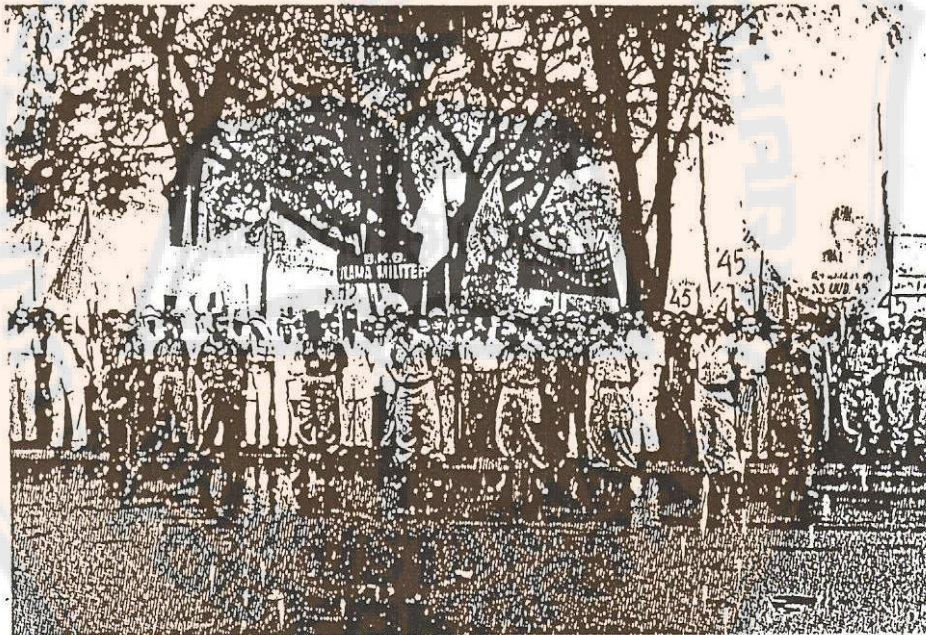
Jakarta. Penerbit: PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Lampiran 2

Suasana di muka Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959.

Masa rakyat mendengarkan Dekrit Presiden kembali
ke Undang-Undang Dasar 1945

Lengkapya Dekrit Presiden tersebut berbunyi sebagai berikut.

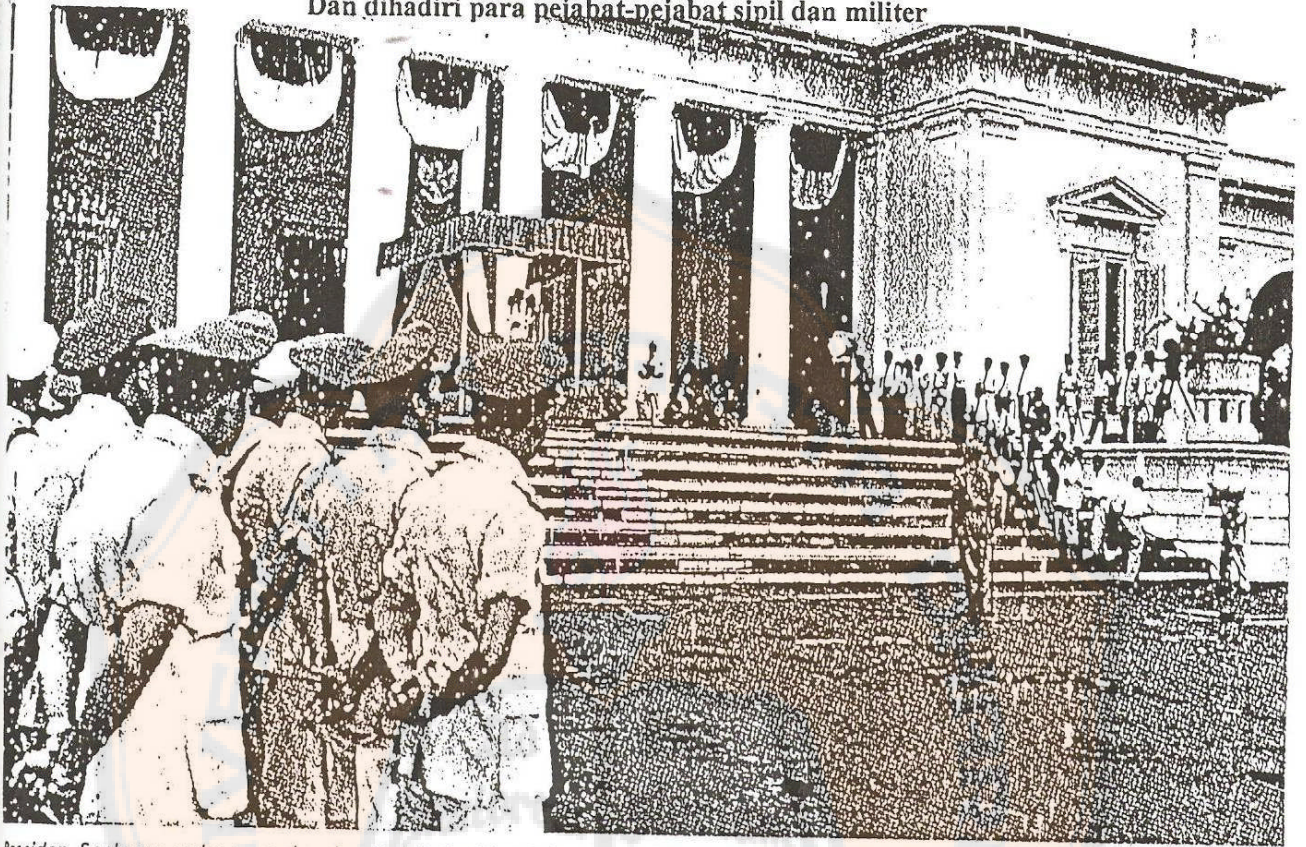


Suasana di muka Istana Merdeka
tanggal 5 Juli 1959. Massa rakyat
mendengarkan Dekrit Presiden kembali
ke Undang-Undang Dasar 1945.

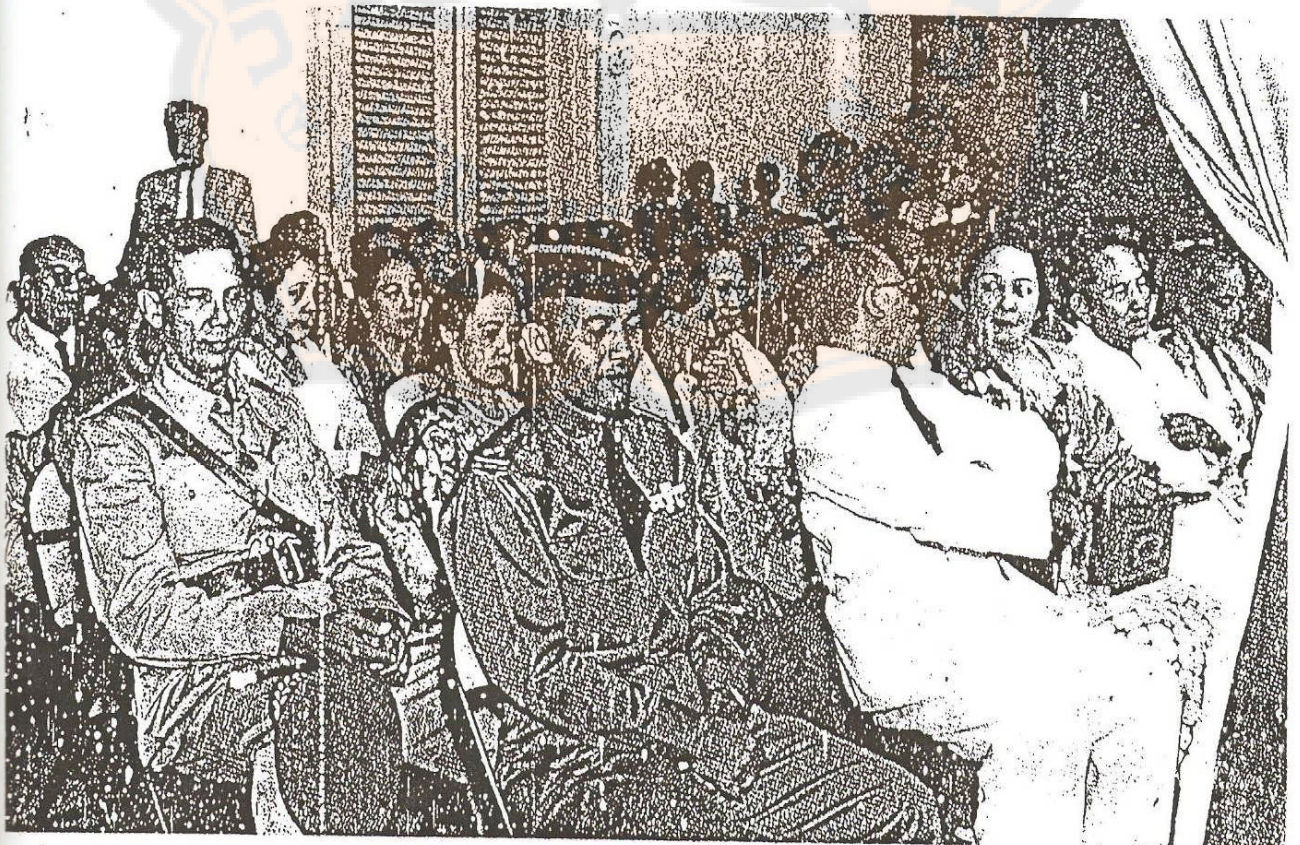
Sumber: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*.
Jakarta. Penerbit: PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Preside Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dan dihadiri para pejabat-pejabat sipil dan militer



Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut hadir pejabat-pejabat sipil dan militer serta tokoh-tokoh masyarakat (gambar bawah).



Lampiran 4
Foto Presiden Soekarno



Sumber: [www. Pahlawan Revolusi. Com](http://www.PahlawanRevolusi.Com)

Lampiran 5

Foto Abdul Haris Nasution



Sumber: [www. Pahlawan Revolusi. Com](http://www.PahlawanRevolusi.Com)

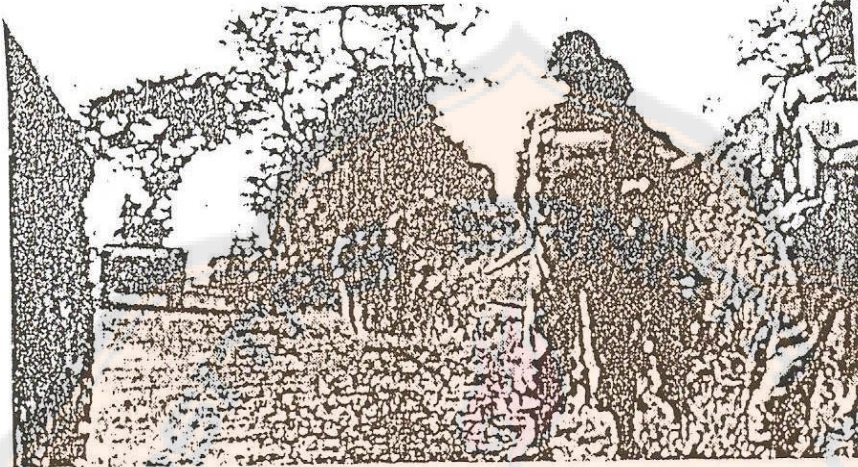
Lampiran 6

Foto Jenderal Ahmad Yani



Sumber: [www. Pahlawan Revolusi. Com](http://www.PahlawanRevolusi.Com)

Lampiran 7



Operasi ABRI melawan Pemberontakan PRRI di Sumatra Tengah.

Perustakaan HANKAM



ABRI menjelang operasi melawan Pemberontakan PRRI.

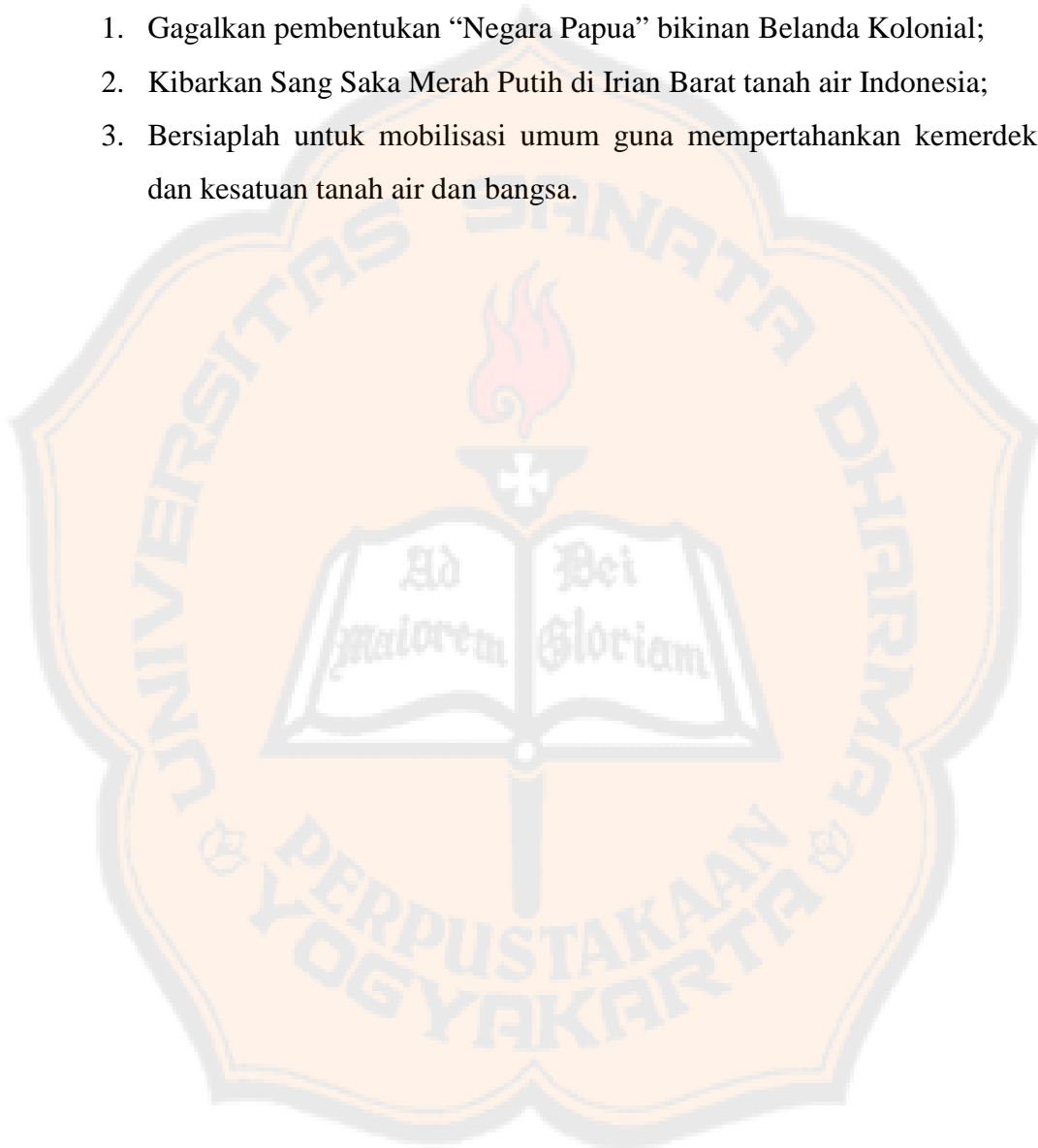
Perustakaan HANKAM

Sumber: Biveer Singh. 1995. *Dwifungsi ABRI: Asal-usul Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lampiran 8

Tri Komando Rakyat

1. Gagalkan pembentukan “Negara Papua” buatan Belanda Kolonial;
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.



Lampiran 9

**NASKAH RENTJANA RESOLUSI PADA DAN TELAH DITERIMA
OLEH JANG DIAJUKAN PADA DAN TELAH DITERIMA OLEH
MAJELIS UMUM P.B.B.
PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 1962.**

Madjelis Umum, menimbang bahwa Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Belanda telah menjelesaikan pertikaian mereka mengenai New Guinea Barat (Irian Barat).

Mentjatat dengan penghargaan usaha-usaha jang berhasil daripada Pedjabat Sekretaris Djenderal untuk mewujudkan penjelesaian setjara damai ini.

Setelah memahami persetujuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Belanda tentang New Guinea Barat (Irian Barat).

1. Memperhatikan persetudjuan itu;
2. Mengakui peranan jang diserahkan kepada Sekretaris Djenderal di dalam persetudjuan itu;
3. Mengusahakan kepada Sekretaris Djenderal untuk melaksanakan tugas jang dipertjajakan kedanja di dalam persetudjuan.

**PERNJATAAN PENDAPAT DPR-GR TENTANG PERSETUJUAN
INDONESIA-NEDERLAND MENGENAI PENJERAHAN IRIAN BARAT
KEPADA REPUBLIK INDONESIA**

Dewan Perwakilan rakyat gotong royong dalam rapat plenonya tanggal 1 September 1962,

Mendengar:

- a. Keterangan Pemerintah yang diucapkan oleh Wakil Menteri Pertama/ Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam rapat gabungan Komisi-Komisi dan rapat kerja gabungan Komisi A dan C DPR-GR pada tanggal 31 Agustus 1962 mengenai persetujuan Indonesia-Nederland mengenai penjerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia;
- b. Pendapat dan pandangan Golongan-golongan dalam DPR-GR.

Mengingat:

- a. Ketetapan MPRS no. I/ 1960;
- b. Trikora;
- c. Pidato P.J.M. Presiden/ Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul „ Tahun Kemenangan”.

Menimbang:

Bahwa Persetujuan Indonesia-Nederland yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 1962 dapat dipergunakan sebagai alat perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Memutuskan:

1. Membenarkan dan menyetujui kebijaksanaan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Besar Revolusi dalam menerima persetujuan Indonesia-Nederland yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia dan tetap memberi kepastiaan sepenuhnya kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya;
2. Mengajak dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk lebih memperkuat persatuan dan mempertinggi kewaspadaan nasional.

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong;

(ttt.) H.Z. Arifin
Ketua

(ttt.) Mr. Djoko Soemarjono
Sekretaris

PERINTAH

Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat

Tentang

PENGHENTIAN PERMUSUHAN
BELANDA-INDONESIA

- I. Berdasarkan persetujuan Republik Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 jam 21.00 GMT permusuhan dihentikan pada tanggal 18 Agustus 1962 jam 00.01 GMT atau tanggal 18 Agustus 1962 jam 09.31 waktu Irian Barat;
- II. PERINTAH:
 1. Hentikan tembak-menembak dan permusuhan mulai tanggal 18 Agustus 1962 jam 09.31 waktu Irian Barat;
 2. Adakah konsolidasi kedalam dan tetap waspada;
 3. Siapkan diri untuk menerima perintah lebih lanjut untuk tugas-tugas baru di Irian Barat;
- III. Dengan ini disertakan kutipan perintah Belanda kepada pasukannya;
- IV. SELESAI

DJAKARTA, 16 AGUSTUS 1962

PRESIDEN/ PANGLIMA TERTINGGI APRI
PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI
PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Kepada
Semua Gerilyawan Indonesia
Di Daratan Irian Barat

**KUTIPAN PERINTAH UNTUK TENTARA BELANDA
SETELAH PENGHENTIAN TEMBAK-MENEMBAK**

1. Situasi

- A. Gentjatan sendjata semendjak tanggal 18 Agustus djam 00.01 GMT (7.30 djam Djawa).
- B. Setelah waktu tersebut tugas tentara Belanda merupakan tugas polisi belaka.
Mempergunakan sendjata hanja diperbolehkan kalau terpaksa mempertahankan diri, untuk menjelamatkan objek-objek militer dan instalasi-instalasi pemerintah dan pula untuk melindungi penduduk dan mendjaga tata-tertib (keamanan) atas permintaan pemerintah sipil.
- C. Hindari segala insiden-insiden.
Tiap adanja kedjadian-kedjadian (insiden-insiden) baru, termasuk infiltrasi Indonesia harus segera dilaporkan kepada Panglima Tentara Belanda di Irian Barat dan pula kepada wakil P.B.B. bila ada.
Menggunakan sendjata dibatasi dengan peraturan-peraturan jang termaktub dalam pasal B.

2. Tugas (Missi).

Menaati peraturan-peraturan jang termaktub dalam pasal 1.

3. Pelaksanaan

Bila, setelah gentjatan sendjata jang berlaku semendjak tanggal 18 Agustus, djam 00.01 GMT, ada infiltrators jang hendak mentjari hubungan tanpa mempunjai maksud jang bermusuhan, harus bertindak sebagai berikut:

- Pertama : tentukan suatu titik pertemuan di luar tempat kedudukan sendiri.
- Kedua : kalau makanan/ atau obat-obatan diperluakan harap serahkan kepada Penindjau P.B.B. bila ada, kalau tidak harap berikan. asalkan dalam mengambilnja mereka dating tanpa bersendjata.
- Ketiga : Tiadakan infiltrators jang bersendjata kalau perlu dengan kekerasan dari daerah kita.

**KOMANDO MANDALA
PEMBEBASAN IRIAN BARAT**

PERINTAH

- I. Mengingat p-erintah Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat tanggal 16 Agustus 1962 tentang:
PENGHENTIAN PERMUSUHAN BELANDA-INDONESIA.
- II. Diperintahkan kepada:
Seluruh pasukan jang termasuk slagorde Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, jang di Daratan Irian Barat.
Untuk:
 - a. Menaati dan melaksanakan dengan penuh keinsyafan dan tanggung jawab perintah dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Belanda Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, tentang Penghentian Permusuhan Belanda-Indonesia.
 - b. Mengadakan Kontak dengan Perwira-Perwira penindjau P.B.B. terdekat jang disertai Perwira-Perwira penghubung dari fihak Indonesia jaitu;
 1. Brigadier Djenderal Achmad Wiranatakusuma.
 2. Kolonel Udara I. Dewanta.
 3. Letnan Kolonel Pelaut Nizam Zachman.
- III. Perbekalan akan segera diterdjunkan dari udara oleh Pesawat P.B.B., di daerah Droppings Zone baru setekah ada hubungan.
- IV. SELESAI

Dikeluarkan di: Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat
Pada tanggal : 25 Agustus 1962

SUHARTO

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSETUDJUAN

ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KERADJAAN NEDERLAND
MENGENAI
IRIAN BARAT

(Pemerintah) Republik Indonesia dan (Pemerintah) Keradjaan Nederland,

Mengingat kepentingan-kepentingan dan kesedjahteraan rakyat wilayah Irian Barat, jang selandjutnja disebut „wilayah”,

Berhasrat menjelesaikan persengketaan mereka mengenai wilayah tersebut, maka sekarang bersetudju seperti tersebut dibawah ini :

Pengesjahan Persetudjuan dan Resolusi Madjelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal I

Setelah Persetudjuan antara Indonesia dan Nederland sekarang ini ditanda-tangani dan disjahkan oleh kedua belah pihak, Indonesia dan Nederland akan bersama mengadakan rentjana resolusi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa jang mengandung ketentuan-ketentuan bahwa Madjelis Umum mentjatat Persetudjuan sekarang ini, memaklumi peranan Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Persetudjuan tersebut, dan memberikan kuasa kepada Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tugas-tugas jang dipertjajakan kepadanya dalam Persetudjuan ini.

Penjerahan Pemerintahan

Pasal II

Setelah resolusi termaktub dalam Pasal I diterima, Nederland akan menjerahkan pemerintahan diwilayah tersebut kepada Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Temporary Executive Authority: UNTEA), dibentuk oleh dan dibawah jurisdiksi Sekretaris Djenderal, pada saat tibanja Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa jang diangkat sesuai dengan Pasal IV. UNTEA selandjutnja akan menjerahkan pemerintahan kepada Indonesia sesuai dengan Pasal XII.

Pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal III

Untuk melantjarkan penjerahan pemerintahan kepada UNTEA setelah diterimanja resolusi oleh Madjelis Umum, Nederland akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengirimkan seorang wakil untuk mengadakan musjawarah singkat dengan Gubernur Nederland dari wilayah tersebut sebelum Gubernur tersebut berangkat.

Gubernur Nederland akan berangkat sebelum kedatangan Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal IV

Seorang Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang dapat diterima oleh Indonesia dan Nederland, akan diangkat oleh Sekretaris Djenderal.

Pasal V

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kepala pelaksana UNTEA, akan berkuasa penuh atas petundjuk-petundjuk Sekretaris Djenderal untuk menjalankan pemerintahan diwilayah tersebut selama djangka waktu pemerintahan UNTEA sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetudjuan sekarang ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Taraf Pertama Pemerintahan

UNTEA

Pasal VI

Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan selama masa pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengenai pengibaran bendera Indonesia dan bendera Belanda, telah terdapat suatu pengertian bahwa hal tersebut akan ditentukan antara Sekretaris Djenderal dan masing-masing pemerintah yang bersangkutan dalam suatu persetujuan (tersendiri).

Pasal VII

Sekretaris Djenderal akan menjediakan bagi UNTEA pasukan-pasukan keamanan yang dipandang perlu oleh Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa; pasukan-pasukan demikian itu terutama dimaksudkan untuk memperkuat polisi Irian Barat yang telah ada, dalam tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban umum. Korps Sukarela Irian Barat, yang pada saat tibanja Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berhenti sebagai bagian daripada angkatan bersenjata Belanda, dan angkatan bersenjata Indonesia diwilayah tersebut akan ditempatkan dibawah kekuasaan dan diperuntukkan bagi Sekretaris Djenderal untuk maksud yang sama. Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa sedapat mungkin akan menggunakan polisi Irian Barat sebagai pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dan, atas kebidjaksanaannya mempergunakan angkatan bersenjata Indonesia. Angkatan bersenjata Belanda akan dipulangkan setcepat mungkin dan selama mereka berada diwilayah tersebut akan ditempatkan dibawah pengawasan UNTEA.

Pasal VIII

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan laporan-laporan berkala kepada Sekretaris Djenderal tentang aspek-aspek utama mengenai pelaksanaan Persetujuan ini. Sekretaris Djenderal akan menjampaikan laporan-laporan lengkap kepada Indonesia dan Belanda dan, atas kebidjaksanaannya, dapat menjampaikan laporan kepada Madjelis Umum atau kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal IX

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa setcepat mungkin akan mengganti pedjabat-pedjabat tertinggi Belanda yang termaktub dalam Lampiran A dengan pedjabat bukan-Belanda bukan-Indonesia selama taraf pertama pemerintahan UNTEA yang akan berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berwenang memperkerdjakan untuk sementara waktu semua pedjabat-pedjabat Belanda, selain dari pada pedjabat-pedjabat tertinggi Belanda termaktub dalam Lampiran A, yang ingin bekerdja pada UNTEA, dengan ketentuan-ketentuan serta sjarat-sjarat yang dapat ditegakkan oleh Sekretaris Djenderal. Sebanjak mungkin orang-orang Irian Barat akan ditempatkan pada kedudukan-kedudukan administratif dan teknis. Untuk mengisi djabatan-djabatan yang diperlukan selebihnja, UNTEA akan berwenang mempekerdjakan pegawai-pegawai yang disediakan oleh Indonesia. Skala gaji yang telah dipakai di Irian Barat akan dipertahankan (diteruskan).

Pasal X

Segera setelah penjerahan pemerintahan kepada UNTEA, UNTEA akan mengumumkan dan akan menerangkan setjara luas ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dan akan memberitahukan kepada penduduk perihal penjerahan pemerintahan kepada Indonesia dan ketentuan-ketentuan bagi pelaksanaan penentuan nasib sendiri seperti tertera dalam Persetujuan sekarang ini.

Pasal XI

Sepandjang ada persesuaian dengan kata dan djiwa persetujuan sekarang ini, perundang-undangan yang telah ada akan tetap berlaku. UNTEA akan berkuasa mengeluarkan perundang-undangan baru atau mengubahnja dalam djiwa dan rangka persetujuan sekarang ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dewan-dewan Perwakilan akan dikonsultasi sebelum dikeluarkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan baru atau diubahnja Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang telah ada.

Taraf Kedua

Pasal XII

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi kebijaksanaan untuk menjerahkan pemerintahan seluruhnja atau sebagian kepada Indonesia setiap waktu sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Kekuasaan UNTEA akan berakhir pada saat penyerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia.

Pasal XIII

Pasukan-pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diganti dengan pasukan-pasukan keamanan Indonesia sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Semua pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditarik mundur pada saat penyerahan pemerintahan kepada Indonesia.

Pemerintahan Indonesia dan Penentuan Nasib Sendiri

Pasal XIV

Setelah penyerahan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia, Undang-undang dan Peraturan-peraturan Nasional Indonesia sebagai dasar akan berlaku diwilayah tersebut dengan pengertian bahwa Undang-undang dan Peraturan-peraturan itu sesuai dengan djaminan hak-hak serta kebebasan-kebebasan bagi penduduk menurut ketentuan-ketentuan Persetudjuan sekarang ini.

Undang-undang dan Peraturan-peraturan baru atau perubahan-perubahan pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang telah ada dapat didjalankan menurut jiwa Persetudjuan ini.

Dewan-dewan Perwakilan akan dikonsultasi seperlunja.

Pasal XV

Setelah penyerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia, tugas utama Indonesia ialah mempergiat lebih lanjut pendidikan rakyat, pemberantasan butahuruf, kemadjuan perkembangan sosial, kebudayaan dan ekonomi.

Sesuai dengan praktek-praktek di Indonesia dewasa ini akan dilakukan pula usaha-usaha untuk mempertjepat ikut seranja Rakyat didalam pemerintahan daerah melalui pemilihan berkala. Tiap aspek jang bertalian dengan perwujudan kebebasan memilih akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetudjuan ini.

Pasal XVI

Pada saat penyerahan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia sedjumlah pegawai ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang dianggap mentjukupi oleh Sekretaris Djenderal sesudah berkonsultasi dengan Indonesia, akan ditundjuk untuk tetap tinggal dimana sadja kewajiban mereka memerlukanja. Sebelum kedatangan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa jang akan ikut-serta pada saat jang wadjar dalam mengadakan usaha-usaha penentuan nasib sendiri kewajiban mereka akan terbatas pada memberi nasehat dan membantu persiapan-persiapan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan bagi penentuan nasib sendiri, ketjuali bilamana Indonesia dan Sekretaris Djenderal dapat bersetudju bahwa mereka akan mendjalankan pekerjaan ahli jang lainnja. Mereka akan bertanggung jawab pada Sekretaris Djenderal mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka.

Pasal XVII

Indonesia akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengangkat seorang Wakil, jang bersama dengan staf jang, antara lain, terdiri dari pegawai-pegawai tertera dalam pasal XVI, akan melaksanakan kewajiban Sekretaris Djenderal untuk memberi nasehat, membantu dan ikut-serta dalam usaha-usaha untuk perwujudan kebebasan memilih jang merupakan tanggung jawab Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sekretaris Djenderal pada waktu jang wadjar akan mengangkat seorang Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ia dengan Stafnja dapat mendjalankan kewadajiban-kewadajiban mereka satu tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri. Penambahan staf jang sekiranya dipandang perlu oleh wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditentukan oleh Sekretaris Djenderal setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnja akan mempunyai kebebasan bergerak jang sama seperti jang diberikan kepada pegawai-pegawai jang disebut dalam pasal XVI.

Pasal XVIII

Indonesia, dengan bantuan dan ikut sertanja wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnja, akan mengadakan usaha-usaha untuk memberi kesempatan kepada rakyat wilayah tersebut untuk melaksanakan kebebasan memilih. Usaha-usaha tersebut akan mentjakup :

a. Konsultasi (Musjawarah) dengan dewan-dewan perwakilan mengenai prosedur dan tjara-tjara jang pantas dianut untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat.

b. Penentuan tanggal jang pasti untuk pelaksanaan kebebasan memilih dalam djangka waktu jang ditetapkan oleh Persetudjuan sekarang ini.

c. Perumusan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa agar penduduk dapat menentukan (a) apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia; atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia.

d. Hak pilih semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga-negara asing, jang merupakan penduduk pada waktu penanda tanganan Persetudjuan dan pada waktu perwujudan penentuan nasib sendiri, untuk ikut serta dalam perwujudan penentuan nasib sendiri, jang akan dilaksanakan sesuai dengan praktek internasional, termasuk penduduk-penduduk jang pergi sesudah 1945 dan kembali kedaerah itu untuk bertempat tinggal lagi setelah berachirnja Pemerintahan Nderland.

Pasal XIX

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melaporkan kepada Sekretaris Djenderal tentang usaha-usaha jang telah disiapkan untuk perwujudan kebebasan memilih.

Pasal XX

Perwujudan penentuan nasib sendiri akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 1969.

Pasal XXI

1. Setelah pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, Indonesia dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjam-paikan laporan-laporan terakhir kepada Sekretaris Djenderal jang kemudian akan melaporkan kepada Madjelis Umum tentang pelaksanaan perwujudan penentuan nasib sendiri serta hasil-hasilnja.

2. Pihak-pihak pada persetujuan sekarang ini akan mengakui dan menaati hasil-hasil perwujudan penentuan nasib sendiri itu.

Hak-hak Penduduk

Pasal XXII

1. UNTEA dan Indonesia akan mendjamin sepenuhnya hak penduduk daerah tersebut, termasuk hak-hak bebas bitjara, bebas bergerak dan hak berkumpul dan bersidang. Hak-hak ini akan mentjakup hak-hak penduduk wilayah jang telah ada pada waktu penjerahan pemerintahan pada UNTEA.

2. UNTEA akan mengoper djandji-djandji Nderland jang telah ada mengenai konsesi-konsesi dan hak-hak milik.

3. Setelah Indonesia mengambil alih pemerintahan, Indonesia akan mengoper djandji-djandji tersebut jang tidak bertentangan dengan kepentingan dan perkembangan ekonomi rakyat wilayah tersebut. Suatu panitia bersama Indonesia — Nderland akan dibentuk setelah penjerahan pemerintahan pada Indonesia, untuk mempeladjar sifat konsesi-konsesi dan hak-hak milik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Selama masa pemerintahan UNTEA akan ada kebebasan bergerak bagi orang-orang sipil yang berkewarga-negeraan Indonesia dan Nederland keluar-masuk wilayah itu.

Pasal XXIII

Lowongan-lowongan dalam dewan-dewan perwakilan disebabkan keberangkatan warganegara-warganegara Nederland, atau karena sebab-sebab lain, akan diisi setjara wajar dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada dengan djalan pemilihan atau pengangkatan oleh UNTEA. Dewan-dewan perwakilan akan dikonsultasi sebelum pengangkatan wakil-wakil baru.

Soal-soal Keuangan

Pasal XXIV

1. Defisit-defisit dalam anggaran belandja dari wilayah selama pemerintahan UNTEA akan dibagi rata antara Indonesia dan Nederland Indonesia dan Nederland akan dikonsultasi oleh Sekretaris Djenderal dalam mempersiapkan anggaran belandja UNTEA, dan hal-hal keuangan lainnja yang berangkutan dengan kewajiban-kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan persetujuan sekarang ini, namun Sekretaris Djenderal berwenang memberikan keputusan terachir.

2. Kedua belah pihak dari Persetujuan sekarang ini akan membayar kembali kepada Sekretaris Djenderal semua pengeluaran yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Persetujuan ini dan akan menjediakan uang muka setjukupnja untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban Sekretaris Djenderal. Kedua belah pihak dari Persetujuan ini akan membagirata pembayaran kembali seperti tersebut diatas dan pengeluaran-pengeluaran uang muka tersebut.

Perdjandjian-Perdjandjian dan Persetudjuan-Persetudjuan terdahulu

Pasal XXV

Persetudjuan sekarang ini akan berlaku lebih kuat daripada setiap perdjandjian terdahulu mengenai wilayah Irian Barat.

Perdjandjian-perdjandjian dan persetujuan-persetudjuan terdahulu mengenai wilayah Irian Barat oleh karenanja dapat dibatalkan (d disesuaikan seperlunja) dengan ketentuan-ketentuan Persetudjuan sekarang ini.

Kelonggaran dan kekebalan

Pasal XXVI

Untuk pelaksanaan Persetujuan sekarang ini, Indonesia dan Nederland akan mendjajikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Konvensi mengenai Kelonggaran dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap milik, uang, modal dan para pegawai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teristimewa Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diangkat menurut Pasal IV dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diangkat menurut Pasal XVII, akan mendapat kelonggaran dan kekebalan seperti yang ditjantumkan dalam pasal XIX dari Konvensi mengenai Kelonggaran dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ratifikasi

Pasal XXVII

1. Persetujuan sekarang ini akan diratifikasikan menurut prosedur-prosedur konstitutionil daripada kedua belah pihak yang mengadakan Persetujuan.

2. Piagam-Piagam ratifikasi akan ditukar selekas mungkin di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh wakil-wakil tetap dari kedua belah pihak di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnja akan membuat berita atjara dari penukaran piagam ratifikasi tersebut dan akan menjampaikan turunan yang disjahkan kepada masing-masing pihak.

Waktu Mulai Berlakunja Persetujuan

Pasal XXVIII

1. Persetujuan sekarang ini mulai berlaku pada tanggal Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima resolusi seperti yang tertera di Pasal I dari Persetujuan sekarang ini.

SILABUS BERBASIS KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/ Semester : XI IPA/ Semester 2
Tahun Pelajaran : 2007/ 2008
Standar Kopetensi : 2. Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Penilaian			Alokasi Waktu	Media / Bahan	Sumber
				Jenis tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh tagihan			
2. 2 Menganalisis pergantian pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru	Latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin 1. Kekecewaan pada masa Demokrasi Terpimpin	❖ Siswa mampu menjelaskan proses berdirinya Angkatan Darat ❖ Siswa mampu mencari dan menjelaskan latar belakang Angkatan	Mendeskripsikan Latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.	Non tes	❖ Laporan hasil diskusi kelompok	Buatlah laporan hasil diskusi kelompok tentang latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.	2 X 45 menit	❖ OHP ❖ Foto-foto ❖ Gambar-Gambar	❖ Harold Crouch. 1986. Militer dan Politik di Indonesia. Sinar harapan. Jakarta. ❖ Herbert Feith. 1995. Soekarno dan

	<p>a). Terjadi pergolakan di daerah</p> <p>b). Adanya pergantian kabinet</p> <p>2. Kepentingan Angkatan Darat</p> <p>a). Angkatan Darat menjaga pertahanan dan keamanan.</p> <p>b). Angkatan Darat mempunyai peranan</p>	<p>Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin</p>						<p>Demokrasi Terpimpin. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.</p> <p>❖ Abdoel Fattah. 2005. Demiliterisasi Tentara. Pasang Surut Politik Militer 1945-2004. LKIS. Yogyakarta</p> <p>❖ Ulf Sundhussen. 1982. Politik Militer Indonesia</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

	<p>dalam pemerintahan</p> <p>Sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat.</p> <p>1. Pandangan Soekarno tentang Angkatan Darat</p> <p>a. Kebijakan yang dilakukan Soekarno terhadap Angkatan Darat.</p>	<p>❖ Siswa mampu menganalisis sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat</p>	<p>Menganalisis sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat.</p>	<p>tes</p>	<p>Essay tertulis</p>	<p>1. Uraikan tentang kebijakan atau tindakan Soekarno terhadap Angkatan Darat!</p> <p>2. Bagaimana cara Angkatan Darat menyeimbangkan PKI dalam percaturan politik?</p> <p>3. Dalam melaksanakan roda pemerintahan</p>	<p>1945-1967. Menuju Dwi Fungsi ABRI. Penerbit LP3ES. Jakarta.</p> <p>❖ Yahya A. Muhaimin. 1982. Perkembangan militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.</p>
--	---	--	---	------------	-----------------------	---	---

	<p>b. Angkatan Darat sebagai penyeimbang PKI</p> <p>2. Hubungan Soekarno dengan Angkatan Darat</p>	<p>❖ Siswa mampu menjelaskan sumbangan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin dilihat</p>	<p>Menyebutkan</p>	<p>Tes</p>	<p>Lisan (Presentasi)</p>	<p>bagaimana hubungan Soekarno dengan Angkatan Darat!</p> <p>Siswa Mempresentasikan tentang sumbangan Angkatan Darat pada bidang politik, dan ekonomi pada masa demokrasi</p>		<p>❖ Salim Said. 2001. Militer Indonesia dan politik: Dulu, Kini dan Kelak. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.</p>
--	--	---	--------------------	------------	---------------------------	---	--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	2) bidang ekonomi	dari bidang politik, dan ekonomi.				terpimpin.			
--	-------------------	-----------------------------------	--	--	--	------------	--	--	--

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R

Yogyakarta, April 2008

Alchadilla Marwhenny

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

Mata Pelajaran : Sejarah
Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/ Semester : XI IPA/ Semester 2
Tahun Pelajaran : 2007-2008
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

I. Standar Kompetensi

Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

II. Kompetensi Dasar

Menganalisis pergantian pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru

III. Materi Pokok

- A. Latar Belakang AD mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.
- B. Sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat.
- C. Sumbangan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin.

IV. Indikator

1. Mendeskripsikan Latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.
2. Menganalisis sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat.
3. Menjelaskan dan menyebutkan sumbangan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin.

V. Pengalaman Belajar

1. Siswa mampu menjelaskan proses berdirinya Angkatan Darat.
2. Siswa mampu mendeskripsikan latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.
3. Siswa mampu menganalisis sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat.
4. Siswa mampu menjelaskan dan menyebutkan sumbangan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin dilihat dari bidang politik, dan ekonomi.
5. Siswa mampu mendeskripsikan proses terjadinya masalah Irian Barat.
6. Siswa mampu menjelaskan proses penyelesaian Masalah Irian Barat

VI. Langkah- Langkah Pembelajaran

A. Pendahuluan (Apersepsi) (10 menit)

- Guru mengecek kembali materi ajar minggu lalu dengan tanya jawab kepada siswa.
- Guru menjelaskan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan dibahas hari ini dan dihubungkan dengan materi ajar sebelumnya.

B. Kegiatan Inti (75 menit)

1. a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 5 siswa yang mana setiap kelompok harus membentuk ketua dan sekretaris.
- b. Setiap kelompok diberi tugas yang sama yaitu membahas permasalahan-permasalahan berikut ini:
 - 1) Jelaskan Proses berdirinya Angkatan Darat.
 - 2) Siswa mampu mendeskripsikan latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.
 - 3) Siswa mampu menganalisis sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat.
 - 4) Siswa mampu menjelaskan dan menyebutkan sumbangan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin dilihat dari bidang politik, dan ekonomi.
 - 5) Siswa mampu mendeskripsikan proses terjadinya masalah Irian Barat.
 - 6) Siswa mampu menjelaskan proses penyelesaian Masalah Irian Barat
2. Setiap kelompok mendiskusikan masalah tersebut selama 30 menit.
3. Setelah 30 menit guru menunjuk perwakilan kelompok (2-3 kelompok) untuk mempresentasikan hasil laporannya.
4. Presentasi dalam pleno + tanya jawab selama 30 menit.
5. Guru Mengklarifikasi jawaban yang kurang tepat dan memberi penguatan pada jawaban yang benar.
6. Siswa diberi kesempatan untuk mencatat hal-hal yang penting.

C. Penutup (5 menit)

- Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan isi materi yang dibahas secara keseluruhan.
- Guru memberikan tugas untuk menyusun laporan yang ilmiah (revisi) dari hasil diskusi mereka tersebut.
- Guru menginformasikan materi ajar untuk pertemuan berikutnya.

VII. Metode Belajar

- ✓ Diskusi
- ✓ Presentasi
- ✓ Tanya jawab

VIII Media dan Sumber Belajar

A. Media

OHP, Foto-foto, dan gambar-gambar.

B. Sumber Belajar

- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Feith, Herbert. 1995. *Soekarno dan Demokrasi Terpimpin*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

- Abdoel Fattah. 2005. *Demiliterisasi Tentara. Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. LKIS. Yogyakarta.
- Sundhaussen, Ulf. 1982. *Politik militer Indonesia 1947-1967. Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Yahya. A. Muhaimin. 1982. *Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966*. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Salim Said. 2001. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Indria Samego. 2000. *TNI Di Era Perubahan*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

IX Penilaian

1. Penilaian Proses Belajar

Alat Penilaian: Lembar observasi

Bentuk: Format penilaian

Lembar Observasi

No	Nama Siswa	Aspek Penilaian								Jumlah Skor	Nilai	Prediksi
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1.												
2.												
3.												
dsb												

Aspek Penilaian:

1. Tidak terlambat mengikuti pelajaran.
2. Membawa buku-buku pelajaran.
3. Mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk.
4. Mampu belajar secara mandiri dan berkelompok.
5. Mengajukan pertanyaan dan tanggapan.
6. Tidak memaksakan kehendak dalam diskusi.
7. Santun dalam berkomunikasi.
8. Menyerahkan tugas tepat waktu.

Skor Maksimal : 32

Nilai : (Skor perolehan: skor maksimal) x 100

Prediksi : A : 86-100
 B : 78-85
 C : 60-75
 D : 50-59
 E : = 49

2. Penilaian Hasil

A. Alat Penilaian : Non tes

Bentuk Penilaian : Laporan Hasil diskusi

Bahan Diskusi :

- 1) Jelaskan Proses berdirinya Angkatan Darat
- 2) Siswa mampu mendeskripsikan latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.
- 3) Siswa mampu menganalisis sikap Soekarno terhadap Angkatan Darat.
- 4) Siswa mampu menjelaskan dan menyebutkan sumbangan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin dilihat dari bidang politik, dan ekonomi.
- 5) Siswa mampu mendeskripsikan proses terjadinya masalah Irian Barat.
- 6) Siswa mampu menjelaskan proses penyelesaian Masalah Irian Barat

B. Alat Penilaian : Tes

Bentuk Penilaian : Essay tertulis

Butir-Butir Soal :

- 1) Jelaskan latar belakang Angkatan Darat mendukung diberlakukannya Demokrasi Terpimpin?
- 2) Kebijakan atau tindakan apa saja yang dilakukan Soekarno terhadap Angkatan Darat?
- 3) Bagaimana hubungan yang terjalin antara Soekarno dengan Angkatan Darat pada masa Demokasi Terpimpin?
- 4) Sebutkan dan Jelaskan sumbangan-sumbangan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin?

Yogyakarta, Maret 2008

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R

Alchadilla Marwhenny